BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 61 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

    Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Bappelitbangda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
11. Rencana Pembanguanan Jangkah Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencana Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pembanguana Tahunan Daerah.
13. Rencana Kerja Pembangunan daerah Perubanhan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan atas perencanaan daerah untuk periode (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahun Daerah.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selajutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pemnbangunan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifikasi secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
23. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 2

RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Tahun 2019, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan daerah, serta Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2020.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan Sistematik sebagai berikut :
   a. Pendahuluan;
   b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   g. Penutup.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum pada:
   a. Lampiran I memuat tentang Dukomen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   b. Lampiran II memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan sebagai:
   a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun Anggaran 2020.
   b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020.
(2) Rancangan Akhir renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada PD kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.
(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (Satu) Minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(4) Bappelitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang renja PD.
(5) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah mencakup Renja PD Tahun 2020 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2020.
(2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1) Kepala PD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Renja PD.
(2) Hasil Pengendalian dan Evaluasi menjadi bahan Pengendalian dan Evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan renja PD untuk Tahun berikutnya.
(3) Kepala PD menyampaikan Hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 2 (Dua) Minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja PD.
(2) Kepala Bappelitbangda Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD.
(3) Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 12 Juni 2019

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ADAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR .61

Lenovohitamtian / D / Ivo

BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LUWU TAHUN 2020

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

SAMPUL

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 5

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD 6

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 6

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH 1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 1

2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah 1

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 6

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana 11

2.1.1.4. Kondisi Demografi 12

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 13

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 21

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar 21

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar 46

2.1.3.3. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 65

2.1.3.4. Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan 68

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 72

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 74

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 74

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 74

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 75

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 1

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 3
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu 4
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....5
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 1
4.1.1. Visi dan Misi 1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 6
4.2.1. Isu Strategis 6
4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....7
4.2.3. Sasaran Pembangunan Daerah 18
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....1
BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
BAB 7 1
7.1. KAIDAH PELAKSANAAN 1
7.2. KESIMPULAN 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu 3

Tabel 2.2. Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau dari Ketinggian 4

Tabel 2.3. Luas Lahan Menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Luwu 5

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2017 12

Tabel 2.5. Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2017 13

Tabel 2.6. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu ADHK (2010) Berdasarkan Pengeluaran 15

Tabel 2.7. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu ADHK (2010) Berdasarkan Lapangan Usaha 15

Tabel 2.8. Perkembangan Laju Inflasi Kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 17

Tabel 2.9. Perkembangan Indeks Harga Implisit Kabupaten Luwu Tahun 2013-2017 17

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Daerah Tahun 2014-2017 20

Tabel 2.11. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan 22

Tabel 2.12. Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan 28

Tabel 2.13. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37

Tabel 2.14. Capaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman 41

Tabel 2.15. Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 43

Tabel 2.16. Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial 44

Tabel 2.17. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 47

Tabel 2.18. Capaian Indikator Bidang Urusan Pangan 49

Tabel 2.19. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan 50

Tabel 2.20. Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup 51

Tabel 2.21. Capaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil 52

Tabel 2.22. Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa 54

Tabel 2.23. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana 55

Tabel 2.24. Capaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan 58

Tabel 2.25. Capaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika 59

Tabel 2.26. Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60
Tabel 2.27. Capaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal 61
Tabel 2.28. Capaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 62
Tabel 2.29. Capaian Indikator Bidang Urusan Kebudayaan 63
Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Bidang Statisik 63
Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja Bidang Persandian 64
Tabel 2.32. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan 64
Tabel 2.33. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kearsipan 65
Tabel 2.34. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pariwisata 66
Tabel 2.35. Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian 66
Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Transmigrasi 67
Tabel 2.37. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perikanan 67
Tabel 2.38. Capaian Indikator Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan 69
Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Keuangan 69
Tabel 2.40. Indikator Capaian Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 70
Tabel 2.41. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengawasan 71
Tabel 2.42. Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Dewan 71
Tabel 2.43. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pendidikan 75
Tabel 2.44. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kesehatan 76
Tabel 2.45. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76
Tabel 2.46. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 77
Tabel 2.47. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 77
Tabel 2.48. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Sosial 78
Tabel 2.49. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Tenaga Kerja 79
Tabel 2.50. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 80
Tabel 2.51. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pangan 81
Tabel 2.52. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pertanahan 81
Tabel 2.53. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup 82
Tabel 2.54. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 83
Tabel 2.55. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 84

Tabel 2.56. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana....85
Tabel 2.57. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perhubungan....86
Tabel 2.58. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Komunikasi dan Informatika....87
Tabel 2.59. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah....87
Tabel 2.60. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Penanaman Modal....88
Tabel 2.61. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga....88
Tabel 2.62. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Statistik....88
Tabel 2.63. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Persandian....89
Tabel 2.64. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kebudayaan....89
Tabel 2.65. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perpustakaan....90
Tabel 2.66. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kearsipan....91
Tabel 2.67. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pariwisata....92
Tabel 2.68. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pertanian....92
Tabel 2.69. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perdagangan....93
Tabel 2.70. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perindustrian....93
Tabel 2.71. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Transmigrasi....94
Tabel 2.72. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perikanan....94
Tabel 2.73. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perencanaan Pembangunan....95
Tabel 2.74. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Keuangan....96
Tabel 2.75. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan....96
Tabel 2.76. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Penelitian dan Pengembangan....98
Tabel 2.77. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pengawasan....98
Tabel 2.78. Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Sekretariat Dewan....99
Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2016 s.d 2020....7
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 s.d 2020....8
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 s.d 2020....9
Tabel 4.1. Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024....5
Tabel 4.2. Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Luwu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan....6

Tabel 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2020 11

Tabel 4.4. Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.....19

Tabel 5.1. Program dan Pagu Indikatif per OPD Tahun 2020 (*Dalam Ribu Rupiah*) 2

Tabel 6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2020.....2

Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2020.....4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ringkasan Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kedudukan RKPD 2020 Dalam Dokumen RPJMD 2

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 6

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Luwu 2

Gambar 2.2. Peta Topologi Kabupaten Luwu 6

Gambar 2.3. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Luwu 7

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tingkat Nasional 14

Gambar 2.5. Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Luwu ADHB Dari Sisi Pengeluaran Tahun 2010-2017 16

Gambar 2.6. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2013-2017.....18

Gambar 2.7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2011-2017.....19

Gambar 2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, & Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Tahun 2013-2017 19

Gambar 2.9. Rasio Kesempatan Kerja & Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun 2012-2017.....20

Gambar 2.10. Perkembangan Rasio Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan 21

Gambar 2.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Selama Sebulan 72

Gambar 2.12. Pola Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2015-2017.....73

Gambar 2.13. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Menurut Barang & Kuintil Pengeluaran Tahun 2017 73

Gambar 2.14. Produktivitas Total Daerah & Pertumbuhan Produktivitas Total Daerah 74

Lampiran I Peraturan Bupati Luwu
Nomor : 61 Tahun 2019
Tanggal : 12 Juni 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten serta rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat provinsi. Ketentuan tentang penyusunan RKPD bagi pemerintah daerah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, RPJMD Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten, sekaligus menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi serta prioritas pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Luwu tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Selain itu penyusunan RKPD juga menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RKP dan program strategi nasional. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui: (1) penelaahan terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Luwu, kebijakan pemerintah pusat pada RKP dan program strategi nasional, kebijakan pemerintah tingkat provinsi pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, dan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Luwu; (2) melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Luwu; (3) menyelaraskan hasil perencanaan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional; (4) menajamkan program prioritas pembangunan daerah; (5) mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan

pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, (6) serta mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan RKPD.

RKPD Kabupaten Luwu tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten periode 2019-2024. Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis. Oleh karena itu pelaksanaannya memiliki kedudukan yang strategis dalam pencapaian visi daerah yang tertuang dalam RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu dilaksanakan dalam lima tahapan rencana pembangunan tahunan daerah. Pada tahun pertama ini Pemerintah Kabupaten Luwu mengarahkan pembangunan pada upaya mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pendapatan daerah. Sumber daya aparatur memegang peranan penting dalam menyukseskan pembangunan daerah. Potensi sumber daya aparatur yang dimiliki kabupaten luwu cukup besar, meskipun demikian tanpa didukung kualitas dan managemen yang baik maka produktivitas aparatur tidak akan maksimal. Selain itu masih minimnya infrastruktur dibeberapa daerah di Kabupaten Luwu menjadi penyumbang tingginya ketimpangan akses kesempatan dalam berusaha. Dengan meningkatkan kesempatan berusaha yang adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu maka akan membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Luwu, menurunkan angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Secara ringkas tahapan pembangunan jangka menengah daerah serta kedudukan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1.

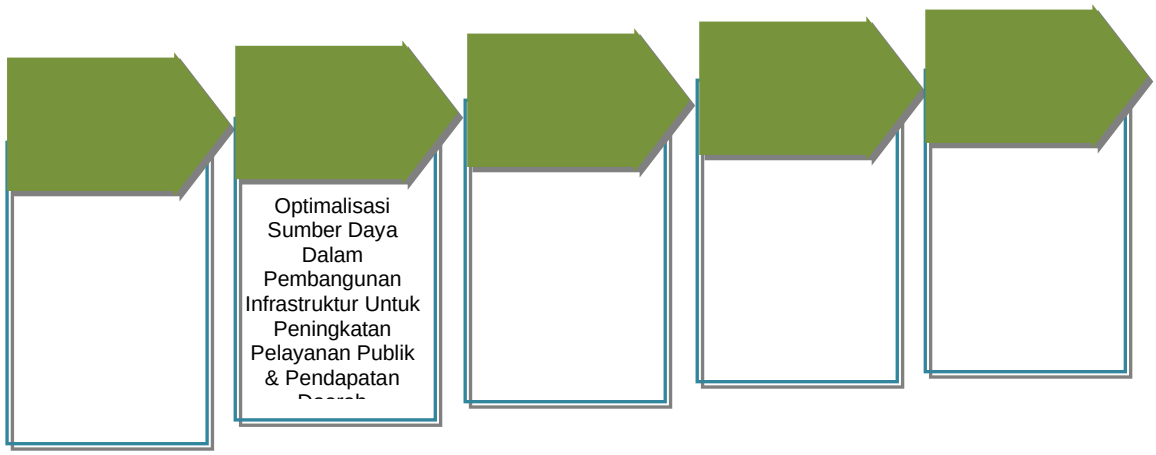

Gambar 1.1. Ringkasan Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kedudukan RKPD 2020 Dalam Dokumen RPJMD

RKPD Kabupaten Luwu merupakan hasil penajaman program prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah Kabupaten Luwu dalam penyempurnaan renja perangkat daerah. RKPD Kabupaten

Luwu juga menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KAU) dan prioritas plafon anggaran sementaran (PPAS) Kabupaten Luwu. Rancangan KUA dan PPAS merupakan bahan dalam pembahasan pemerintah daerah bersama dengan DPRD kabupaten Luwu untuk disepakati sebagai rancangan APBD Kabupaten Luwu.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2020 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
14. Rancangan Teknokratik Rencana Jangka Pangjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024;
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2020 merupakan Dokumen Tahun pertama dari Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dimana merupakan lima tahun terakhir dari periode RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025. Mengingat posisi strategis Dokumen RKPD 2020 sehingga memuat hal-hal yang menjadi perhatian, isu-isu strategis yang akan dihadapi, sinergitas antar sektor dan wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Desa/Kelurahan hingga Kabupaten.

Dalam penyusunan RKPD ini, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu juga mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang telah dibahas bersama pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi, serta mengacu pada Rancangan RKP 2020 yang telah dibahas baik pada pelaksanaan Musrenbang Regional Sulawesi maupun Musrenbang Nasional. Adapun hubungan antar dokumen dapat dilihat pada gambar berikut:

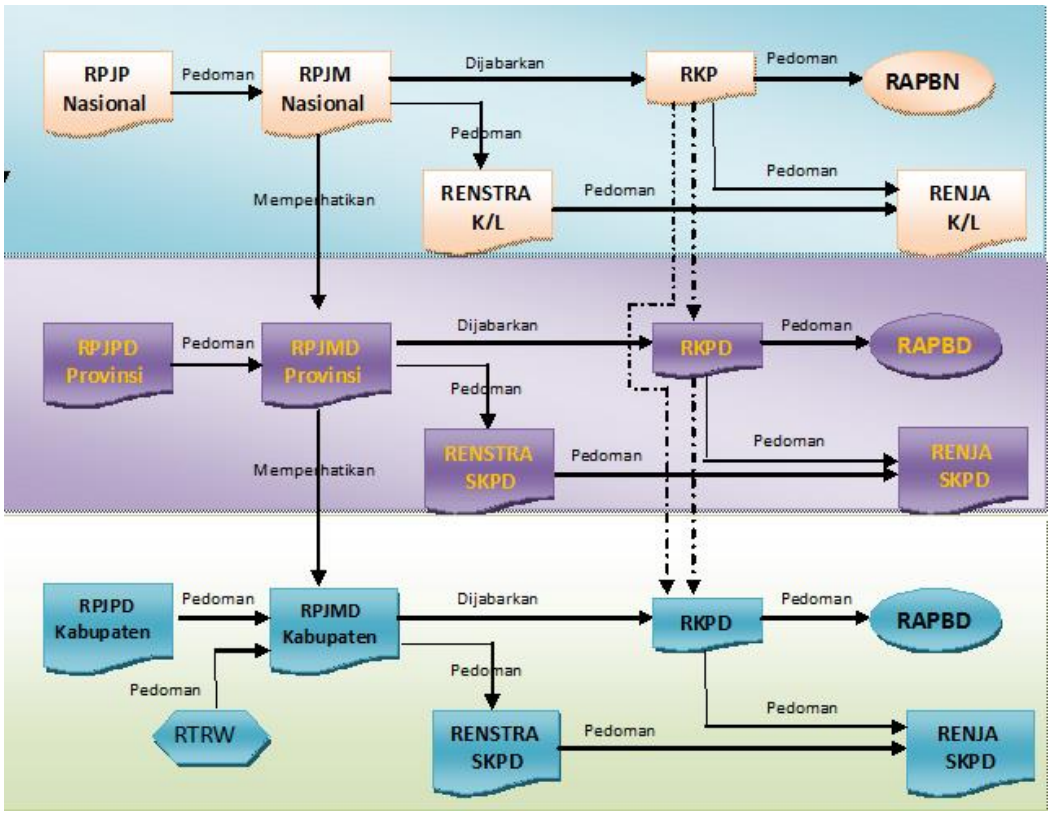

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

RKPD Kabupaten Luwu tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang terencana, berkesinambungan, dan sistematis. Selain itu RKPD tahun 2020 disusun untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2020 serta memberikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun 2020.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2020 mengikuti sistimatika penyusunan RKPD yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni pada Lampiran peraturan tersebut bagian C.3. tentang Penyajian Dokumen RKPD sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN** berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** berisi kondisi umum, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkpd sampai tahun berjalan dan realisasi rpjmd, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH** berisi arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** berisi tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020

BAB V **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB VII **PENUTUP**

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Secara Geografis letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2°34'45''-3°30'30'' lintang selatan dan 120°21'15''-121°43'11'' bujur timur dari kutub utara dengan patokan posisi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian posisi Kabupaten Luwu berada pada sisi utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 350 km dari ibu kota provinsi. Batas administratif Kabupaten Luwu sebelah utara berbatasan dengan Kota Palopo dan Luwu Utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km^2 terdiri dari 22 kecamatan yang terdiri atas 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km^2 atau sekitar 15,59% dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walerang Barat dengan luas masing–masing sekitar 259,77 km^2 dan 247,13 km^2 atau 8,66% dan 8,24%. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km^2 atau hanya sekitar 1,16%.

Wilayah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah setelah pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Dibagian utara terdapat 6 kecamatan dan terdapat 16 kecamatan dibagian selatan dimana letak ibukota Kabupaten Luwu berada dibagian selatan yaitu berada di Kecamatan Belopa. Kabupaten Luwu mempunyai 20 wilayah kelurahan dan 207 wilayah desa, wilayah tersebut berada di 22 kecamatan. Jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,5	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,3	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,1
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,8
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,6	3,15
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,2	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
Jumlah			**207**	**20**	**3000,25**	**100,02**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kondisi topografis menurut ketinggian daerah wilayah Kabupaten Luwu yang berada pada ketinggian 0-25 meter adalah sebesar 19,42 persen, 25-100 meter (dpl) sebesar 16,58 persen, 100-500 meter (dpl) sebesar 22,03 persen, 500-1000 m(dpl) sebesar 18,34 persen dan wilayah yang berada pada ketinggian 1000 meter (dpl) adalah sebesar 23,62 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.Topografi Kabupaten Luwu Ditinjau dari Ketinggian

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah				
		0-25 m (dpl)	25-100 m (dpl)	100-500 m (dpl)	500-1000 m (dpl)	1000 + m (dpl)
1	Larompong	1.807,54	3.944,92	9.479,15	3.728,15	3.563,43
2	Larompong Selatan	2.776,64	4.760,38	4.636,21	926,09	-
3	Suli	4.080,06	3.057,23	1.034,03	-	-
4	Suli Barat	121,38	3.338,78	3.806,05	3.939,32	4.143,98
5	Belopa	4.716,05	1.207,83	-	-	-
6	Kamanre	4.975,49	265,37	-	-	-
7	Belopa Utara	3.471,66	-	-	-	-
8	Bajo	1.896,63	2.311,73	2.642,47	-	-
9	Bajo Barat	316,83	-	2.268,42	2.468,06	234,15
10	Bassesantempe	-	-	9.601,02	12.130,84	8.366,58
11	Latimojong	-	-	6.524,25	8.964,08	31.285,45
12	Bassesangtempe Utara	-	5.306,79	-	-	-
13	Bupon	1.969,25	5.306,79	7.440,40	3.547,47	-
14	Ponrang	5.864,46	1.716,70	1.348,64	1.779,23	-
15	Ponrang Selatan	9.996,12	-	-	-	-
16	Bua	6.105,67	4.274,99	4.445,76	5.573,21	-
17	Walenrang	-	4.310,23	1.943,32	2.144,70	1.060,15
18	Walenrang Timur	4.086,96	2.277,59	-	-	-
19	Lamasi	913,66	3.017,60	287,8	-	-
20	Walenrang Utara	-	8.012,55	10.300,64	6.701,78	960,23
21	Walerang Barat	-	-	322,93	3.125,62	21.261,67
22	Lamasi Timur	5.162,26	600,61	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2019

Berdasarkan tingkat kemiringan tanah dan lahan, beberapa wilayah Kabupaten Luwu terdapat perbedaan dan dapat di kelompokkan kedalam 5 kelompok kemiringan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.Luas Lahan Menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Luwu

No	Kecamatan	Kemiringan					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	40%	
1	Larompong	5.678,20	2.496,00	586,91	1.144,71	12.619,16	22.525
2	Larompong Selatan	1.275,00	1.554,88	344,7	1.386,80	8.538,62	13.100
3	Suli	979,27	2.095,10	908,08	1.796,36	2.396,19	8.175
4	Suli Barat	1.092,80	574,88	573,88	2.674,36	10.434,19	15.350
5	Belopa	4.430,81	924,82	190,89	147,6	231,88	5.926
6	Kamanre	4.916,77	271,37	-	-	55,86	5.244
7	Belopa Utara	3.317,82	106,41	-	-	48,77	3.473
8	Bajo	947,62	2.133,83	254,44	481,45	3.034,66	6.852
9	Bajo Barat	685,96	1.052,80	324,89	354,74	4.211,62	6.630
10	Basse sangtempe	8,44	58,05	-	6.280,20	23.753,31	17.812
11	Latimojong	1,67	98,39	630,7	145,96	45.898,28	46.775
12	Basse sangtempe Utara	-	-	-	-	-	-
13	Bupon	1.554,72	2.422,78	932,64	1.121,92	12.234,94	18.267
14	Ponrang	650,51	1.146,22	587,91	1.044,71	7.279,65	10.709
15	Ponrang Selatan	1.457,75	1.534,88	345,65	1.077,98	5.581,74	9.998
16	Bua	1.175,34	3.107,58	610,37	1.921,87	13.585,84	20.401
17	Walenrang	3844,18	3.271,72	796,74	931,85	4.075,51	9.460
18	Walenrang Timur	5.008,66	581,76	242,22	328,2	204,16	6.365
19	Lamasi	1.118,56	2.809,40	106,51	185,53	-	4.220
20	Walenrang Utara	1.308,95	1.317,93	595,64	813,86	21.940,62	25.977
21	Walenrang Barat	336,85	2.137,48	213,33	459,61	21.565,76	24.713
22	Lamasi Timur	5.765,00	-	-	-	-	5.765
JUMLAH			29.696,28	8.245,50	22.297,60	197.690,77	300.025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2019

Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Sulawesi Selatan wilayah Kabupaten Luwu terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu:

1) Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah Aluvial memiliki manfaat di bidang pertanian salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian. Jenis tanah ini tersebar di 25,69% dari luas wilayah Kabupaten Luwu, yang paling luas terdapat di Kecamatan Walenrang Utara, Walenrang, Lamasi, Bua, Bupon, Ponrang Selatan dan Belopa.
2) Tanah Podzolik berasal dari tanah yang berbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu udara rendah, jenis tanah ini terdapat di daerah pegunungan. Tanah ini berada didaerah yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm,tanah podzolik memilikikesuburan sedang, berciri rkan warna merah atau

kuning, memiliki tekstur yang lempung atau berpasir dan memiliki pH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminum dan besi yang tinggi, tanah ini tersebar di 1,08% dari luas wilayah Kabupaten Luwu yakni Kecamatan Larompong Selatan dan Lamasi.

3) Tanah Latosol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan gunung berapi kemudian mengalami proses pelapukan lanjut dimana jenis tanah ini tersebar 8,39% dari luas wilayah Kabupaten Luwu,yang paling luas terdapat di Latimojong dan Bastem Utara.
4) Tanah Regozol merupakan tanah yang berbentuk akibat pelapukan batuan yang mengandung abu vulkanik, pasir pantai dan nafal. Tanah regozol berwarna keabuan jenis tanah ini tersebar 50,17% dari luas wilayah Kabupaten Luwu dimana rata-rata kecamatan yang berada di Kabupaten memiliki tekstur tanah seperti ini dan lain-lain sebesar 14,67%.

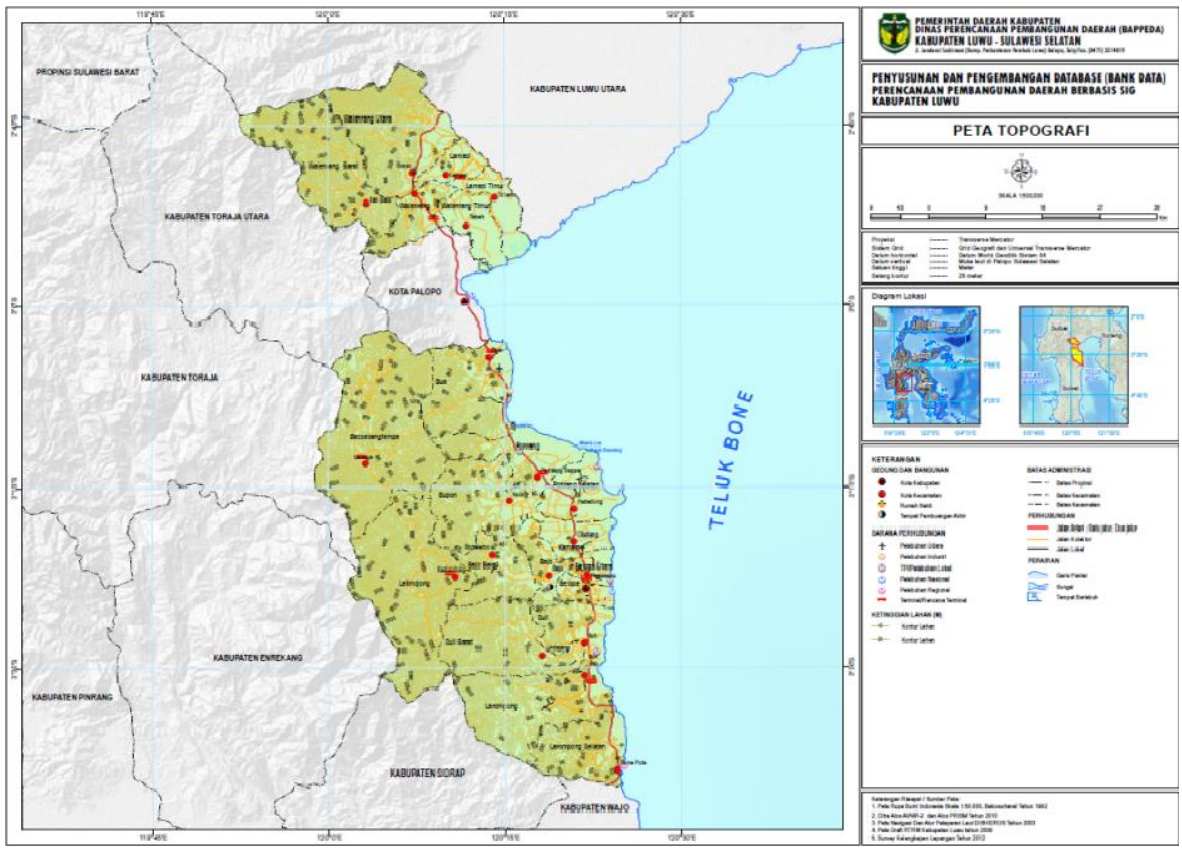

Gambar 2.2. Peta Topologi Kabupaten Luwu

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi umum pemanfaatan lahan di Kabupaten Luwu masih didominasi oleh kawasan non terbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan

kegiatan budidaya yang ada. Adapun sebaran kawasan terbangun dan kawasan non terbangun dapat dilihat pada gambar berikut:

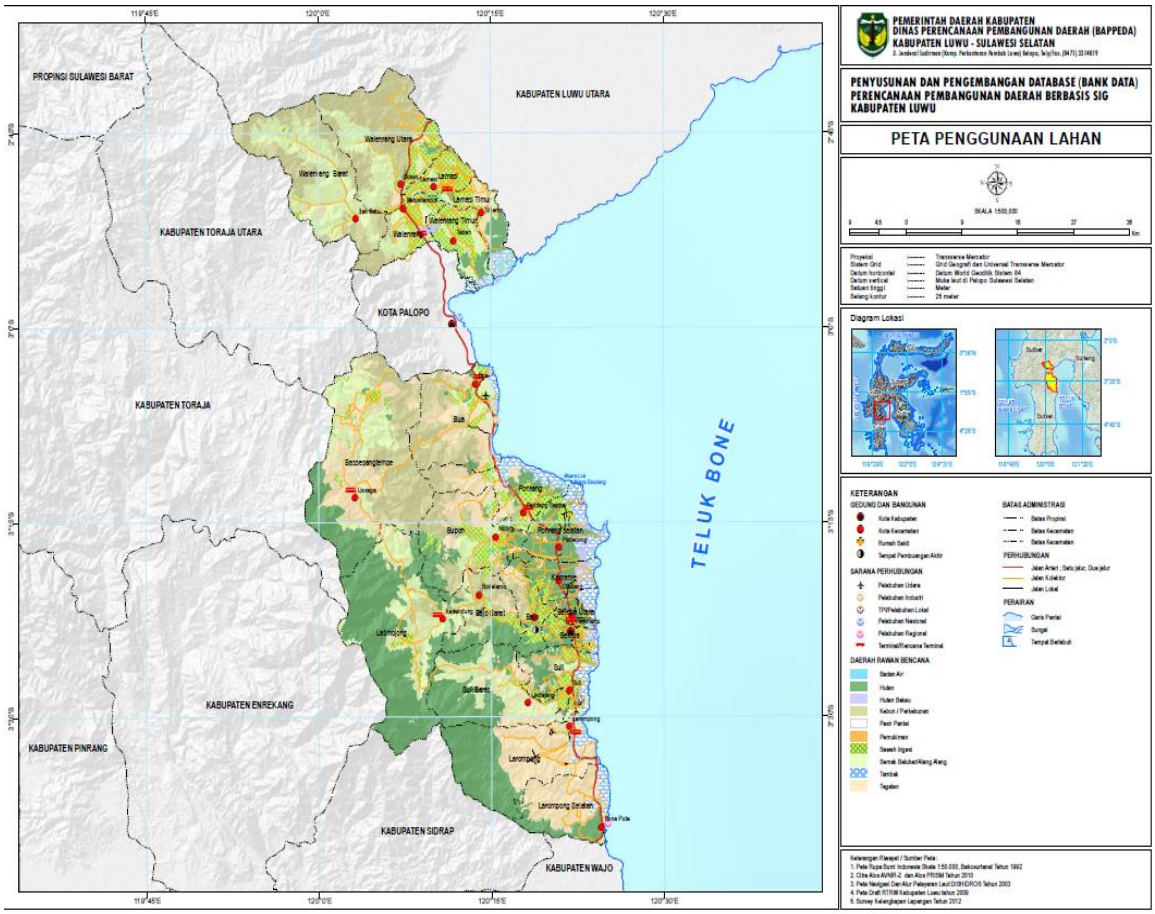

Gambar 2.3. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Luwu

Mengingat luasnya lahan di Kabupaten Luwu yang memiliki potensi, untuk memberikan gambaran lebih detail, maka potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu:

1) Potensi Kawasan Lindung
   a) Potensi Kawasan Suaka Alam;

      Meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.Adapun Kawasan Suaka Alam diKabupaten Luwu adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Ponrangdan Bua yang memiliki biota laut yang dilindungi seperti penyu, ikan paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, triton terompet, nautilus berongga, troka, batu laga.

   b) Potensi Kawasan Pelestarian Alam;

      Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam, di Kabupaten Luwu memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan

primerdan hutan produksi, aneka flora langka seperti rotan, jati, Burahol dan Cendana. Kemudian ada berbagai pohon khas Luwu yang tidak ditemukan ditempat lain atau istilahnya endemik seperti Pohon Kayu Hitam, Pohon Kayu Damar, Pohon Kayu Eboni, Rotan dan lain sebagainya. Sedangkan satwalangka antara lain Bisang, Musang, Kus-Kus, Anoa, Monyet serta endemik lainnya.

c) Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan;

Terdiri dari LingkunganNonterbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Hutan wisata danpenelitian Simoma. Kabupaten Luwu memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangatpenting meliputi wisata budaya religiLapandoso merupakan tempat pendaratan pertama Datuk Sulaiman yang merupakan pembawa Agama Islam yang pertama di Tana Luwu, Buntu Lakka' merupakan suatu benteng yang sama sekali belum tersentuh oleh tangan pemerintah.Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnyamerupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut.Terdapat pula wisata budaya dan ziarah yakni Assalangnge merupakan makam dari Tandi Pau (Maddika Bua) yakni pemeluk agama Islam pertama di Tana Luwu, Masjid Jami Bua merupakan mesjid pertama yang berada di Tana Luwu yang dibangun oleh Datok Sulaiman,yang dapat menjadi potensi wisata dan dapat dikembangkan lebihlanjut.

d) Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan;

Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung,Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I, Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Luwu memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, danmelindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan.

2) Potensi Kawasan Budidaya

Potensi Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Potensi Budidaya terdiri atas:

a) Potensi Hutan produksi;

Selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati.

b) Pengembangan lahan pertanian;

Dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi dimasing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Luwu merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Luwu, secara umum Kabupaten Luwu memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor.

c) Potensi perikananbudidaya air tawar;

Sangat besar dan belum sepenuhnyadikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyakdiolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensiperikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut/ empang (tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telahdidukung dengan adanya pelabuhan pelelangan ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air lautpasca panen.

d) Potensi Peternakan;

Ternak besar (sapi, kambing, kerbau), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabupaten Luwu. Peternakanini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.Penduduk Kabupaten Luwu mayoritas beragama muslim (Islam) membutuhkan kambing dan sapi khususnya pada hari-hari besar seperti idul adha, selain itu sebagian masyarakat yang berada di bagian utara Kabupaten Luwu (Walmas) mayoritas beragama kristen sehingga terdapat beberapa ternak babi di wilayah tersebut.

e) Potensi pariwisata;

Banyak dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata diKabupaten Luwu yang dapat menarik minat wisatawan, namun belum dikembangkan secara optimal. Diantaranya seperti keindahan alam dan pantai yang masih alami seperti objek wisata Buntu Mattabing, merupakan sebuah pantai dengan spot yang cukup indah yang terletak pada kecamatan Larompong Selatan, Gua Ilan Batu merupakan sebuah objek wisata yang berada di Kecamatan Walenrang merupakan sebuah gua yang berada diatas sungai dengan pemandangan yang eksotis dan masih banyak lagi yang belum terjamah oleh Pemerintah Daerah.

f) Potensi pengembangan Permukiman;

Permukiman perdesaan dan perkotaan yangterintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah disekitarnya.

g) Potensi pengembangan industri;

Dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industri di Kabupaten Luwu masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya perencanaan kawasan industri di Desa Lare-lare selain itu telah dibangun jauh sebelumnya terdapat industri pengolahan kayu tripleks oleh pihak swasta yang berada di Kecamatan Bua yang cukup banyak menyedot tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Luwu. Sektor industri lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan dan pertanian. Selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Luwu menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

h) Potensi Pertambangan;

Pengembangan pertambangan di Kabupaten Luwu berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan cukup baik khususunya pada kelas tambang galian C selain itu juga ada wilayah yang cukup menjanjikan khususnya pada tambang emas yakni wilayah Bastem dan Bastem utara, diharapkan untuk kedepan untuk dapat bekerjasama dengan investor dalam mengeksplor potensi tersebut.

i) Potensi Perdagangan;

Khususnya melalui Pelabuhan memiliki potensi perdagangan skala wilayah dan nasional.

j) Potensi kawasan pusat pemerintahan dan pusat budaya;

Ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah diKabupaten Luwu dan menjadi *"wajah"* kebudayaan masyarakat KabupatenLuwu.

3) Potensi Kawasan Strategis

Kabupaten Luwu memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Luwu secara umum.

4) Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan

Kawasan pesisir di kabupaten Luwu khususnya bagian selatan terbentang dari Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Ponrang pada bagian utara terdapat Lamasi Pantai memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan

keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi yang di manfaatkan sebagai sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental service*).

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggimengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten luwu meliputiKawasan rawan Banjir, Longsor, Abrasi Pantai, Angin Putting Beliung dan Rawan Air Pasang. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Luwu yakni sebagai berikut :

1) Wilayah Rawan Banjir;
   Lokasi sering terjadinya banjir di Kabupaten Luwu yaitu di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli dan Kecamatan Bua yang disebabkan oleh meluapnya air sungai selain itudiakibatkan oleh berkurangnya daya serap tanah dan fungsi pembuangan air (drainase)yang belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknik maupun pelaksanaan fisiknya.
2) Wilayah Rawan Longsor;
3) Kawasan yang rawan terhadap bahaya Longsor/Erosididominasi oleh wilayah kecamatan yang memiliki wilayah pegunungan terutama di Kecamatan Bastem, Latimojong, Bastem Utara, Suli Barat, Bajo Barat dan Walenrang Barat.Bahaya Longsor disebabkan oleh semakin banyaknya perambah-perambah liar yang disertai dengan kurangnya reboisasi diwilayah Hulu Pegunungan.
4) Wilayah Rawan Abrasi Pantai;
5) Kawasan yang berpotensi mengalami rawan Abrasi Pantai didominasi wilayah pesisir pantai yang memiliki pemukiman dan dikelolah sebagai tambak. Kawasan tersebut antara lain di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa Utara, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur
6) Wilayah Rawan Angin Puting Beliung;
7) Kawasan yang berpotensi mengalami bahaya angin putting beliung adalah wilayah sekitar pesisir pantai yang memiliki areal terbuka yang luas. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Belopa Utara, Bua dan Lamasi Timur.
8) Wilayah Rawan Air Pasang Laut;
9) Letak Kabupaten Luwu yang sebagian kecil wilayahnya berada pada pesisir pantai merupakandaerah yang berpotensi rawan air pasang. Desa di wilayah pesisir Kecamatan Larompong yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

2.1.1.4. Kondisi Demografi

Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 6,73 %,dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 353.277 jiwa terdiri dari 173.472 jiwa laki–laki dan 179.805 jiwa perempuan. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2017, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 8.49 % dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,64 %.

Tabel 2.4.Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2017

No	Kecamatan	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Larompong	6.227	11.138	10.737	21.875
2	Larompong Selatan	5.270	9.093	9.144	18.237
3	Suli	5.848	10.781	10.763	21.544
4	Suli Barat	2.852	5.364	4.993	10.357
5	Belopa	4.906	8.913	9.228	18.141
6	Kamanre	3.513	6.268	6.327	12.595
7	Belopa Utara	4.971	9.075	9.072	18.147
8	Bajo	4.277	8.117	8.106	16.223
9	Bajo Barat	2.778	5.317	5.161	10.478
10	Basse sangtempe	1.535	3.252	2.921	6.173
11	Latimojong	1.493	3.215	2.954	6.169
12	Basse sangtempe Utara	1.902	4.231	3.746	7.977
13	Bupon	4.139	4.906	7.601	15.507
14	Ponrang	7.292	14.168	14.040	28.208
15	Ponrang Selatan	7.445	14.080	13.865	27.945
16	Bua	8.695	15.963	16.022	31.985
17	Walenrang	4.918	9.596	9.477	19.073
18	Walenrang Timur	4.733	9.115	8.853	17.968
19	Lamasi	6.265	11.427	11.181	22.608
20	Walenrang Utara	5.693	10.571	10.272	20.843
21	Walenrang Barat	2.512	5.640	5.144	10.784
22	Lamasi Timur	3.810	7.237	6.974	14.211
JUMLAH		**101.074**	**190.467**	**186.581**	**377.048**

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Sementara jika dilihat kepadatan penduduk per km^2,Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 536 penduduk per kilometer persegi (km^2) dengan luas wilayahnya hanya 1,40 % dari luas Kabupaten Luwu, sementara yangpaling rendah kepadatannya terdapat di Kecamatan Latimojong yaitu hanya 13 penduduk per kilometer persegi (km^2) dengan luas wilayah 15,60% dari luas kabupaten Luwu.

Tabel 2.5.Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2017

No	Kecamatan	KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Larompong	6.227	21.875	225,25	97
2	Larompong Selatan	5.270	18.237	131,00	139
3	Suli	5.848	21.544	81,75	263
4	Suli Barat	2.852	10.357	153,50	67
5	Belopa	4.906	18.141	59,26	306
6	Kamanre	3.513	12.595	52,44	240
7	Belopa Utara	4.971	18.147	34,73	522
8	Bajo	4.277	16.223	68,52	238
9	Bajo Barat	2.778	10.478	66,30	158
10	Basse sangtempe	1.535	6.173	178,12	35
11	Latimojong	1.493	6.169	467,75	13
12	Basse sangtempe Utara	1.902	7.977	122,88	65
13	Bupon	4.139	15.507	182,67	85
14	Ponrang	7.292	28.208	107,09	263
15	Ponrang Selatan	7.445	27.945	99,98	279
16	Bua	8.695	31.985	204,01	157
17	Walenrang	4.918	19.073	94,60	202
18	Walenrang Timur	4.733	17.968	63,65	282
19	Lamasi	6.265	22.608	42,20	536
20	Walenrang Utara	5.693	20.843	259,77	80
21	Walenrang Barat	2.512	10.784	247,13	43
22	Lamasi Timur	3.810	14.211	57,65	246
JUMLAH		**101.074**	**377.048**	**3.000,25**	**4316**

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Luwu

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah ketika setiap individu dalam masyarakat dapat menyediakan barang untuk memenuhi kepuasannya. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan pemerintah sedianya harus dapat meningkatkan kemampuan individu dalam masyarakat untuk memenuhi kepuasannya yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, pembangunan harus mampu mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan, tetapi juga dapat mewujudkan pemerataan, penurunan kemiskinan, serta penciptaan kesempatan kerja. Secara umum, gambaran aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu dapat dijelaskan melalui indikator-indikator sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi. Sepanjang tahun 2013-2017 PDRB Kabupaten Luwu tumbuh cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,69% pertahun, diatas rata-rata pertumbuhan tingkat nasional dan pertumbuhan PDRB tingkat provinsi. Meskipun tumbuh

dengan baik selama kurun waktu tersebut, di tahun 2017 perekonomian Kabupaten Luwu sedikit melambat dengan hanya mampu tumbuh sebesar 6,8%, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang mampu tumbuh sebesar 7,9%. Terjadinya perlambatan pada kinerja perekonomian daerah di tahun 2017 terutama dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa. Sementara dari sisi lapangan usaha, perlambatan terjadi pada hampir pada seluruh sektor usaha kecuali sektor konstruksi; transportasi dan pergudangan; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

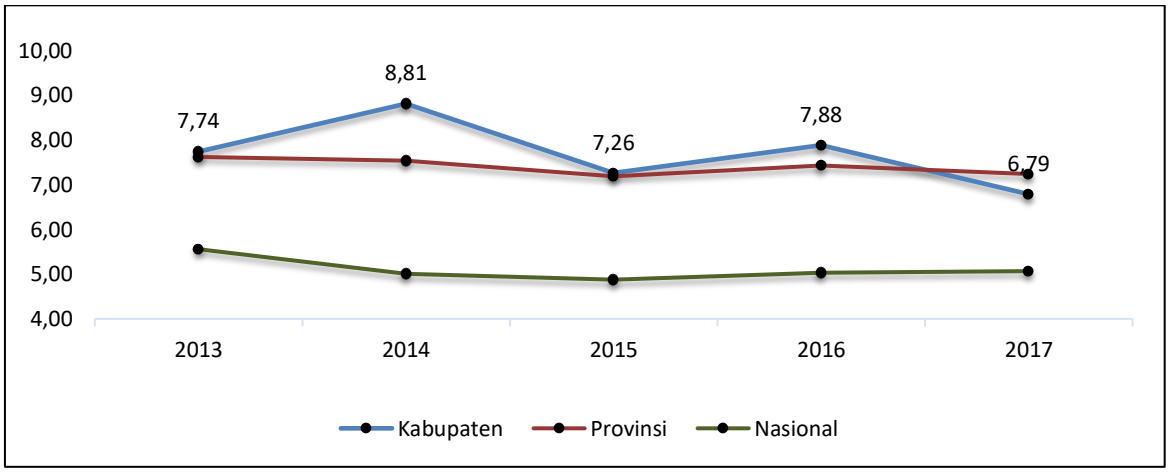

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tingkat Nasional

Secara keseluruhan kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun 2013-2017 didorong oleh pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,03% pertahun. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu mampu tumbuh sebesar rata-rata 6,72% pertahun. Disisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor usaha tumbuh baik sepanjang tahun 2013-2017 dengan rata-rata pertumbuhan diatas 7% pertahun. Beberapa sektor yang hanya mampu tumbuh dibawah rata-rata 7% pertahun antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta konstruksi.

Tabel 2.6.Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu ADHK (2010) Berdasarkan Pengeluaran

No	Sektor Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,16	7,19	6,20	7,16	6,35	6,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,98	10,58	2,55	3,46	10,37	6,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,60	3,74	6,19	3,56	0,93	3,59
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9,65	10,02	6,79	6,45	8,89	8,03
5	Perubahan Inventori	-11,51	-183,68	-258,35	-17,70	7,81	4,13
6	Ekspor Barang dan Jasa	9,68	20,99	-0,53	12,40	6,64	9,59
7	Impor Barang dan Jasa	6,50	6,75	7,00	6,26	6,45	6,61

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.7.Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu ADHK (2010) Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,10	12,32	6,49	7,96	5,16	7,95
2	Pertambangan dan Penggalian	11,41	11,29	6,06	9,01	8,89	8,8
3	Industri Pengolahan	3,51	6,75	4,44	8,86	7,70	6,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,76	20,80	-7,24	18,13	5,90	8,81
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,01	1,06	0,56	10,02	8,47	4,94
6	Konstruksi	5,02	1,48	5,31	4,73	5,00	4,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,64	6,86	9,33	9,10	6,55	7,95
8	Transportasi dan Pergudangan	5,68	8,99	6,68	4,72	6,12	6,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,75	3,72	6,30	7,77	5,67	5,85
10	Informasi dan Komunikasi	23,83	5,32	14,69	8,86	8,69	9,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,77	4,56	10,30	15,23	5,51	8,82
12	Real Estate	8,13	7,46	6,75	7,17	6,62	7
13	Jasa Perusahaan	10,91	8,44	11,67	9,14	12,34	10,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	2,71	6,03	8,00	4,87	5,38
15	Jasa Pendidikan	11,97	2,51	13,57	9,59	8,04	8,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,22	10,48	14,54	7,71	47,10	18,99
17	Jasa lainnya	7,57	3,95	10,26	8,08	10,96	8,27

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan distribusinya, komposisi PDRB di Kabupaten Luwu masih belum mengalami perubahan. Konsumsi rumah tangga masih memiliki kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB mencapai 59,7% pada tahun 2017, disusul pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 34,6%, dan pengeluaran pemerintah sebesar 9,7%. Net ekspor-impor Kabupaten Luwu sepanjang tahun 2013-2017 menunjukkan tren perbaikan meskipun masih mengalami defisit sebesar Rp.747.242,68 (dalam juta). Di sisi lapangan usaha, PDRB Kabupaten Luwu masih didominasi sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang memiliki share sebesar 49,8% pada tahun 2017. Sektor perdagangan besar dan eceran masih berada di peringkat kedua dengan share sebesar 11,7%. Sedangkan untuk sektor jasa dan industri pengolahan masing-masing masih berada dibawah 10%.

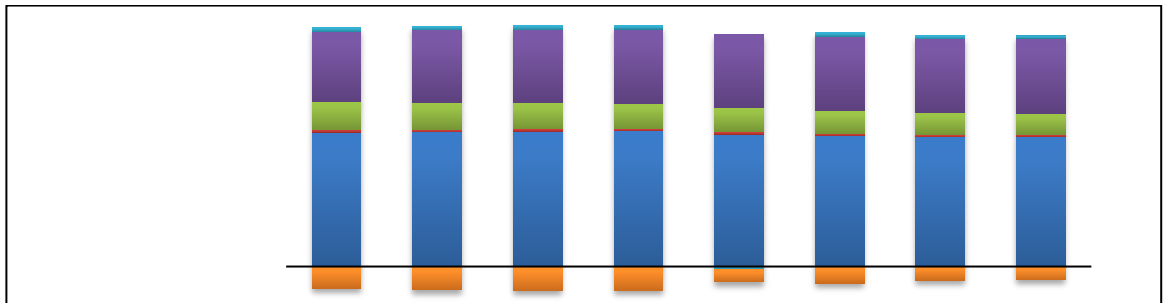

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Net Eksport	-9,9	-10,6	-11,0	-10,8	-5,5	-7,6	-6,2	-6,0
Perubahan Inventori	1,8	1,8	2,0	1,6	-1,3	1,8	1,4	1,0
PMTB	32,4	33,3	33,6	34,1	33,9	34,0	34,0	34,6
Konsumsi Pemerintah	12,8	12,5	12,1	11,7	11,0	10,7	10,2	9,7
Konsumsi LNPRT	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
Konsumsi RT	61,8	62,0	62,2	62,4	60,9	60,2	59,7	59,7

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.5. Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Luwu ADHB Dari Sisi Pengeluaran Tahun 2010-2017

Inflasi. Perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK dilakukan dengan mengikuti perkembangan zona IHK Kota Palopo. Untuk tahun 2018, nilai inflasi zona Kota Palopo tercatat sebesar 4,39%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,95%. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terjadinya peningkatan tekanan harga di hampir seluruh kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara, sementara itu untuk peningkatan harga komoditas holtikultura dan sayur-sayuran masih terjadi, namun relatif terkendali disebabkan panen dan kondisi cuaca yang kondusif. Secara keseluruhan perkembangan laju inflasi seluruh kota IHK di provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.Perkembangan Laju Inflasi Kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

No	Prov/Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Bulukumba	9,45	2,17	1,48	4,66	3,19	
2	Bone	8,22	0,97	1,50	5,54	4,35	
3	Makassar	8,51	5,18	3,18	4,48	3,02	
4	Pare-Pare	9,38	1,58	2,11	3,43	1,55	
5	Palopo	8,95	3,38	2,74	3,95	4,39	
6	**Sul-Sel**	8,61	4,48	2,94	4,44	3.09	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, jika dilihat dari indeks harga implisit, perkembangan harga-harga di Kabupaten Luwu tahun 2017 justru melambat. Laju pertumbuhan indeks harga implisit pada tahun 2017 tercatat sebesar 2,97%, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang tercatat sebesar 6,1%. Melambatnya indeks harga implisit terjadi pada pada berbagai sektor pengeluaran kecuali pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga. Indeks harga implisit untuk pengeluaran LNPRT tercatat sebesar 5,06%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnnya yang hanya sebesar 3,73%.

Tabel 2.9.Perkembangan Indeks Harga Implisit Kabupaten Luwu Tahun 2013-2017

No	Nasional/Prov/Kab	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten	6,43	7,91	7,13	6,63	2,45

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pendapatan perkapita. Sepanjang tahun 2013-2017 pendapatan perkapita Kabupaten Luwu terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang mampu tumbuh dengan baik sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2017, pendapatan perkapita Kabupaten Luwu mencapai Rp. 24.046 ribu/tahun meningkat sebesar 5,8% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 22.711 ribu/tahun. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, laju pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Luwu pada tahun 2017 terkesan melambat seiring dengan melambatnya kinerja perekonomian daerah pada tahun tersebut.

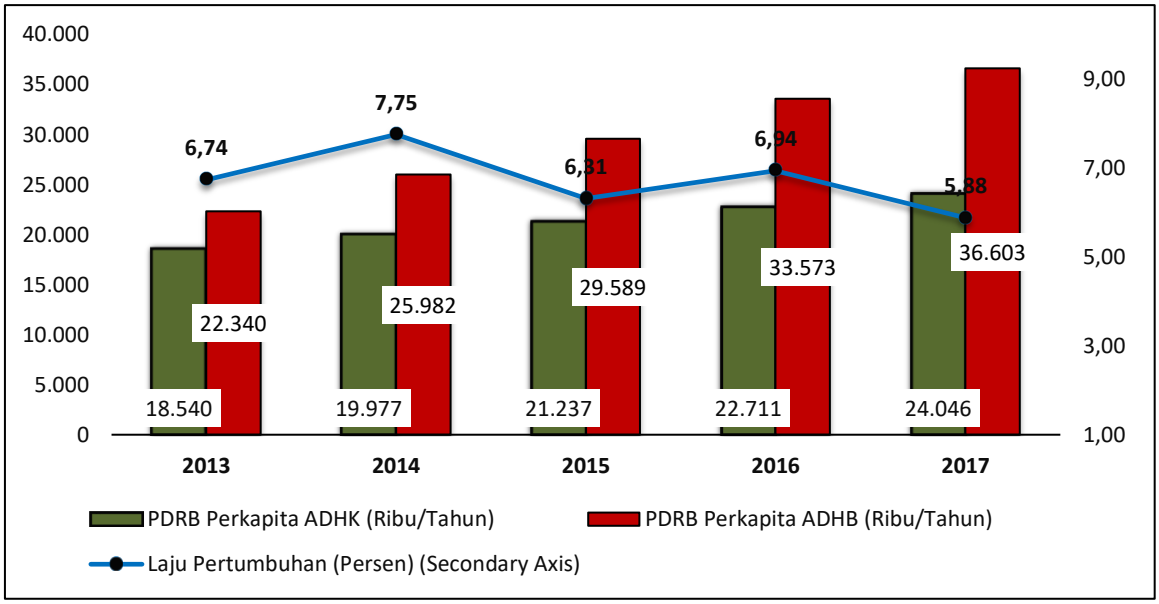

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.6. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2013-2017

Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 nilai IPM Kabupaten Luwu tercatat sebesar 69,02 naik 0,5 point dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, nilai IPM Kabupaten Luwu masih berada diperingkat 10 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Luwu terutama dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah (RLS) serta pengeluaran perkapita yang masih jauh dari standar yang telah ditetapkan UNDP. Sementara itu untuk komponen lain seperti angka harapan hidup dan harapan lama sekolah sudah cukup baik meskipun masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Pengangguran. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu mencapai 4,8%, turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi khususnya sektor yang padat karya menjadi faktor pendorong meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditengah meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja. Selain tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan, rasio kesempatan kerja di Kabupaten Luwu juga meningkat pada tahun 2017. Secara ringkas, perkembangan tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rasio kesempatan kerja terhadap angkatan kerja dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

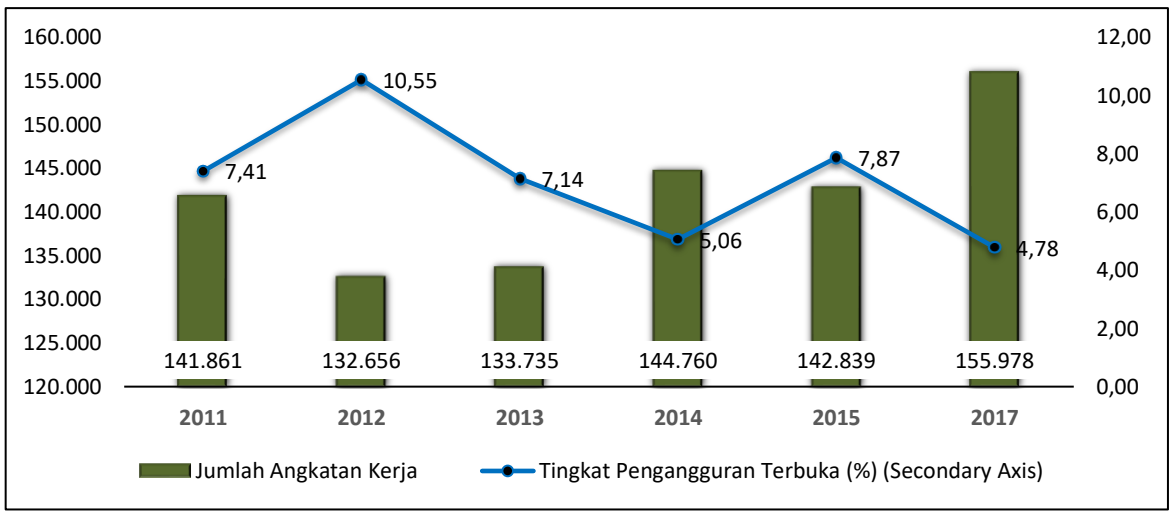

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2011-2017

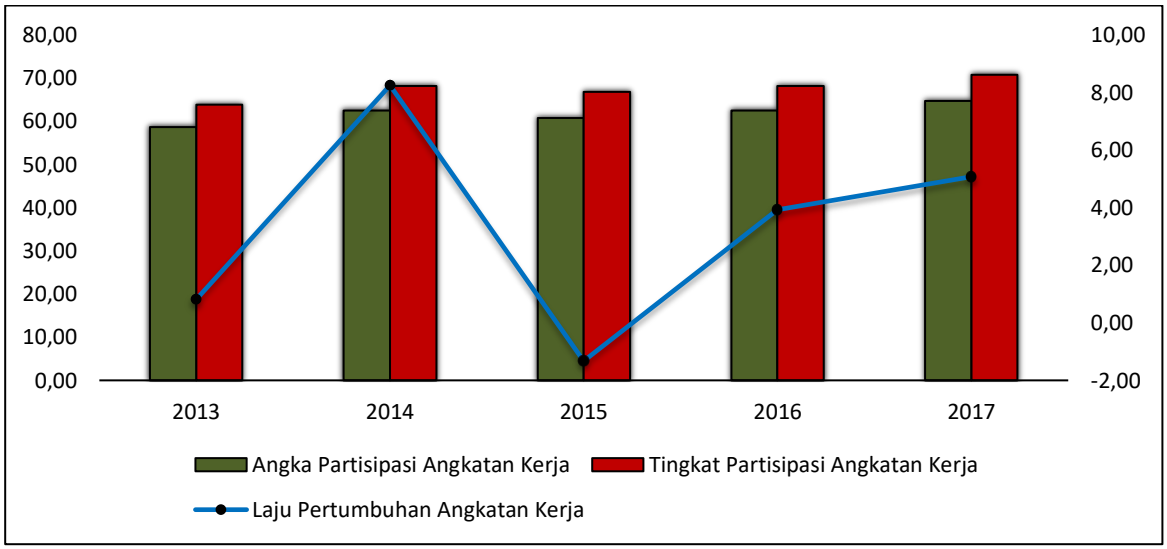

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, & Laju Pertumbuhan Angkatan Kerja Tahun 2013-2017

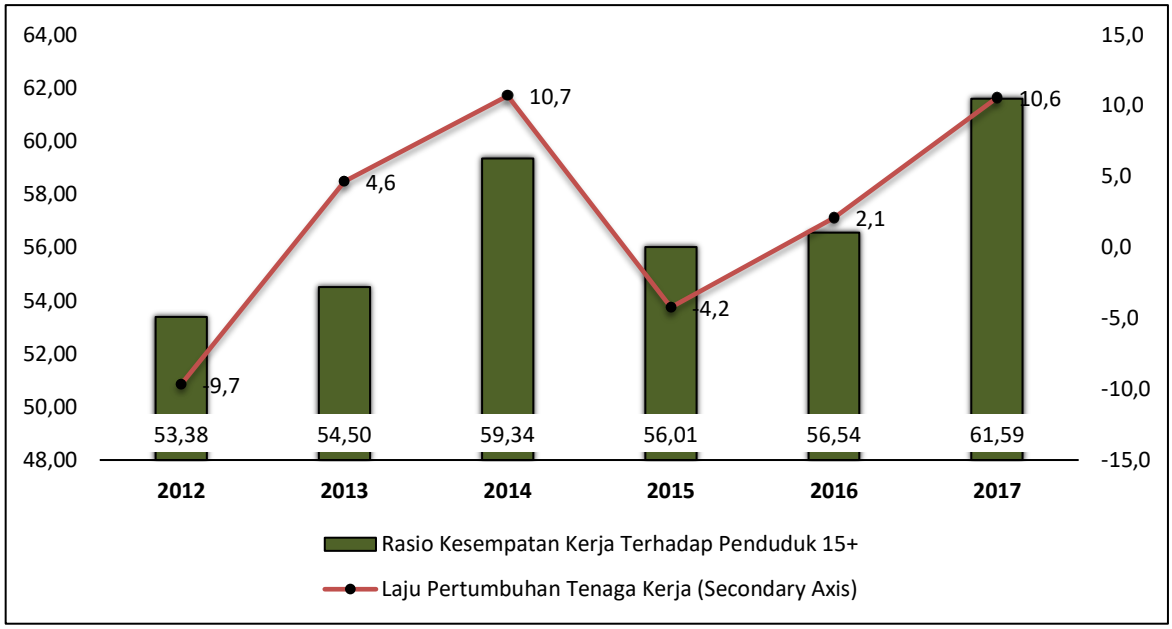

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.9. Rasio Kesempatan Kerja & Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun 2012-2017

Kemiskinan. Tren angka kemiskinan di Kabupaten Luwu sepanjang tahun 2014-2017 tidak banyak mengalami perbaikan. Rasio penduduk miskin pada tahun 2017 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 13,98%. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2016, jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 masih lebih besar jika dibandingka tahun 2014. Sementara itu disisi lain indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan daerah pada tahun 2017 juga semakin meningkat menunjukkan semakin buruknya kualitas penduduk miskin yang ada di Kabupaten Luwu.

Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan Kabupaten Luwu ditengah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik mengindikasikan belum meratanya akses kesempatan dalam berusaha. Ketimpangan akses dalam berusaha dapat disebabkan oleh rendahnya SDM kelompok penduduk tertentu sebagai akibat ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum seperti air bersih, dan sanitasi yang baik. Selain itu, ketimpangan akses dalam berusaha juga dapat disebabkan ketimpangan infrastruktur dan asset produktif seperti tanah dan kredit.

Tabel 2.10.Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Daerah Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Jumlah Penduduk Miskin	48.500	48.640	50.580	49.800	
2	Garis Kemiskinan Daerah (Rupiah Perkapita/Tahun	239.157	252.549	271.804	281.195	

Sumber: Badan Pusat Statistik

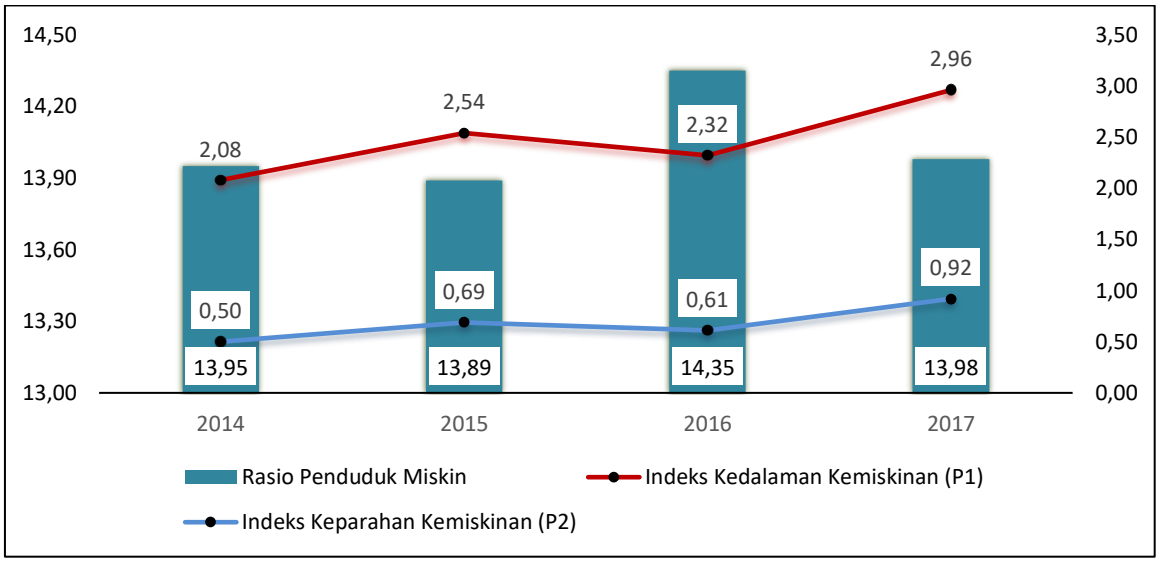

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.10. Perkembangan Rasio Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Analisis capaian kinerja pada aspek pelayanan umum dilakukan pada setiap indikator bidang urusan yang terdapat pada layanan urusan wajib dasar, layanan urusan wajib non dasar, layanan urusan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

1) Pendidikan

Berdasarkan data capaian indikator kinerja, secara umum terdapat peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada angka partisipasi kasar, baik pada tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan capaian dengan tersebut, hal yang sama juga terlihat pada capaian angka partisipasi murni. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pusat maupun daerah yang memberikan bantuan melalui program-program peningkatan kualitas pendidikan, kedepannya hal ini perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya peran pendidikan.

Rasio pebandingan antara tenaga pendidik dengan siswa baik ditingkatan dasar, menengah pertama maupun menengah atas cenderung sudah mendekati tataran yang cukup ideal, meskipun terdapat nilai yang fluktuatif dari perkembangannya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, hal ini sudah menunjukan angka yang baik.

Angka Melek Huruf dari tahun ke tahun cendurung mengalami peningkatan sehingga diharapkan jumlah masyarakat yang buta aksara dapat menurun dan atau bahkan nihil, dimana hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah dibidang pendidikan sudah cukup baik.

Presentase jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 semakin meningkat, namun perlu adanya upaya untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik agar inovasi-inovasi dalam kegiatan belajar mengajar dapat diterapkan sehingga diharapkan semakin meningkatnya antusiasme siswa dalam kegiatan tersebut.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.Capaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**					
1.1.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**					
	Jumlah siswa jenjang TK/ RA/TPA (orang)	4.669	5.383	5.465	6.336	7.484
	Jumlah anak usia 4-6 tahun (orang)	19.643	22.876	22.993	19.254	21.294
	APS PAUD (%)	**23,76**	**23,53**	**23,76**	**32,91**	**35,15**
1.2.	**Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (orang)	50.100	48.224	47.900	46.960	46.287
	Jumlah penduduk kelompok usia7-12 tahun (orang)	47.049	47.131	47.226	47.358	47.451
	APS SD / MI (%)	**106,48**	**102,32**	**101,43**	**99,16**	**97,55**
1.3.	**Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (orang)	23.563	24.257	23.239	23.162	22.883
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.371	23.404	23.647	23.685	23.727
	APS SMP / MTs (%)	**100,82**	**103,64**	**98,27**	**97,79**	**96,44**
1.4.	**Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA (orang)	10.670	11.406	12.370	13.855	15.561
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	APS SMA/SMK/MA (%)	**50,94**	**53,18**	**57,22**	**63,56**	**70,12**
2.	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
2.1.	**SD/MI/Paket A**					
	Jumlah murid SD/MI/Paket A	50.141	48.257	47.964	47.070	46.397
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	47.049	47.131	47.226	47.358	47.451
	APK	**106,57**	**102,39**	**102,39**	**102,39**	**97,78**
2.2.	**SMP/MTs/Paket B**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B (orang)	23.799	24.395	23.521	23.522	23.328
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun (orang)	23.371	23.404	23.647	23.685	23.727
	APK (%)	**101,83**	**104,23**	**99,47**	**99,31**	**98,32**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
2.3.	**SMA/SMK/MA/Paket C**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ Paket C (orang)	10.670	11.406	12.370	13.855	15.561
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun (orang)	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	APK (%)	**55,02**	**54,84**	**58,89**	**67,66**	**74,85**
3.	**Angka Partisipasi Murni (APM)**					
3.1.	**SD/MI/Paket A**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/PAKET A	46.247	45.543	45.522	45.231	45.472
	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun	47.049	47.131	47.226	47.358	47.451
	APM	**98,30**	**96,63**	**96,39**	**95,51**	**95,83**
3.2.	**SMP/MTs/Paket B**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/PAKET B	20.101	18.882	18.918	18.967	19.361
	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun	23.371	23.404	23.647	23.687	23.727
	APM	**86,01**	**80,68**	**80,00**	**80,07**	**81,60**
3.2.	**SMA/SMK/MA/Paket C**					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ PaketC	11.526	11.762	12.733	14.750	15.561
	Jumlah penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	APM SMA/SMK/Paket C	**55,02**	**54,84**	**58,89**	**67,77**	**74,85**
4.	**Angka Kelulusan**					
4.1.	**SD/MI**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	8.187	8.194	8.043	8.235	7.723
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	8.267	8.489	8.398	8.263	7.893
	Angka Kelulusan SD/MI	**99,03**	**96,52**	**95,77**	**99,66**	**97,85**
4.2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.729	6.926	7.345	7.305	7.348
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	7.179	7.231	7.393	7.761	7.670
	Angka Kelulusan SMP/MTs	**93,73**	**95,78**	**99,35**	**94,12**	**95,80**
4.3.	**SMA/SMK/MA**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	3.411	4.370	4.530	4.939	5.173
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya	3.447	4.417	4.639		
	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	**98,96**	**98,94**	**97,65**		
5.	**Angka Melanjutkan (AM)**					
7.1.	SD/MI ke SMP/MTs					
	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	8.187	8.194	8.043	8.235	7.723
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP/ Mts	7.596	7.821	7.711	7.735	7.352
	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	**95,44**	**95,45**	**95,87**	**93,93**	**95,29**
7.2.	**SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**					
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6.729	6.926	7.345	7.305	7.348
	Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	5.734	6.602	6.820	6.905	6.998
	AM SMP/MTs keSMA/SMK/ MA	**85,21**	**95,32**	**92,85**	**94,52**	**95,24**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
6.	**Fasilitas Pendidikan**					
6.1.	SD/MI					
	Jumlah ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik	554	522	574	574	536
	Jumlah seluruh ruang kelas SD/MI	2.093	2.220	2.289	2.293	2.243
	Persentase	**26,47**	**23,51**	**25,08**	**25,03**	**23,90**
6.2.	**SMP/MTs**					
	Jumlah ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik					
	Jumlah seluruh ruang kelas SMP/MTs	838	963	895	900	952
	Persentase					
6.3.	**SMA/SMK/MA**					
	Jumlah ruang kelas SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	369	378	426	451	567
	Jumlah seluruh ruang kelas SMA/ SMK/MA	467	486	621	631	633
	Persentase	**79,01**	**77,78**	**68,60**	**71,47**	**89,57**
7.	**Ketersediaan Sekolah**					
7.1.	**Pendidikan Dasar**					
	Jumlah Sekolah	440	453	454	456	467
	Jumlah penduduk kelompok usia (7 s/d 12 tahun) + (13 sd/ 15 tahun)	70.420	70.702	70.873	71.043	71.178
	Rasio	**62,48**	**64,07**	**64,06**	**64,19**	**65,61**
7.2.	**Pendidikan Menengah**					
	Jumlah Gedung Sekolah	62	64	67	68	68
	Jumlah penduduk kelompok usia (16 - 18 tahun)	20.948	21.448	21.620	21.800	22.191
	Rasio	**29,60**	**29,84**	**30,99**	**31,19**	**30,64**
8.	**Rasio Guru / Murid**					
8.1.	**Pendidikan Dasar**					
	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs	5.837	6.892	6.093	6.115	5.952
	Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	75.357	71.787	72.139	70.122	69.200
	Rasio	**774,58**	**960,06**	**844,62**	**872,05**	**860,12**
8.3.	**Pendidikan Menengah**					
	Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)	1.465	1.487	1.675	1.308	1.330
	Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)	10.670	11.406	12.370	13.855	15.561
	Rasio	**1.373,01**	**1.303,70**	**1.354,08**	**944,06**	**854,70**
9.	**Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)**					
	Jumlah penduduk berusia >15 Tahun melek huruf se Kabupaten Luwu	Na	Na	353.574	348.693	352.059
	Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun	Na	Na	357.920	352.979	356.305
	Persentase	Na	Na	98,78	98,78	98,80
10.	**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**					
	Jumlah guru berijazahberkualifikasi S1 dan D.IV	5.309	5.745	6.440	4.881	5.181
	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	7.415	7.279	7.768	6.115	5.952
	Persentase	**71,60**	**78,93**	**82,90**	**79,82**	**87,05**
11.	**Pendidikan Non Formal**					
	Paket A	41	33	64	40	110
	Paket B	236	138	282	360	445

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Paket C	856	356	363	895	1.050
	Jumlah	**1.133**	**527**	**709**	**1.295**	**1.605**

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Luwu

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda.APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD) 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya. Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah peserta didik PAUD di Kabupaten Luwu berjumlah 4.469 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sebesar 24,76%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 7.484 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sebesar 58,58%. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2014 jumlah peserta didik SD/MI di Kabupaten Luwu berjumlah 50.100 orang atau106,48% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang berjumlah47.049 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peserta didik SD/MI yang memiliki usia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.Pada tahun 2018, jumlah peserta didik SD/MImenjadi 46.287 orang atau 97,55% dari jumlah anak usia 7-12 tahun yang mencapai 47.451 orang.Penurunan angka partisipasi sekolah pendidikan SD/MI disebabkan adanya pembatasan usia masuk sekolah, dimana usia calon siswa yang hendak memasuki pendidikan SD/MI harus mencapai 7 tahun atau lebih. Sedangkan Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2014 jumlah peserta didik berjumlah 23.563 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 100,82%, kemudian pada tahun 2018 peserta didik berjumlah 22.883 orang dengan persentase terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun adalah sebesar 96,44%.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan dasar cederung menurun, sedangkan untuk pendidikan menengah meningkat. Untuk jenjang pendidikan SD/MTs terjadi penurunan drastis dari 106,57 pada tahun 2014 menjadi 97,78 pada tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi penurunan dari 101,83% daya serap partisipasi penduduk yang sedang mengenyam

pendidikan menurun menjadi 98,32%. Sedangkan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dari 55,02% pada tahun 2014 menjadi 74,85% pada tahun 2018.

c) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 APM jenjang pendidikan SDdi Kabupaten Luwu adalah sebesar 98,30% tetapi kemudian menurun menjadi 95,83% di tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar 86,01% di tahun 2014, kemudian menurun menjadi 81,60% di tahun 2018. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah terjadi peningkatan yaitu dari 55,02% pada tahun 2014 menjadi 74,85% pada tahun 2018.

d) Angka Putus Sekolah SD/MI

Angka Putus Sekolah dimaknai sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Diinterprestasikan bahwa semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

e) Angka Kelulusan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD mengalami fluktuasi. Tahun 2014 angka kelulusan jenjang pendidikan SD di Kabupaten Luwu adalah sebesar 99,03% dan menjadi 97,85% di tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 99,36%, tetapi menurun menjadi 95,80% pada tahun 2018. Namun demikian, angka kelulusan pada tahun 2018 ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 93,73%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK/MA menurun dari 98,96% pada tahun 2014 menjadi 97,66% pada tahun 2016.

f) Angka Melanjutkan Sekolah (AM)

AM digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan **Error! Reference source not found.** dapat dilihat bahwa angka m elanjutkan dari jenjang pendidikan SD ke SMP mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yaitu dari 95,44% pada tahun 2014 menjadi 95,29% pada tahun 2018. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP ke SMA cenderung meningkat, yaitu dari 85,21% pada tahun 2014 menjadi 95,24% pada tahun 2018.

g) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel diatas dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu dari 26,47% menjadi 23,90%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat mengalami peningkatan dari 79,01% pada tahun 2014 menjadi 89,57% pada tahun 2018.

h) Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Sebagaimana sajian tabel diatas dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasarsemakin meningkat. Pada tahun 2014 adalah sebesar 62,48 yang berarti bahwa tersedia 62 sampai dengan 63 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini meningkat menjadi 65,61 pada tahun 2018. Untuk jenjang pendidikan menengah juga mengalami peningkatan, dari 29,60 pada tahun 2014 menjadi 30,64 pada tahun 2018.

i) Rasio Guru/Murid

Sebagaimana sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar semakin meningkat, dari 774,58 pada tahun 2014 menjadi 860,12 pada tahun 2018. Ini berarti setiap 10.000 murid pendidikan dasar di Kabupaten Luwu, tersedia sejumlah 860 sampai dengan 861 orang guru. Sedangkan untuk pendidikan menengah mengalami penurunan dari 1.373,01 pada tahun 2014 menjadi 854,70 pada tahun 2018.

j) Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukan trend yang signifikan meningkat tiap tahunnya hingga jika melihat data tabel yang ada di bawah menunjukkan angka

melek huruf sudah hampir mencapai angka 100%. Kenaikan ini disebabkan adanya kebulatan tekad di masing-masing daerah menjadikan program strategis dalam meningkatan Indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu bantuan pendanaan melalui dekonsentrasi memberikan alokasi dana yang signifikan untuk layanan bagi warga masyarakat yang tidak melek huruf setiap tahunnya.

k) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu pada tahun 2016-2018 cenderung stagnan, yaitu hanya meningkat 0,02 poin, dari 98,78 pada tahun 2016 menjadi 98,80 pada tahun 2018. Hal yang perlu ditekankan pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

l) Pendidikn Non Formal

Berdasarkan data pada **Error! Reference source not found.** dapat dilihat bahwa j umlah peserta didik non formal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, yaitu dari 527 orang menjadi 1.605 orang. Peningkatan tertinggi adalah pada Paket C yaitu dari 356 orang pada tahun 2015 menjadi 1.050 orang pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

2) Kesehatan

hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan kesehatan di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Puskesmas dan PuskesmasPembantu**					
	Jumlah Puskesmas	21	22	22	22	22
	Jumlah Puskesmas Pembantu	103	105	105	105	110
	Jumlah seluruh kecamatan	21	22	22	22	22
	Jumlah desa / kelurahan	227	227	227	227	227

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Cakupan Puskesmas	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Cakupan Puskesmas Pembantu	**45,37**	**46,26**	**46,26**	**46,26**	**48,46**
2.	**Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Bayi**					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	60	52	54	75	68
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Angka Kematian Bayi (AKB)	**0,0094**	**0,0079**	**0,0081**	**0,0113**	**0,0107**
	AKHB (1-AKB)	**0,9906**	**0,9921**	**0,9919**	**0,9887**	**0,9893**
3.	**Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	64	56	62	82	69
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Rasio	9,98	8,54	9,39	12,43	10,86
4.	**Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Bulan) pada 1 tahun tertentu.	46	41	40	47	48
	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Rasio	**7,17**	**6,29**	**6,06**	**7,12**	**7,55**
5.	**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup**					
	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Thn	9	11	7	7	6
	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	6.415	6.554	6.603	6.599	6.353
	AKI	**140,30**	**167,80**	**106,01**	**106,08**	**94,40**
6.	**Jumlah Posyandu dan Balita**					
	Jumlah Posyandu	365	365	365	416	418
	Jumlah Balita	21.186	21.186	17.103	18.866	18.522
	Rasio per satuan balita	**0,0172**	**0,0172**	**0,0213**	**0,0221**	**0,0226**
7.	**Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**					
	Jumlah Puskesmas, poliklinik, pustu	209	218	218	218	224
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio per satuan penduduk	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**	**0,0006**
8.	**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk**					
	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	2	2	2
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta	0	0	0	0	0
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	2	2	2

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	**1:347.096**	**1:350.2187**	**1:176.638**	**1:182.652**	**1:179.604**
9.	**Dokter**					
	Jumlah Dokter	35	36	32	47	48
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio per satuan penduduk	**0,0001**	**0,0001**	**0,0001**	**0,0001**	**0,0001**
10.	**Tenaga Medis**					
	Jumlah Tenaga Medis	35	36	32	47	48
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	**0,0001**	**0,0001**	**0,0001**	**0,0001**	**0,0001**
11.	**Komplikasi kebidanan yang ditangani**					
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	793	610	954	1.112	1.048
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama	1.467	1.162	1.451	1.451	1.476
	Cakupan	**54,06**	**52,50**	**65,75**	**76,64**	**71,00**
12.	**Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**					
	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.413	6.585	6.585	6.528	6.326
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	7.002	7.392	6.925	6.925	7.046
	Cakupan	**91,59**	**89,00**	**95,01**	**94,27**	**89,78**
13.	**Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**					
	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	216	225	220	219	199
	Jumlah Desa/Kelurahan	227	227	227	227	227
	Cakupan	**95,15**	**99,12**	**96,92**	**96,48**	**87,67**
14.	**Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**					
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	5	9	13	9	5
	Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	5	9	13	9	5
	Cakupan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15.	**Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak**					
	Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	6.659	6.643	7.047	6.817	6.475
	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	6.366	6.551	6.531	6.272	6.272
	Persentase	**104,6**	**101,4**	**107,9**	**109,0**	**103,2**
16.	**Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani**					
	Jumlah penderita Pneumonia balita	183	102	101	121	116

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	183	102	101	121	116
	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wailayah kerja pada kurun waktu yang sama.	1.110	1.091	1.092	1.166	1.104
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100,00**
17.	**Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**					
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	317	286	324	320	300
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	494	533	537	602	690
	Cakupan	**64,17**	**53,66**	**60,34**	**53,16**	**43,48**
18.	**Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**					
	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	370	489	489	592	637
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	**0,11**	**0,14**	**0,14**	**0,17**	**0,18**
19.	**Tingkat kematian karena tuberkulosis(per 100.000 penduduk)**					
	Jumlah pasien TB yang meninggal	11	8	29	19	n.a.
	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	**0,003**	**0,002**	**0,008**	**0,005**	**n.a**
20.	**Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**					
	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	370	488	489	592	637
	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	494	533	537	602	690
	Persentase	**58,20**	**74,90**	**91,56**	**91,06**	**98,34**
21.	**Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**					
	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	190	198	208	206	232
	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	238	325	287	324	334
	Persentase	**79,83**	**60,92**	**72,47**	**63,58**	**69,46**
22.	**Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**					
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	30	41	60	67	14
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	30	41	60	67	14
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
23.	**Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida**					

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Banyaknya balita yang pada malam sebelum survey tidur menggunakan kelambu	262	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu	Tidak ada pembagian kelambu
	Jumlah balita	35.198				
	Persentase Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	**0,74**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
24.	**Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi**					
	Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	10	10	5	31	19
	Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	**0,003**	**0,003**	**0,001**	**0,009**	**0,005**
25.	**Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**					
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	121.491	129.275	123.085	119.972	127.985
	Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	158.789	166.575	153.088	184.734	188.121
	Cakupan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	**Cakupan kunjungan bayi**					
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standardi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.243	6.452	7.393	6.355	6.776
	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	6.415	6.554	6.603	6.599	6.355
	Cakupan	**97,32**	**98,44**	**111,96**	**96,30**	**106,62**
27.	**Kunjungan Ibu hamil K4**					
	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	6.259	6.564	6.457	6.412	6.270
	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	7.335	7.744	7.254	7.254	7.380
	Cakupan	**85,33**	**84,76**	**89,01**	**88,39**	**84,96**
28.	**Pelayanan nifas**					
	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.279	6.368	6.480	6.482	6.336
	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7.002	7.392	6.925	6.925	7.046
	Cakupan	**89,67**	**86,15**	**93,57**	**93,60**	**89,92**
29.	**Neonatus dengan komplikasi yang ditangani**					
	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	237	171	389	534	586
	Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	1.000	1.408	989	989	1.006
	Cakupan	**23,70**	**12,14**	**39,33**	**53,99**	**58,25**
30.	**Pelayanan anak balita**					

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	9.498	12.482	16.786	18.881	20.457
	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	29.306	28.809	28.809	30.754	29.132
	Cakupan	32,41	43,33	58,27	61,39	70,22
31.	**Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat**					
	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	9.411		5.759	6.910	6.508
	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	8.054		5.759	7.378	7.248
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	116,85		100,0	93,66	89,79
32.	**Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi< 24 Jam**					
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	6	6	4	3	3
	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	4	4	3	3	3
	Persentase	66,7	66,7	75,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2019

a) Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan sehingga telah memenuhi PMK. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan puskesmas. Cakupan puskesmas di Kabupaten Luwu telah mencapai 100% artinya bahwa jumla puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu telah sama banyak atau telah mengcover semua jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu, kedepannya pemerintah akan lebih meningkatkan lagi kualitas sarana prasarana dan pelayanan puskesmas di Kabupaten Luwu sehingga bukan hanya cukup dari segi kuantitas namun juga cukup dari segi kualitas.

b) Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran Bayi

Dapat disimpulkan bahwa keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu sebab angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2014 adalah sebesar 99,06%, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi sebesar

99,21%, tahun 2016 menurun menjadi 99,19,% tahun 2017 menurun lagi menjadi sebesar 98,87% dan tahun 2018 meningkat lagi menjadi sebesar 98,93%.Walaupun keselamatan kelahiran bayi telah sangat baik di Kabupaten Luwu tetapi terjadi fluktuasi angka kelangsungan hidup bayi dengan kecenderungan menurun.Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan kelahiran hingga di masa yang akan datang diharapkan angka kelangsungan hidup bayi dapat mencapai angka 100%

c) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Kasus kematian Balita dari tahun 2014 sampai 2018 di Kabupaten Luwu berfluktuasi. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phemonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit. Pada tahun 2014 angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup dengan angka rasio sebesar 9,98, selanjutnya naik menjadi 12,43 pada tahun 2017 dan kemudian turun menjadi 10,86 pada tahun 2018.

d) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian neonatal dari tahun 2014 hingga 2018 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Cakupan Kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Dapat dilihat terjadi pada tahun 2014-2016 terjadi penurunan rasio angka kematian neonatal dengan angka berturut-turut yakni 7,17, 6,29, dan 6,06, kemudian meningkat di tahun 2017 dan 2018 dengan masing-masing angka rasio yakni 7,12 dan 7,56.

e) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global.AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu.Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 167,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah 140,3 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2016 meningkat menjadi 167,8, kemudian menurun menjadi 106,02 pada tahun 2016, selanjutnya jumlah kematian ibu menurun menjadi 94,40per 100.000 pada tahun 2018.

f) Jumlah Posyandu dan Balita

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah. Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2014 jumlah posyandu sebanyak 365 unit, meningkat menjadi 418 unit pada tahun 2018. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2014 sebanyak 21.186 jiwa, menurun pada tahun 2018 sebanyak 18.522 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2014 adalah 0,172 dan meningkat menjadi 0,0226 per 1000 balita pada tahun 2018.

g) Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu

Dapat dilihat bahwa jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdiri Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan.Pada tahun 2014 jumlah sarana pelayanan kesehatan di daerah iniadalah 209 dan meningkat menjadi 224 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan tersebut tidak menyebabkan meningkatnya rasio per satuan penduduk yang stagnan pada angka 0,00006.

h) Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk

Dapat diketahui bahwa semenjak bertambahnya jumlah Rumah Sakit di tahun 2016 rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari sebelumnya 1 unit Rumah Sakit harus melayani hingga 300.000 lebih penduduk pada tahun 2016 menjadi 1 rumah sakit melayani sekitar 150.000 lebih penduduk. Disamping jumlah, mutu layanan merupakan hal yang penting juga untuk diperhatikan pada masa-mada mendatang.

i) Dokter

Dapat diketahui bahwa rasio dokter terhadap jumlah penduduk stagnan pada angka 0,0001, tetapi apabilia dilihat dari perbandingan antara dokter dan penduduk terdapat peningkatan dari sebelumnya di tahun 2014 setiap dokter harus melayani sebanyak 9.915 penduduk menjadi sebanyak 7.483 penduduk di tahun 2018.

j) Tenaga Medis

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit.Khsusunya untuk pemenuhan tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan, ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang jumlahnya masih sangat kurang seperti tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis).Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan rawan bencana serta daerah bermasalah kesehatan lainnya. umlah tenaga medis di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 35 orang dan pada tahun 2018 menjadi 48 orang. Jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami fluktuasi.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan kabupaten/kota adalah Sumber Daya Air (SDA), air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang.

Layanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13.Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Sumber Daya Air (SDA)**					
1.1.	**Irigasi kabupaten dalam kondisi baik**					
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1.358	1.618	2.268	2.797	3.225
	Luas irigasi kabupaten (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Persentase (%)	**15,25**	**18,17**	**25,47**	**31,41**	**36,33**
1.2.	**Rasio Jaringan Irigasi**					
	Jaringan primer	1.250	1.750	5.000	4.435	5.337
	Jaringan Sekunder	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Jaringan Tersier	NA	NA	NA	NA	NA
	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	NA	NA	NA	NA	NA
	Luas lahan budidaya	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio Jaringan Irigasi	**14,04%**	**19,65%**	**56,15%**	**49,81%**	**59,94%**
2.	**Air Minum**					
2.1	**Penduduk berakses Air Minum**					
	Penduduk berakses air minum	68.759	140.087	166.040	249.415	287.367
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Persentase	**19,81**	**40,00**	**47,00**	**70,00**	**80,00**
2.2	**Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan**					
	Jumlah pendudukdengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	154.710	141.883	147.337	140.463	169.601
	Persentase	**44,57**	**40,51**	**41,71**	**39,42**	**47,22**
3.	**Air Limbah**					
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	40,12	71,00	76,00	75,45	
4.	**Jalan**					
4.1.	**Panjang Jalan di Kabupaten Luwu**					
	Jalan kabupaten (Km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Jalan Propinsi (Km)	32	32	32	32	79
	Jalan Nasional (Km)	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
	Total Panjang Jalan (Km)	**2.196,95**	**2.289,57**	**2.460,46**	**2.591,52**	**2.735,89**
4.2.	**Jalan Kabupaten Menurut Kondisi**					
	Kondisi Baik	330,91	385,5	424,81	533,48	538,02
	Kondisi Sedang	463,65	512,25	480,41	50,75	73,42
	Kondisi Rusak Ringan	545,5	570,4	614,95	1.048,68	1.063,09
	Kondisi Rusak Berat	709,39	673,92	792,79	811,11	866,86

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Rasio panjang jalan kondisi baik	**0,15**	**0,17**	**0,17**	**0,21**	**0,21**
	Panjang jalan kondisi mantap (km)	794,56	897,75	905,22	584,23	611,44
	Panjang jalan seluruhnya (km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	**0,36**	**0,39**	**0,37**	**0,23**	**0,24**
4.3.	**Panjang jalan dengan jumlah penduduk**					
	Jumlah panjang jalan (km)	2,049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	0,00591	0,00612	0,00655	0,00686	0,00707
4.4.	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	330,91	385,5	424,81	533,48	538,02
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Persentase	**16,15**	**18,00**	**18,37**	**21,83**	**21,17**
4.5.	**Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)**					
	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km)	NA	NA	NA	1.380	1.380
	Persentase	**-**	**-**	**-**	**56,46**	**54,30**
5.	**Penataan Ruang**					
5.1	**Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah**					
	Luas ruang terbuka hijau (ha)	NA	1,00	1,00	9,15	10,20
	Luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	NA	4,15	6,20
	Rasio	**NA**	**NA**	**NA**	**13,30**	**16,40**
5.2	**Bangunan ber- IMB per satuan bangunan**					
	Jumlah bangunan ber – IMB	75,02	90,00	91,00	93,00	93,00
	Jumlah bangunan	NA	NA	NA	NA	NA
	Rasio	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

a) Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Luas irigasi Kabupaten Luwu Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami penambahan luas 8,904 sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik dari selama periode tahun 2014-2018secara terus menerus mengalami peningkatan.Pada tahun 2014, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 1.358 Ha atau 15,25%, meningkat menjadi 3.225 Ha atau 36,33% pada tahun 2018.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target "*overstock pangan*" dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan primer mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang signifikan, dari 1.250 km pada tahun 2014 menjadi 5.337 km pada tahun 2018. Sedangkan jaringan sekunder tidak mengalami penambahan.

b) Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum.Pada tahun 2014, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 19,81%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 80,00% pada tahun 2018.

Jumlah pendudukdengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2014adalah 154.710 jiwa, tetapi kemudian menurun menjadi 169.601 jiwa pada tahun 2018. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, meskipun mengalami fluktuasi tetapi secara keseluruhan kondisi pada tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2014 yaitu dari 44,57% menjadi 47,22%.

c) Air Limbah

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Oleh karena itu, air limbah harus dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau *septic tank*. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan berbagai kotoran seperti feses maupun urin. Untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat air limbah khususnya diperkotaan, pemerintah Kabupaten Luwu melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi setiap rumah tangga. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah sebesar 40,12%, kemudian mengalami peningkatan secara terus menerus hingga mencapai 75,45% pada tahun 2017.

d) Jalan

Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Jalan raya yang melintas di wilayah Luwu pada tahun 2018 adalah 2.735,89 Km,

yang terdiri dari jalan negara 115,50 Km, jalan provinsi sepanjang 79 Km dan jalan kabupaten 2.541,39 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2018, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 538,02Km atau 21,17% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi sedang adalah 73,42Km atau 2,89%, rusak ringan sepanjang 1.063.09,21Km atau 41,83%, dan kondisi rusak berat sepanjang 866,86 km atau 34,11%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 16,15%, keadaan pada tahun 2018 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Namun tidak demikian halnya dengan proporsi jalan dalam kondisi mantab, yang justru mengalami penurunan dari 0,36 menjadi 0,24.

e) Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Jumlah jembatan di Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sejumlah 13 buah, tahun 2016 bertambah 7 buah dan tahun 2017 bertambah lagi 8 buah sehingga secara keseluruhan berjumlah 28 buah.

f) Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 telah meningkat secara signifikan dari 1,00 Ha menjadi 10,20 Ha. Rasio Bangunan ber-IMB persatuan Bangunan juga mengalami pertumbuhan dari 75,02% pada tahun 2014 menjadi 93,00 pada tahun 2018. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupa semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perumahan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Layanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.Capaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Rumah Layak Huni**					
	Jumlah rumah layak huni	NA	67.773	68.313	69,313	72,868
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	**NA**	**0,196**	**0,196**	**0,196**	**0,204**
2.	**Permukiman Layak Huni**					
	Luas pemukiman layak huni (ha)	7.119,95	7.119,55	7.119,95	7.119,55	7.030,64
	Luas wilayah permukiman (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Rasio	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97
3.	**Permukiman yang Tertata**					
	Luas area permukiman tertata (ha)	NA	NA	NA	0,3	2,57
	Luas area permukiman keseluruhan (ha)	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
	Persentase	NA	NA	NA	0,000046	0,000359
4.	**Lingkungan Pemukiman Kumuh**					
	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)	117,45	117,45	117,45	117,45	206,36
	Luas wilayah (ha)	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25	3000,25
	Persentase	0,0391	0,0391	0,0391	0,0391	0,0688
5.	**Luasan permukiman kumuh di perkotaan**					
	Luasan pemukiman kumuh kota yang tertangani (Ha)	NA	8	8	8	
	Luas pemukiman kumuh Kota (Ha)	NA	117,45	117,45	117,45	
	Persentase	**NA**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	
6.	**Rumah tangga kumuh perkotaan**					
	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	NA	NA	NA	1.328	1.339
	Jumlah seluruh rumah	NA	117,45	117,45	80.663	83.511
	Proporsi	**NA**	**NA**	**NA**	**0,0164**	**0,0164**

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman

a) Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga yang layak huni menempati rumah layak huni sebanyak 69.313 RT. Adapun pada tahun 2018, 72,868 RT tergolong layak huni.Terjadinya penurunan rasio rumah layak huni disebabkan peningkatan jumlah rumah layak huni tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Walau pun yang mendapat penanganan rumah yang luasnya <45 m2, semakin bertambah menjadi rumah layak huni, namun rasio rumah layak huni mengalami peningkatan yang sejak tahun 2017 dengan rasio 0,196 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 0.204. Masih

besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan dan tidak adanya kesediaan data terkait jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu.

b) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun pertama ke tahun mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni pada tahun 2014 menjadi 0,98%. Sedangkan Tahun 2018 menjadi 0,97% Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman tidak seiring dengan peningkatan kualitas rumah layak huni. Perbandingan Permukiman Layak Huni dengan Luas wilayah Permukiman tidak sebanding dengan rasio permukiman layak huni.

c) Rasio Permukiman yang Tertata

Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2018, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 2,57 Ha dari 7.237

d) Lingkungan Permukiman Kumuh dan Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2014-2018 belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan data pada **Error! Reference source not found.** dapat dilihat bahwa luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 adalah 206,38 Ha, meningkat dari kondisi pada tahun 2014 yaitu seluas 117,75 Ha. Luasan pemukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan tahun 2015 8 ha dan tahun 2017 menjadi 8 ha begitupun dengan Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan juga tidak mengalami peningkatan.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaanpembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertibanmasyarakat sangat berkaitan erat denganaspeksosial, politik, dan hukum.

Layanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Satuan Polisi Pamong Paja serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**					
	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat				1.850	
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio				**0,52**	
2.	**Penegakan PERDA**					
	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA					
	Jumlah Pelanggaran PERDA	0,46	0,56	0,67	0,71	
	Persentase					
3.	**Pelayanan Bencana Kebakaran**					
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	3	3	4	4	6
	Jumlah Personil Pemadam Kebakaran	98	98	98	98	98
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Cakupan	**0,000864**	**0,000857**	**0,001132**	**0,001122**	**0,001669**
4.	**Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**					
	Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan)	30	30	30	30	30
	Jumlah Kejadian Kebakaran	20	30	8	13	16
	Tingkat waktu tanggap (menit)	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; Dinas Satuan Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masih cukup baik. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa tingkat waktu tanggap (*response time*) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah memenuhi standar mutu pekayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 yakni dengan waktu tanggap sebanyak 15 menit, hal ini menggambarkan manajemen penanggulangan kebakaran di Kabupaten Luwu sudah cukup baik.

6) Sosial

Pelayanan dan pemberdayaan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Layanan urusan sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16.Capaian Indikator Kinerja Bidang Sosial

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Pelayanan Sosial**					
	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehab) yang terbina	9	8	10	9	
	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	-	-	40,00	-	
	Persentase Penyandang Cacat Fisik, Mental dan Lanjut Usia yang menerima Jaminan Sosial	66,00	66,00	66,00	57,00	57,00
	Jumlah Kejadian Bencana (kali)	11	10	12	17	
	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Korban Bencana selama masa tanggap darurat (jiwa)	3	-	-	5	
	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	11,00	-	-	22,00	
	Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat	6	6	10	10	10
2.	**Bantuan Sosial**					
	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	3.442	4.684	9.936	23.771	40.514
	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	4.684	9.253	10.000	198.922	206.215
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	**73,48**	**50,62**	**99,36**	**11,95**	**19,65**
3.	**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**					
	Jumlah PMKS yang tertangani	26.591	562	8	6.376	40.529
	Jumlah PMKS yang ada	31.550	18.278	17.632	22.220	206.215
	Persentase	**84,28%**	**3,07%**	**0,04%**	**28,69%**	**19,65%**
4.	**PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**					
	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	100	149	250	270	23.620
	Jumlah PMKS dalam 1 tahunyang seharusnya memperolah bantuan sosial	4.684	9.253	10.000	198.922	206.215
	Persentase	**2,13**	**1,61**	**2,50**	**0,14**	**11,45**
5.	**Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosialmelalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis Lainnya**					
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	200	2.165	875	1.160	300
	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi	2.000	2.500	1.000	50.413	50.413

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis					
	Persentase	**10**	**86,6**	**87,5**	**2,30**	**0,60**
6.	**Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial**					
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	8	8
	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	8	8	8	8	8
	Persentase	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.	**Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial**					
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos	0	0	0	0	0
	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala	0	0	0	0	0
	Persentase					
8.	**Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**					
	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	79	480	1.318	978	186
	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	79	480	1.318	978	186
	Persentase	100	100	100	100	100
9.	**Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap**					
	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	25	148	396	197	6
	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	79	480	1.318	978	186
	Persentase	31,65	30,83	30,04	20,14	3,23
10.	**Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**					
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	100	100	150	150	150

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	228	228	228	228	228
	Persentase	**43,86**	**43,86**	**65,79**	**65,79**	**65,79**

Sumber: Dinas Sosial

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Luwu melonjak tajam sejak tahun 2017. Hal ini diakibatkan adanya perubahan format dalam penentuan warga masyarakat sebagai PMKS. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengupayakan penyesuaian data, agar dapat dilakukan penanganan PMKS sebagaimana mestinya. Berdasarkan data diatas, maka disimpulkan yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya, diantaranya:

a. Masih tingginya jumlah PMKS
b. Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial
c. Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja

Sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas, pemerintah Kabupaten Luwu secara terus-menerus melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai data tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu telah diuraikan pada bagian terdahulu. Sedangkan data terkait dengan:

a. Sengketa pengusaha-pekerja per tahun
b. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
c. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
d. Keselamatan dan perlindungan
e. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
f. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
g. Besaran Pemeriksaan Perusahaan
h. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
i. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
j. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
k. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
l. Rasio lulusan S1/S2/S3

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

. Meningkatkan ketahanan keluarga dan penegakan hukum terkait ketentuan persyaratan pernikahaan mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintah daerah yang*family friendly*dan responsif gender, khususnya untuk memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berperan dalam pembangunan bangsa, baik secara sosial, budaya, dan politik. Sedangkan pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin

Layanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.Capaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**					
	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah				3.821	4.143
	Jumlah Pekerja Perempuan				113.419	187.605
	Persentase				**3,37**	**2,21**
2.	**Kursi yang di Duduki Perempuan di DPR**					
	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	3	3
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35	35	35
	Proporsi	**8,57%**	**8,57%**	**8,57%**	**8,57%**	**8,57%**
3.	**Partisipasi perempuan di lembaga swasta**					
	Pekerja perempuan di lembaga swasta					
	Jumlah pekerja perempuan				113.419	187.605
	Persentase	10,66	12,22	10,2	4,74	
4.	**Rasio KDRT**					
	Rasio KDRT	0,001	0,001	0,009%	0,001	
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100	100	100	100	
	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak			1	44	
	Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	110	92	10	15	
5.	**Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**					
	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu				12	30

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu				12	30
	Cakupan (%)				**100**	**100**
6.	**Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**					
	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak					8
	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan					8
	Cakupan (%)					100
7.	**Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**					
	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum				8	17
	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum				25	31
	Cakupan (%)				**32,00**	**54,84**
8.	**Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**					
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan				1	3
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT				33	48
	Cakupan (%)				**3,03**	**6,25**
9.	**Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**					
	Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya					3
	Jumlah korban yang membutuhkan rentegrasi sosial					3
	Cakupan (%)					100
10.	**APM perempuan/laki-laki di SD**					
	APM-SD Perempuan					23.033
	APM-SD Laki Laki					23.584
	Rasio					**97,66**
11.	**Perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian**					
	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor pertanian					138
	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian					76
	Kontribusi (%)					35,51
12.	**Indeks Pembangunan Gender**	91,88	91,89		92,52	
13.	**Indeks Pemberdayaan Gender**	60,72	62,47		61,61	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum pemberdayaan perempuan di Kabupaten Luwu masih perlu terus ditingkatkan, mengingat IPG dan IDG daerah ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat diharapkan meningkatkan perannya masing-masing.

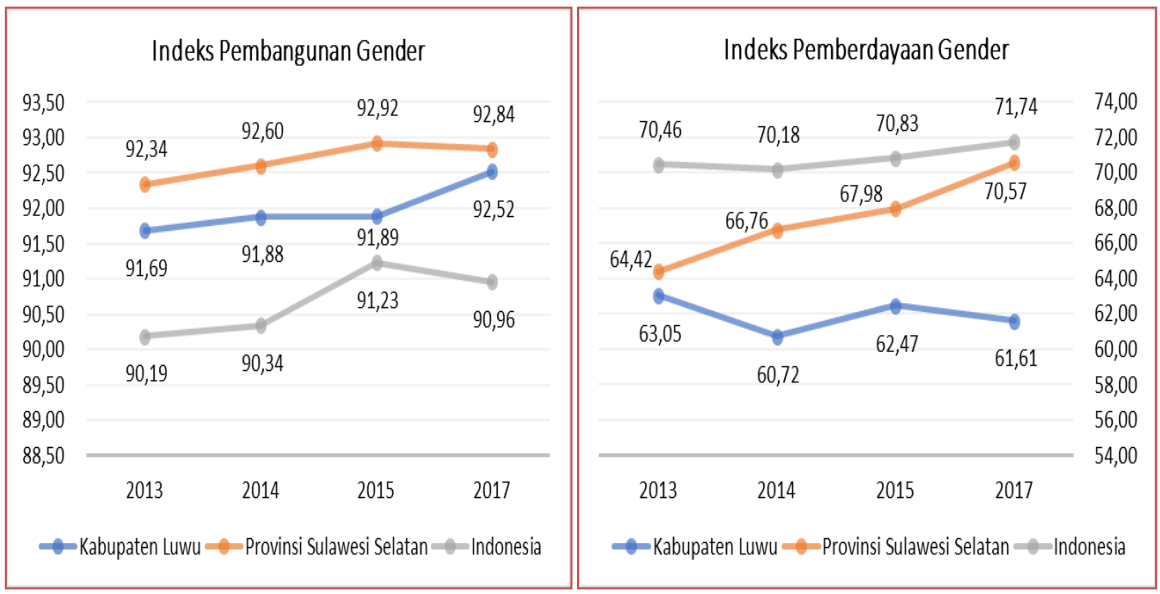

Sumber: Data diolah, BPS, Tahun 2018 (data Tahun 2016 tidak tersedia)

3) Pangan

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Layanan urusan pangan menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18.Capaian Indikator Bidang Urusan Pangan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Cakupan Desa Mandiri Pangan**	**-**	**70,93**	**71,81**	**73,57**	**73,57**
2.	**Ketersediaan pangan utama**					
	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	229.845.229	208.905.465	218.867.796	212.930.862	223.291.313
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Ketersediaan pangan utama	66.219	59.650	61.954	59.761	62.162
3.	**Ketersediaan energi dan protein perkapita**					
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	68	68	69	69	69
	Ketersediaan energi (ka/kapita/hari)	3.279	3.306	3.327	3.322	3.294
4.	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**					
	Pencapaian skor pola pangan harapan	-	85,2	87,4	87.8	86,3

	Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (persen)	100	100	100	100	100
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	19.00	26.66	32,00	44.68	44,68

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan Rendahnya ketersediaan pangan pada beberapa komoditi pangan. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

a. Masih tingginya tingkat ketergantungan energi dan protein (79.80 Kg/kapita/tahun);
b. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang ;
c. Inflasi bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim); dan
d. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

4) Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau buktikepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Luwuselaluberusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hakatas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namunkemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lainyang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau buktikepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannyayang terbatas. Layanan urusan pertanahan menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19.Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Luas lahan bersertifikat**					
	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	6	Na	4	11	26
	Jumlah Luas Wilayah (ha)	76.476	-	15.666	13303	144.864
	Persentase	**0,0078**	**-**	**0,0255**	**0,0827**	**0,0179**
2.	**Penyelesaian Kasus Tanah Negara**					
	Jumlah Kasus yang diselesaikan	Na	Na	1	1	3
	Jumlah kasus yang terdaftar		4	2	3	3
	Penyelesaian kasus tanah Negara			50,00	33,33	100,00
3.	**Penyelesaian izin lokasi**					
	Jumlah Ijin Lokasi	11	7	3	4	6
	Permohonan Ijin Lokasi	11	7	3	4	6
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Dinas Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahanbersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan.Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui

tertib administrasisebagai kepastian dalam kepemilikan. Data di atas menunjukkan bahwa luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Luwu masih sangat rendah.

5) Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakanberdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutandan berwawasan lingkungan. Layanan urusan lingkungan hidup menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota				Ada	Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rensana Pembangunan kab/Kota				Ada	Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah bupaten/kota				Ada	Ada
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Na	Na	Na	26,5	-
5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	-	94	87	90	89
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Na	Na	Na	Na	Na
6.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten					
	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani	21	8	10	41	40
	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	21	1	36	57	102
	Persentase	**100,00**		**27,78**	**71,93**	**39,22**
7.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat					
	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten	-	-	-	2	-
8.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup					
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	1	Ada	-
9.	**Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten**					
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	-	-		1	2

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	-	-		1	2
	Persentase	**Na**	**Na**	**Na**	**100,00**	**100,00**
10.	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani	75,01	76,03	80,50	83,75	
11.	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R	24,99	23,70	19,50	16,27	
12.	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	75,01	76,03	80,50	83,75	
13.	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (%)	75,01	76,03	80,50	83,75	
14.	Nilai Operasionalisasi TPA/TPST/SPA	65,00	67,00	71,00	83,00	
15.	Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan	Tidak ada izin yang dikeluarkan sehubungan belum ada pihak swasta yang kerjasama dengan Pemkab mengenai pengelohan sampah				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan utama Kabupaten Luwu di bidang lingkungan adalah penanganan sampah dan pengawasan terhadap perizinan yang terkait dengan PPLH dan PUU LH.Berbagai indikator yang terkait dengan penanganan sampah sebagaimana terlihat pada tabel di atas rata-rata masih di bawah 84%, sedangkan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten masih sebesar 39,22% dari izin yang ada.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.Layanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.Capaian Indikator Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Penduduk ber-KTP**					
	Jumlah penduduk yang ber-KTP	179.770	165.466	203.081	211.958	229.974
	Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah	247.063	247.420	252.943	256.791	261.879

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Rasio	**0,73**	**0,67**	**0,80**	**0,83**	**0,88**
2.	**Penduduk ber-KK**					
	Jumlah penduduk ber-KK	86.895	91.735	90.604	92.364	92.997
	Jumlah penduduk yang telah menikah	147.111	148.336	146.284	148.346	150.482
	Rasio	**0,59**	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**
3.	**Bayi ber-Akte Kelahiran**					
	Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran	3.585	4.326	4.234	4.576	5.851
	Jumlah bayi	5.325	6.964	6.979	6.390	7.196
	Rasio	**0,67**	**0,62**	**0,61**	**0,72**	**0,81**
4.	**Pasangan ber-Akte Nikah**					
	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah	13.632	14.186	15.768	18.073	22.402
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	144.290	151.076	152.452	154.871	153.080
	Rasio	**0,09**	**0,09**	**0,10**	**0,12**	**0,15**
5.	**Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**	**Ada**
6.	**Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**	**Sudah**
7.	**PenerbitanKartu Tanda Penduduk(KTP)**					
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	179.770	165.466	203.081	211.958	229.974
	Jumlah penduduk wajib KTP	247.063	247.420	252.943	256.791	261.879
	Cakupan	**72,76**	**66,88**	**80,29**	**82,54**	**87,82**
8.	**Penerbitan Akte Kelahiran**					
	jumlah penduduk lahir dan memperolehakta kelahiran di tahun bersangkutan	3.585	4.326	4.234	4.576	5.851
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	5.325	6.964	6.979	6.390	7.196
	Cakupan	**67,32**	**62,12**	**60,67**	**71,61**	**81,31**

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Dari berbagai data yang tersaji pada tabel di atas, terlihat bahwa hanya rasio Pasangan ber-Akte Nikah yang masih rendah, yaitu 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus akte pernikahannya masih perlu terus diupayakan untuk ditingkatkan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Layanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22.Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Sarana prasaran perkantoran pemerintahan desa yang baik**					
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	195	195	198	198	198
	Jumlah seluruh pemerintahan desa	207	207	207	207	207
	Cakupan	94,20	94,20	95,65	95,65	95,65
2.	**Kelompok Binaan LPM**					
	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Na	Na	Na	Na	Na
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Rata-rata	-	-	-	-	-
3.	**Kelompok Binaan PKK**					
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	Na	Na	Na	Na	Na
	Jumlah PKK	229	229	229	229	229
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	-
4.	**LSM Aktif**					
	Jumlah LSM aktif	1	1	9	12	12
	Jumlah LSM	48	48	56	59	59
	Persentase	2,08	2,08	16,07	20,34	20,34
5.	**LPM Berprestasi**					
	Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
	Jumlah LPM	207	207	207	207	207
	Persentase	0	0	0	0	0
6.	**PKK Aktif**					
	Jumlah PKK aktif	229	229	229	229	229
	Jumlah PKK	229	229	229	229	229
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
7.	**PKK Aktif**					
	Jumlah posyandu aktif	Na	417	417	417	417
	Jumlah posyandu	Na	417	417	417	417
	Persentase posyandu aktif	Na	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Jumlah LSM aktif di perdesaan pada tahun 2018 baru mencapai 20,34%. Hal ini menyebabkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk perdesaan kurang berhasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, dengan antara lain menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana.Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23.Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0,96**	**0,90**	**0,87**	**0,86**	**0,82**
2.	**Total Fretility Rate (TFR)**	**2,61**	**2,67**	**2,83**	**2,86**	**2,96**
3.	**Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk Penduduk**					
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			3	3	3
	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0
	Jumlah semua perangkat daerah	33	33	34	34	34
	Jumlah sektor yang menyepakati pemanfaatan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4
	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan Informasi yang melakukan pendidikan kependudukan	3	3	3	3	3
	Jumlah Kampung KB	-	-	1	23	59
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	**-**	**-**	**8,82**	**8,82**	**8,82**
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan induk pengendalian Penduduk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**3,0**	**2,9**	**2,8**	**2,7**	**2,4**
5.	**Akseptor KB**					
	Jumlah Akseptor KB	47.284	42.401	42.615	38.615	38.755
	Jumlah Pasangan Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Ratio	**88,72**	**82,85**	**84,11**	**76,13**	**76,22**
6.	**Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**					
	Jumlah Peserta KB Aktif	35.164	34.560	32.415	32.575	33.029
	Jumlah Pasangan Usia Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Angka (%)	**65,98**	**67,53**	**63,98**	**64,22**	**64,96**
7.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**					

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibaah 20 tahun	2.949	1.158	1.000	609	500
	Jumlah Pasangan Usia Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Cakupan	**5,53**	**2,26**	**1,97**	**1,20**	**0,98**
8.	**Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.321	6.583	7.096	7.882	7.624
	Jumlah Pasangan Usia Subur	53.293	51.175	50.666	50.721	50.849
	Cakupan	**11,86**	**12,86**	**14,01**	**15,54**	**14,99**
9.	**Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**					
	Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	6.829	7.390	7.301	7.840	8.564
	Jumlah Akseptor KB	47.284	42.401	42.615	38.615	38.755
	Persentase	**14,44**	**17,43**	**17,13**	**20,30**	**22,10**
10.	**Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**					
	Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi	35.164	34.560	32.415	32.575	33.029
	Jumlah Akspetor KB	47.284	42.401	42.615	38.615	38.755
	Persentase	**74,37**	**81,51**	**76,06**	**84,36**	**85,23**
11.	**Anggota Bina Keluarga Balita**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	2.321	3.051	4.556	4.438	4.015
	Jmlah Anggota Kelompok BKB	3.275	4.896	8.134	7.672	6.455
	Cakupan	**70,87**	**62,32**	**56,01**	**57,85**	**62,20**
12.	**Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	461	771	2.144	2.217	1.947
	Jmlah Anggota Kelompok BKR	1.961	2.875	4.429	4.358	3.785
	Cakupan	**23,51**	**26,82**	**48,41**	**50,87**	**51,44**
13.	**Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	258	469	1.792	1.746	1.271
	Jmlah Anggota Kelompok BKL	1.679	2.962	4.246	4.175	3.567
	Cakupan (%)	**15,37**	**15,83**	**42,20**	**41,82**	**35,63**
14.	**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	2
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**9,09**
15.	**Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**					
	Jumlah PIK R/M	25	25	25	25	34
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	**113,64**	**113,64**	**113,64**	**113,64**	**154,55**
16.	**PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	37	49	48	47	47
	Jumlah PKB/PLKB	37	49	48	47	47
	Cakupan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
17.	**PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS					
	Cakupan					
18.	**Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**					
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	227	227	227	227	227
	Jumlah desa/kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
19.	**Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	21.750	21.713	33.707	36.500	32.676
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	21.500	20.650	30.643	31.577	26.095
	Cakupan	**101,16**	**105,15**	**110,00**	**115,59**	**125,22**
20.	**Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**					
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	21	21	42	42	42
	Jumlah Faskes dan jejaring	84	84	85	96	96
	Persentase	**25,00**	**25,00**	**49,41**	**43,75**	**43,75**
21.	**Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa**					
	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	82.457	80.232	80.700	80.992	85.994
	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	82.573	83.412	84.171	84.673	85.915
	Cakupan	**99,86**	**96,19**	**95,88**	**95,65**	**100,09**
22.	**Tahapan Keluarga Sejahtera**					
	Keluarga Pra Sejahtera	16.475	19.361	18.213	17.780	15.014
	Keluarga Sejahtera I	25.076	17.889	17.437	17.072	23.209
	Keluarga Sejahtera II	40.906	42.982	45.050	46.140	47.771
	Total Keluarga	**82.457**	**80.232**	**80.700**	**80.992**	**85.994**
23.	**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)**	**50,39**	**46,43**	**44,18**	**43,03**	**44,45**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Luwu naik 0,96% dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara konsisten menurun meski cenderung lambat menjadi 0,82%pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah madura. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sekitar 0,59% (2013 – 2016) dan rata-rata jumlah anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR sebesar 2,3 atau rata- rata

keluarga memiliki lebih dari dua anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan Pemerintah adalah dua anak lebih baik.

Akseptor KB yang menggunakan MKJP di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 meningkat secara signifikan, dari sejumlah 6.829 akseptor atau 14,44% pada tahun 2014 menjadi 8.564 akseptor atau 22,10% pada tahun 2018.

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 baru mencapai 74,37%, dan pada tahun 2018 dapat ditingkatkan menjadi 85,23%.

Perkembangan PKS dan KS I di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 secara terus-menerus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 mencapai 41.551 keluarga, berhasil diturunkan menjadi 38.223 keluarga pada tahun 2018.

9) Perhubungan

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya adalah marka jalan; rambu-rambu lalu lintas; alat pemberi isyarat lalu lintas; dan fasilitas penerangan jalan. Layanan urusan perhubungan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.Capaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Penumpang Angkutan Umum**					
	Jumlah penumpangAngkutan Umum	390.118	396.457	476.639	499.782	346.014
	Jumlah penumpang Pesawat udara	2.035	830	8.301	44.825	65.041
	Total Jumlah Penumpang	**392.153**	**397.287**	**484.840**	**544.607**	**411.055**
2.	**Ijin Trayek**					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	366	402	528	430	470
	Jumlah penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	**0,0011**	**0,0011**	**0,0015**	**0,0012**	**0,0013**
3.	**Jumlah Uji kir angkutan umum**	**1.845**	**1.975**	**1.989**	**1.884**	**1.878**
4.	**Pelabuhan Laut/Terminal Bis**					
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal bis	2	2	2	1	1
	Jumlah	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**
5.	**Layanan Angkutan Darat**					
	Jumlah angkutan darat	26.366	31.062	34.968	37.795	41.124
	Jumlah penumpang angkutan darat	390.118	396.457	476.539	499.782	511.328
	Persentase	**6,76**	**7,83**	**7,34**	**7,56**	**8,04**
6.	**Kepemilikan KIR angkutan umum**					

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	112	100	215	897	1.037
	Jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Jumlah angkutan umum	1.957	2.075	2.204	2.781	2.915
	Persentase	**5,70**	**4,80**	**9,70**	**32,20**	**35,60**
7.	**Pemasangan Rambu-rambu**					
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	2	81	157	223	332
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Persentase	**0,09**	**3,52**	**6,83**	**9,70**	**14,43**
8.	**Panjang jalan per jumlah**					
	Panjang Jalan (Km)	2.049,45	2.142,07	2.312,96	2.444,02	2.541,39
	Jumlah Kendaraan	26.366	31.062	34.968	37.795	41.124
	Rasio	**0,0777**	**0,0690**	**0,0661**	**0,0647**	**0,0618**
9.	**Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum**					
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	390.118	396.457	476.539	499.782	346.014
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	195	221	301	386	204
10.	**Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal**					
	Jumlah Orang	392.153	397.287	484.840	544.607	411.055
	Jumlah Barang (kg)	196,35	221,9	312,01	426,25	518,6
11.	**Layanan Urusan Perhubungan**					
	Angkutan Darat	1.957	1.975	1.200	2.781	
	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	1.845	1.975	1.600	1.884	
	Traffic Light	2	1	4	-	
	Warning Light	-	8	10	-	
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	25	25	5	2.200/2.781	

Sumber: Dinas Perhubungan

10) Komunikasi dan Informatika

Secara umum, persentase dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 masyarakat yang mengunakan jaringan komunikasi secara stimultan sama. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.Layanan urusan komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.Capaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Server yang dikelola	-	-	-	1

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	-	-	-	1
Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	-	-	-	-
Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	-	-	-	-
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	-	-	-	-
Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya
Persentase Website OPD	-	-	20	40

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 masih belum maksimal. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat urgensi bidang ini dalam kehidupan global di masa ini.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Struktur ekonomi Luwu kedepan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar. Layanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.Capaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Koperasi Aktif**					
	Jumlah Koperasi	413	412	413	413	424
	Jumlah Koperasi Aktif	206	201	206	127	187
	Persentase	**49,82**	**48,81**	**49,95**	**30,71**	**44,10**
2.	**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**					
	Jumlah UMKM	18.000	18.080	18.117	18.183	18.406
	Jumlah UMKM Aktif	17.597	16.290	15.399	15.637	15.921
	Persentase	**97,76**	**90,10**	**85,00**	**86,00**	**86,50**
	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif					
	Persentase UKM BPR/LKM Aktif					
3.	**Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM**	**15**	**18**	**18**	**18**	**18**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 masih sangat rendah, tidak mencapai 50% dari jumlah koperasi yang ada. Sementara itu, jumlah UMKM pada periode tahun 2014-2018 terus mengalami perkembangan, meskipun

keaktifannya mengalami fluktuasi. Secara umum, UMKM aktif pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan pada tahu 2018. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

12) Penanaman Modal

Iklim investasi di Luwu menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Luwu yang strategis menempatkan Luwumenjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Luwu. Layanan urusan penanaman modal menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.Capaian Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	7	7	7	7	7
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi	2	2	2	2	2
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel	10	13	14	14	14
Lama Proses perizinan	1-3 hari	1-3 hari	1-15 hari	1-15 hari	1-15 hari
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	3	3	4	4
Jumlah/ Macam Pajak	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
Jumlah/ Macam Retribusi	3	3	3	3	3
Presentase indeks kepuasan masyarakat			73,66		87,01

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2014	Jumlah investor	NA	NA	NA
2015	Jumlah investor	17	1	18
2016	Jumlah investor	17	2	19
2017	Jumlah investor	12	0	12
2018	Jumlah investor	13	0	13

Sumber: DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel diatas menunjukan pemerintah Kabupaten Luwu telah berupaya melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan investasi, antara lain dengan menetapkan regulasi, meningkatkan pelayanan dan kemudahan pengurusan perizinan. ADapun Realisasi investasi di Kabupaten Luwu menurun secara signifikan selama periode tahun 2014-2018. Pada tahun 2015, nilai investasi di Kabupaten Luwu mencapai Rp567,97 milyar, dengan jumlah investor 18 perusahaan. Sedangkan pada tahun 2018 investasi yang direalisasikan oleh 13

perusahaan hanya mencapai 16,69 milyar. Mengingat potensi Kabupaten Luwu yang sangat besar untuk investasi di sektor industri berskala besar, maka upaya-upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Kabupaten Luwu perlu dikedepankan. Investasi merupakan penggerak utama perekonomian daerah di masa kini.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita bangsa, disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya Layanan urusan kepemudaan dan olah raga menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28.Capaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda	5	20	25	
Jumlah kegiatan kepemudaan	2	4	6	7
Jumlah kegiatan olahraga	6	6	5	6
Jumlah Organisasi Olahraga	24	15	15	
Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif (%)	30	32	40	50
Cakupan Pembinaan Olahraga		2	2	5
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	4	4	4	7
Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	30	40	50	50
Jumlah Cabor Prestasi setiap Tahun	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	22	22	22	22
Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	1	2	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan keolahragaan di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2014-2018 cenderung stagnan. Komponen yang mengalami peningkatan adalah organisasi olahraga yang aktif dan cakup wasit yang bersertifikasi. Sedangkan jumlah prestasi olah raga pada tahun 2018 yang hanya mencapai 11 prestasi, jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 57 prestasi.

14) Kebudayaan

Kedatuan Luwua dalah kerajaan Bugis tertua,pada tahun 1889,Gubernur Hindia BelandadiMakassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik I La Galigo, sebuah karya orang suku bugis. Namun begitu, I La Galigo tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai teks sejarah karena dipenuhi dengan mitos, maka keberadaan kerajaan-kerajaan ini dipertanyakan. Layanan urusan Kebudayaan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29.Capaian Indikator Bidang Urusan Kebudayaan

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	4	6	6	
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	3	4	
3.	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah					
4.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi					
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	-	-	4	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
b. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah dan;
c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan asset budaya

15) Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kabupaten Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten” Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Luwu, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Layanan statistik menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.Capaian Indikator Kinerja Bidang Statisik

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

16) Persandian

Layanan persandian menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31.Capaian Indikator Kinerja Bidang Persandian

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah					
2	Jumlah total perangkat daerah					
3	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah**					

Sumber: Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian

17) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar disekolahtempat perpustakaan tersebut berada.Layanan urusan perpustakaan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Pengunjung Perpustakaan**					
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	26.818	27.395	30.157	31.685	25.789
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	1.255.366	1.447.533	1.769.251	1.859.205	1.879.815
	Total	**1.282.184**	**1.474.928**	**1.799.408**	**1.890.890**	**1.905.604**
	Jumlah Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang	**2..235**	**2.283**	**2.513**	**2.640**	**2.149**
2.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	44.789	45.830	47.674	48.912	49.746
3.	**Rasio perpustakaan per satuan penduduk**					
	Jumlah Perpustakaan	506	513	520	525	525
	jumlah Penduduk	347.096	350.218	353.277	356.305	359.209
	Rasio	0,00146	0,00146	0,00147	0,00147	0,00146
4.	**Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang)**					
	Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	3	3
	jumlah seluruh pustakawan tenaga teknis dan penilai	3	3	3	3	3
	Jumlah	6	6	6	6	6
5.	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelolah	111	111	-	2	
6.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Berprestasi	-	1	1	1	
7.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	2	2	2	2	

Sumber: Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sebesar 26.818 orang menjadi 31.685 orang di tahun 2017. Demikian juga dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah yang terus bertambah dari tahun 2014 sebesar 44.789 judul buku menjadi 48.912 judul buku pada tahun 2017

18) Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Layanan urusan kearsipan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kearsipan

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%))	-	-	-	-
Jumlah Arsip daerah yang dikelola	7 OPD	7 OPD	7 OPD	9 OPD
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	3	3	3	7
Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	7	7	7	13

Sumber: Dinas Perpustakaan & Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 semakin membaik, terlihat dari meningkatnya sarana kearsipan daerah sebagaimana terlihat pada tabel di atas dan persentase perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku.

2.1.3.3. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Pariwisata

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Luwu cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan

pembangunan daerah. Layanan urusan pariwisata menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pariwisata

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	PAD sektor pariwisata (Rp)	50.000.000	50.160.000	50.350.000	50.160.000	149.975.000
2	Total PAD (Juta Rp)	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74
3	PAD Sektor Pariwisata (%)	0,08	0,06	0,05	0,05	0,14

Sumber: Dinas Pariwisata

PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Luwu perioe tahun 2014-2018 meningkat cukup signifikan. Namun demikian, perlu terus dikembangkan mengingat Kabupaten Luwu memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2) Pertanian

Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariatif mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik.Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Luwu, diantaranya adalah penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Luwu, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta pembangunan ekonomi daerah.Layanan urusan pertanian menjadi kewenangan Dinas Pertanian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian

No	Pertanian	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	53,55%	54,24%		
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB				
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB				
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB				
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	308.380	312.382	294.586	288.273
6	Cakupan bina kelompok petani	13,35	7,79	6,25	7,35

Sumber: Dinas Pertanian

3) Transmigrasi

Layanan urusan transmigrasi menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Transmigrasi

No	Transmigrasi	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Persentase transmigran swakarsa	50 KK	50 KK	50 KK	50 KK
2	Luas Lahan Transmigrasi yang dikelola	101 Ha	102 Ha	103 Ha	104 Ha
3	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disiapkan	251 Ha	252 Ha	253 Ha	254Ha

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

4) Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dan kelautan merupakan aset penting yang dimiliki oleh Indonesia. demikian juga dengan Kabupaten Luwu. Sumberdaya perikanan dengan kekayaan hayatinya akan memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, tentunya dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang benar. Layanan urusan perikanan menjadi kewenangan Dinas Perikanan dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perikanan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Produksi Perikanan**					
	Produksi perikanan (ton)	652.314,80	667.410,50	537.487,00	648.650,33	628.748,61
	Target Daerah (Ton)	567.964,00	597.741,00	624.845,00	655.427,00	687.531,00
	Persentase Produksi Perikanan	**114,85**	**111,66**	**86,02**	**98,97**	**91,45**
2.	**Konsumsi Ikan**					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	47,85	48,05	50,32	52,00	53,04
	Target Daerah (Kg)	47,85	48,81	49,29	49,79	49,79
	Konsumsi ikan	100,00	98,44	102,09	104,44	106,53
3.	**Cakupan bina kelompok nelayan**					
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n (kelompok)	69	41	32	15	8
	Jumlah kelompok nelayan	105	187	204	224	232
	Cakupan bina kelompok nelayan	**65,71**	**58,82**	**69,61**	**70,09**	**71,12**
	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	7,03	11,98	11,00	10,83	10,68
	Bantuan Alat Tangkap	68	50	33	15	
4.	**Produksi perikanan kelompok nelayan**					
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasilkelompok nelayan	840,00	1.496,00	1.632,00	1.792,00	1.856,00
	Jumlah produksi ikan di daerah	11.949,29	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17.379,30
	Produksi perikanan kelompok nelayan	7,03	11,98	11,00	10,83	10,68
5.	**Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**					
	Jumlah tangkapan ikan	11.949,29	12.486,20	14.842,80	16.552,70	17,379,30
	80% dari tangkapan maksimum lestari	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	-	-	-	-
6.	**Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial**					
	Kawasan lindung perairan	-	-	-	-	-
	Total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	-	-	-	-	-
7.	**Nilai Tukar Nelayan**					
	Indeks yang diterima nelayan					
	Indeks yang dibayar nelayan					
	Nilai tukar nelayan	**106,43**	**107,12**	**103,48**	**104,36**	**104,45**

Sumber: Dinas Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini konstribusinya terhadap produksi perikanan total juga semakin menurun.

Peningkatan ini merupakan wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan terhadap perkembangan otak. Ibu yang mengonsumsi ikan secara teratur selama masa kehamilan, mempunyai anak yang memiliki skor tes inteligensi yang lebih tinggi dibanding dengan teman sebayanya yang lain. Selain itu, orang tua yang telah mengonsumsi ikan dalam waktu lama mempunyai risiko yang lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran;
2. Menurunnya potensi ikan lemuru di perairan;
3. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan;
4. Tingginya tingkat abrasi pantai

2.1.3.4. Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Layanan urusan perencanaan pembangunan menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.Capaian Indikator Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

No	URAIAN	SATUAN	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPDyang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/TidakAda	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDyang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/TidakAd a	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA	Ada/TidakAd a	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	53,69	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	53,69	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan denganRTRW			

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang

Pemerintah kabupaten Luwu telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011. RPJMD Kabupaten Luwu periode tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015. Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu.

2) Keuangan

Layanan urusan keuangan menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Keuangan

No	Keuangan	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA (Rp)	74.419.389.565	152.494.387.791	61.673.896.116	34.272.914.125
3	Persentase SILPA terhadap APBD	8.09%	13.40%	4.14%	2.60%
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana				
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	12.57	37.25	28.73	26.56
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	8.00	11.30	13.53	9.12
7	Perbandingan antara belanja	492.272.859 :	602.813.083 :	728.180.279 :	731.112.093 :

No	Keuangan	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
	langsung dengan belanja tidak langsung	425.085.965	524.412.953	752.908.086	552.376.480
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	3.51	0.33	0.34	0.20
9	Penetapan APBD	Desember	Desember	November	Desember

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan urusan kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.Indikator Capaian Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan**	**6.221**	**22.292**	**16.185**	**16.345**	**11.356**
2.	**Pendidikan dan Pelatihan Struktural**					
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	84	35	101	91	92
	Jumlah Total Jabatan	539	538	591	728	696
	Persentase	**15,58**	**6,51**	**17,09**	**12,51**	**13,21**
3.	**Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada intansi pemerintahan**	**35**	**34**	**35**	**40**	**40**
4.	**Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah**	**3.864**	**3.804**	**3.718**	**2.998**	**3.071**
5.	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**					
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	132	92	74	83	45
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang)	35	1.011	91	92	209
	Jumlah ASN (Orang)	6192	6896	6707	3901	5778
	Persentase	**2,13**	**1,33**	**1,10**	**2,13**	**0,78**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaanterhadap PNS untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan pelatihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang.Data yang ada pemerintah Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa pelatihan pegawai pada tahun 2018 mencapai 11.356 jam pelajaran. Hal ini merupakan angka terendah sejak tahun 2015.

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan ini terdiri dari empat jenjang sebagaiman peraturan yang ada.

Jumlah jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tentu. Pada Tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal adalah 3.901 orang dan pada tahun 2018 sebanya 5.778 orang.

4) Pengawasan

Layanan urusan pengawasan menjadi Inspektorat Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Pengawasan

No	Pengawasan	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Persentase tindak lanjut temuan	86.20	70.17	92.71	69.50
2	Persentase pelanggaran pegawai	-	-	-	-
3	Jumlah temuan BPK	20	15	11	19

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu

5) Sekretariat Dewan

Layanan urusan sekretariat dewan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42.Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Dewan

No	Sekretariat Dewan	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	103	152	119	70
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	117	170	137	197

No	Sekretariat Dewan	Capaian Tahun			
		2015	2016	2017	2018
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	98.5%	95.6%	97%	94%

Sumber: Sekretariat Dewan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Perkembangan aspek daya saing daerah digambarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

Pengeluaran konsumsi perkapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan kemampuan ekonomi penduduk suatu wilayah. Kecenderungan masyarakat mengkonsumsi yang tinggi menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, hampir seluruh daerah masih mengandalkan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai penggerak perekonomian, salah satunya adalah Kabupaten Luwu. Nilai rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebulan di Kabupaten Luwu mencapai Rp.698.582,00 pada tahun 2017. Nilai ini terus meningkat sejak tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 580.638. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, selain itu, kebijakan pemerintah seperti kebijakan menaikkan pajak juga dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. secara ringkas perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut:

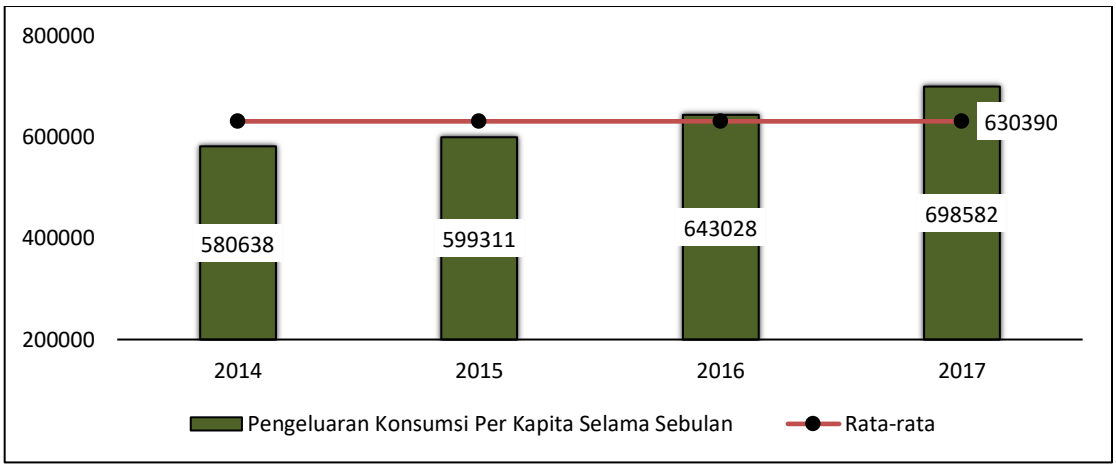

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Selama Sebulan

Pola konsumsi rumah tangga menggambarkan daya saing sumber daya manusia. Manusia yang sehat memiliki kesempatan lebih baik untuk berusaha dan meningkatkan kesejahteraannya, disisi lain mereka yang tidak sehat cenderung memiliki produktivitas yang rendah sehingga cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang juga rendah. Jika dilihat dari pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Luwu, sebagian besar masyarakat Kabupaten

Luwu masih tergolong rawan pangan. Hal ini tercermin dari pengeluaran konsumsi pangan yang masih memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran. Pada tahun 2017, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi pangan mencapai 57,73%. Jika diperhatikan lebih rinci, kelompok masyarakat yang tergolong rawan pangan adalah mereka yang berada pada kelompok pengeluaran kurang dari 1 jt per bulan. Untuk lebih jelas, pola pengeluaran konsumsi masyarakat dan perkembangannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

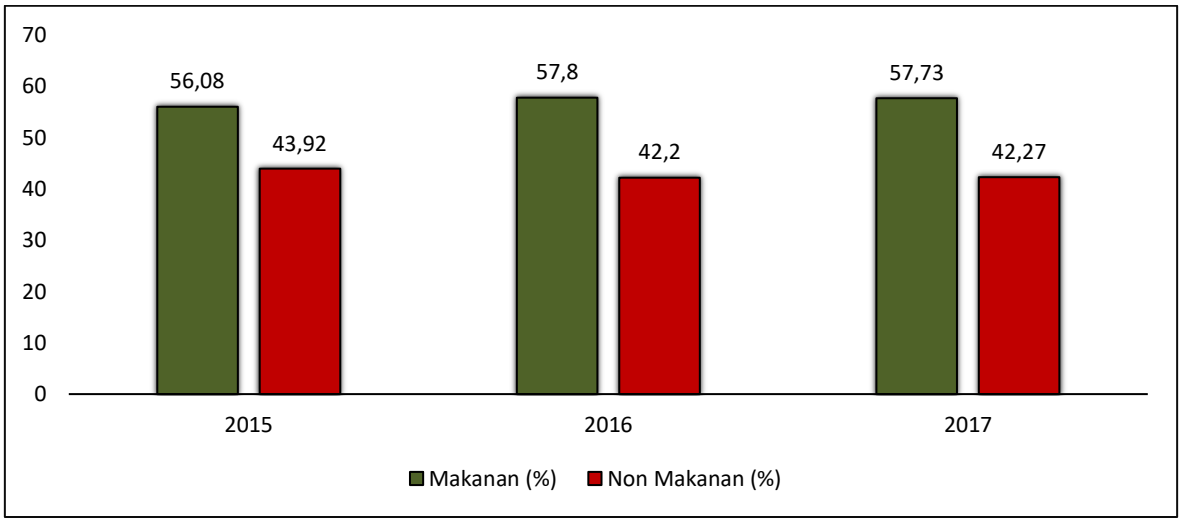

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.12. Pola Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2015-2017

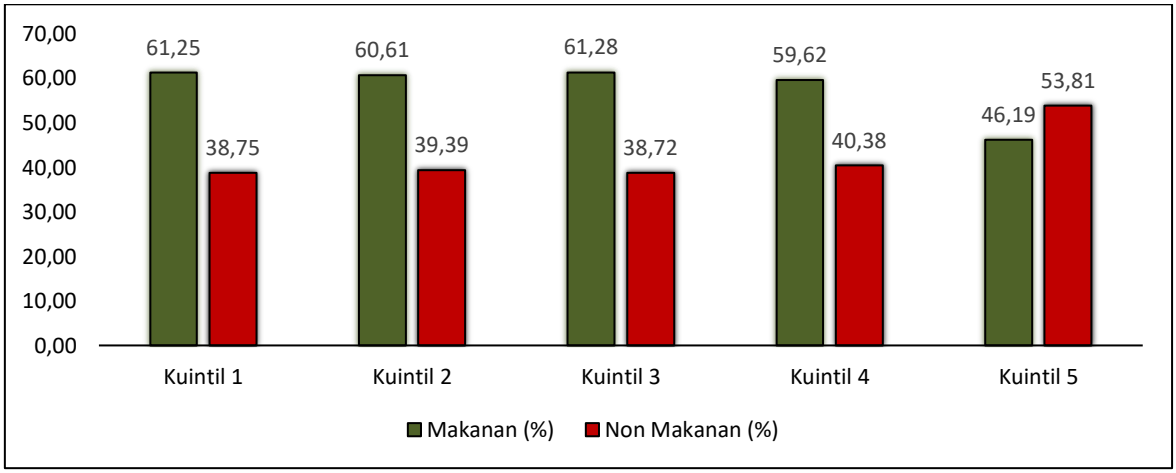

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.13. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Menurut Barang & Kuintil Pengeluaran Tahun 2017

Produktivitas Daerah. Produktivitas total daerah menunjukkan jumlah output yang dihasilkan daerah dengan sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Luwu memiliki sumber daya yang melimpah, baik berupa kekayaan alam maupun tenaga kerja. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu tumbuh dengan cepat. Meskipun demikian, laju pertumbuhan angkatan kerja tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan produktivitas

total daerah. Dalam 2 tahun terakhir, laju pertumbuhan produktivitas total daerah justru melambat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi modal yang belum memadai serta tingkat pendidikan, dan ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan bidang pekerjaan tanaga kera. Untuk lebih jelas, gambaran umum produktivitas total Kabupaten Luwu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

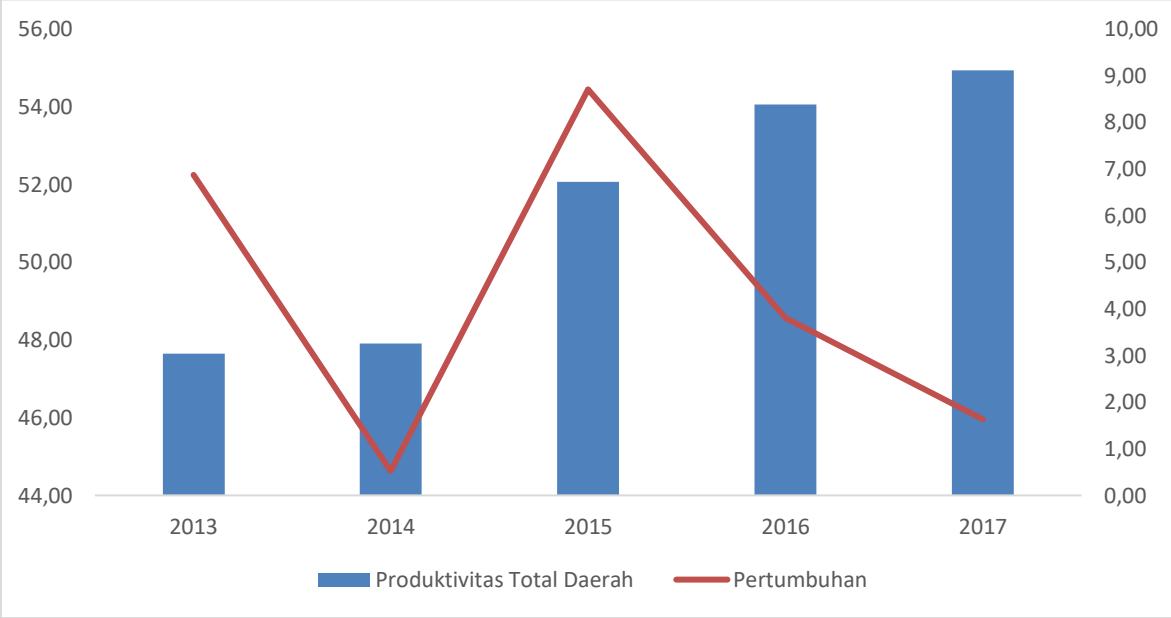

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2.14. Produktivitas Total Daerah & Pertumbuhan Produktivitas Total Daerah

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahunlalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah tertuang dalam lampiran II dokumen ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD ditahun rencana serta prioritas lain dari Kebijakan Nasional / Provinsi yang bersifat mandatori. Secara umum permasalahan yang

berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah tidak semuanya program yang ada dalam RPJMD dituangkan pad RKPD setiap tahunnya, mengingat faktor kondisi keuangan daerah ditahun berjalan. Perubahan struktur OPD yang tidak diikuti dengan revisi terhadap Dokumen RPJMD Tahun 2014-2019.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut Layanan Dasar dan Tugas/Fungsi tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat berdasarkan urusan layanan wajib dan pilihan serta urusan penunjang pada pembahasan berikut :

1) Pendidikan

Layanan Urusan Pendidikan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pendidikan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Luwu

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

2) Kesehatan

Layanan Urusan Kesehatan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kesehatan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Layanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Layanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Satuan Polisi Pamong Paja serta Dinas Pemadam Kebakaran dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Perkelahian Pemuda antar Kelompok	Dendam dan balas dendam dari pemuda sering timbul	- Peningkatan koordinasi dari Pemda dan aparat keamanan - Pengawasan peredaran minuman keras/ballo mulai ditingkatkan	Kerja sama pada Lokasi Pengambilan Minuman Keras
2	Pengedaran Narkoba, Narkotika dan Zat adiktif lainnya	Ancaman keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkoba, narkotika dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar	Peningkatan kondisi dan sosialisasi bahaya yang ditimbulkan dari Narkoba dan semacamanya di Sekolah SMP, SMA, SLTA dan sederajat	Rancangan pada tahap penyuluhan bahaya narkoba dan semacamnya sementara dalam proses
3	Peristiwa pencurian dan penipuan milik	Peristiwa pencurian dan penipuan rawan	Pemetaan pembuatan siskamling di Desa atau Kelurahan yang padat penduduknya	Anggota LInmas selama ini

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
	masyarakat di Pedesaan	menimbulkan perkelahian dari kerawanan keamanan	Pengaktifkan anggota Linmas sebagai penjaga keamanan disertai dengan pembangian insentif dari biaya hidup	hanya aktif menjelang Pilkada dan Pemilu

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; Dinas Satuan Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran

Ket : ☐ = *data belum tersedia*

6) Sosial

Layanan Urusan Sosial menjadi kewenangan Dinas Sosial bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Sosial

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Masih terbatasnya sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelanggaran penanggulangan Becana.	Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	
2	Rendahnya pemahaman Masyarakat dan Aparat Pemerintahan dalam Menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.	Rendahnya pemahaman masyarakat dan ap Rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat arat.	Pelatihan/peningkatan Kapasitas SDM	
3	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan masalah social.	Sinergitas lintas dan keterlambatan informasi	1. Menjalin sinergitas Lintas OPD dan Pembuatan Line/website 2. Sosialisasi penanggulangan masalah social menjangkau tingkat desa	
4	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) semakin meningkat.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social semakin meningkat	1. Peningkatan khualitas pelayanan kepada penyandang masalah kesejahtraan social (PMKS) dengan cara : 2. Pembangunan basis data PMKS	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
			secara terpadu (By Name By Addres) 3. Peningkatan Kerja sama Provinsi dan kesejahteraan Sosial (PSKS) 4. Peningkatan Kemandirian Para Penyandang Masalah Sosial	
5	Rendahnya kuota dan bantuan social bagi penyandang disabilitas dan Lanjut Usia.	Rendahnya kuota dalam jumlah bantuan bagi penyandang disabilitas dan Lanjut Usia	Penambahan Kuota dan jumblah Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (ASPDB) dan Lanjut Usia(ASLUT) di Tingkat Kab/Kota	

Sumber: Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ket : ☐ = data belum tersedia

7) Tenaga Kerja

Layanan Urusan Tenaga Kerja menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Tenaga Kerja

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Kurangnya tenaga surveyor	Data tidak lengkap	Penambahan tenaga surveyor	
2	Anggaran dana dan kendaraan operasional yang kurang	Pembinaan kurang maksimal	Penambahan alokasi anggaran belanja kendaraan operasional untuk survey daerah transmigran	
3	Terbatasnya tenaga instruktur dan peralatan pelatihan di BLK yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Pelatihan tenaga kerja tidak kompeten	Penambahan instruktur dan penambahan alokasi dana belanja peralatan yang memadai	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
4	Tidak terbitnya sertifikat tanah hak milik transmigran	Identifikasi kepemilikan tanah tidak diketahui	Mempercepat proses sertifikasi hak milik dari Pemerintah Pusat	
5				

Sumber :DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi 2018

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Bidang PUG			
2	Bidang PPA			
3	Data dan Informasi			
4	a. Belum Pernah diLakukan mapping Data dan Informasi Gender dan Anak Sehingga Belum Tersedia Data b. Belum Tersedianya Data dan Informasi Terpiulah Gender dan Anak c. Belum ada Tenaga Pengelolah Data dan Informasi Gender dan Anak yang Terampil d. Belum Tersedia Pengelolahan dan Penyajian Data Secara Grafis dan On line	Belum Menjadi Prioritas Dalam Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Anggaran Belum Mampu Mengakses Data dan InformasiGender dan Anak Secara Menyeluruh di Seluruh Sector Belum Tersedia Fasilitasi Data dan Informasi Gender dan Anak Gender dan Anak yang Memadai Belum Tersedia Fasilitas Data Gender dan Anak yang Memadai	Perlu dilakukan Mapping Data dan Informasi gender dan Anak Gender dan Anak pada tahun 2019 Untuk Mendapatkan Data Gender dan Anak yang Valid Perlu di Bangun kemitraan dan Kerja Sama Lintas Sektor Untuk Mendapatkan Data dan Informasi Gender dan anak yang Up to date Perlu Pengadaan Fasilitasi Data dan InformasiGender dan Anak yang cukup dan Pelatihan Tenaga Terlatih Gender Anak Perlu Pengadaan Softwere data dan Informasi Gender dan Anak yang Gratis dan One line	
5				

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9) Pangan

Layanan Urusan Pangan menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Ket : ☐ = data belum tersedia

10) Pertanahan

Layanan Urusan Pertanahan menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pertanahan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3	Tanah Negara yang dikuasai oleh Masyarakat	Sangat baik untuk Lokasi Pembangunan Kampus Universitas Andi Djemma Palopo		
4	Keinginan Masyarakat untuk dibayarkan segera	Harus dengan segera diselesaikan berdasarkan permintaan Masyarakat		

5	Lokasi tersebut sulit untuk komunikasi Sulit belanja untuk kebutuhan sehari-hari	1) Komunikasi Dengan Masyarakat sangat susah 2) Persaingan Ekonomi dengan Masyarakat semakin susah berkembang	1) Dengan pembangunan Tower 2) Dengan Pembangunan Pasar Modern	

Sumber : Dinas Pertanahan

3) Lingkungan Hidup

Layanan Urusan Lingkungan Hidup menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Penebangan hutan secara liar/perambahan hutan yang berlebihan	Berkurang tutupan lahan dampak penting : ➢ Menurunnya kualitas tanah ➢ Menurunnya kualitas air tanah ➢ Menurunnya kualitas udara ➢ Terganggunya habitat flora dan fauna ➢ Rentang terjadinya longsor/bencana alam	➢ Penanaman kembali hutan yang sudah gundul ➢ Konservasi hutan ➢ Perbaikan daerah tangkapan air	
2	Polusi air dari limbah industry dan pertambangan	Terjadinya pemncemaran air dan udara	Penataan terhadap usaha industry yang belum taat	
3	Perburuan liar dan perdagangan hewan yang dilindungi	Kepunahan terhadap hewan yang diburu	Pengawasan terhadap perdagangan hewan di Pasaran	
4	Pengahncuran Terumbu Karang	Kepunahan terhadap biota laut	Rehabilitasi terumbu karang	
5	Penebangan hutan Mangrove	Terjadinya abrasi pantai	Penanaman Mangrove	
6	Pembuagan sampah sembarangan	Terjadinya pencemaran lingkungan pemukiman	Pembinaan tentang pengelohan sampah rumah tangga	
7	Polusi emisi kendaraan bermotor	Terjadinya pencemaran udara Ambien	Pengujian terhadap kendaraan bermotor	
8	Penggunaan pestisida secara berlebihan	Terjadinya pencemaran air pemukiman	Pembinaan terhadap petani dalam penggunaan pestisida	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
			yang tidak merusak lingkungan	

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup.

4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kewenangan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Peralatan yang tidak memadai	Peralatan yang tidak memadai	Pergantian dan penambahan peralatan pelayanan	
2	Jaringan yang tidak stabil	Jaringan yang tidak stabil	Penguatan jaringan untuk pelayanan mobile	
3	Kurangnya tenaga organic	Kurangnya tenaga organic	Penambahan pegawai ASN untuk bagian pelayanan	
4	Masih banyak warga yang belum sadar tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Masih banyak warga yang belum sadar tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Memperbanyak sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	a. Bantuan Keuangan Dari Pemprov Belum Ada Terkait Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran Desa Sesuai Amanat UU Desa b. Dana Desa Belum Dapat Dialokasikan Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa	Anggaran Dari Daerah Belum Mampu Dan Masih Sangat Terbatas Membiayai Pemeliharaan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa 207 Desa Dana Desa belum dapat dialokasikan untuk Prasarana Perkantoran Desa	Memaksimalkan Upaya Koordinasi Dengan Pemmprov Dalam Rangka Bantuan Keuangan Untuk Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Sesuai Amanat UU Desa Diharapkan Ada Regulasi Yang Dapat Memungkinkan Dana Desa Dapat Dialokasikan Untuk Pembangunan Dan Atau Pemeliharaan Prasarana Perakntoran Desa	
2	a. Anggaran Pembinaan LPMD masih minim dan hanya dialokasikan melalui APBDes b. Anggaran Daerah (DPMD) belum ada untuk Pembinaan LPMD	Anggaran Pembinaan LPMD masih minim dan hanya dialokasikan melalui APBDes Kemandirian masyarakat akan mengalami hambatan akibat minimnya keterlibatan Pemerintah Desa dalam upaya membangun kemandirian masyarakat melalui pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Alokasi anggaran yang memadai dapat bertahap untuk Pembinaan LPMD bagi seluruh 207 Desa dan 20 Kelurahan	
3	a. Masih Minimnya Anggaran Pelatihan Teknis Pengelola BUMDes b. Masih minimnya pengelola BUMDes yang diberi Pelatihan Teknis, Terutama Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Masih Minimnya Anggaran Pelatihan Teknis Pengelola BUMDes Potensi Penyalahgunaan bantuan BUMDes oleh Pengelolah BUMDes akibat minimnya pelatihan	Perlu ditingkatkan anggaran Pelatihan Teknis Pengelola BUMDes baik di Daerah maupun dari Pemprov	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
	c. Masih minimnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengelola BUMDes dalam Pengelolaan bantuan BUMDes d. Belum ada bantuan keuangan dari Pemprov terakit Program-program Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	Potensi tidak dimanfaatkannya bantuan modal BUMDes akibat minimnya Pelatihan Pengelolah BUMDes Potensi mandetnya usaha BUMDes	Perlu ditingkatkan modal usaha BUMDes dan Pelatihan Pengelolaan usaha BUMDes	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Tenaga Penyuluh masih sangat minim	Tenaga Penyuluh masih sangat minim	Penambahan Tenaga Penyuluh	Seharusnya/idealnya 1 (satu) Desa 1 (satu) Penyuluh
2	Insentif PPKB dan Sub PPKB masih sangat minim	Insentif PPKB dan Sub PPKB masih sangat minim		
3	SK untuk kelompok Tribina sudah ada akan tetapi Program belum berjalan Optimal	Rendahnya partisipasi kelompok Tribina dalam memajukan Program yang mendukung Kampung KB	1. Diharapkan adanya dukungan kebijakan pembiayaan untuk mengoptimalkan semua kelompok TRIBINA 2. Perlunya sosialisasi untuk mengoptimalkan semua kelompok Tribina	Kelompok Tribina : 1) Klp. Lansia 2) Klp. BKB 3) Klp. Remaja 4) Klp. UPPKS 5) Klp. BKR 6) Klp. PIK.R

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
4	Kurangnya sarana untuk operasional di lapangan dalam melakukan Bimtek dan Monev	Kurangnya sarana untuk operasional di lapangan dalam melakukan Bimtek dan Monev	Diharapkan adanya dukungan kebijakan pembiayaan untuk Bimtek dan Monev	
5				

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7) Perhubungan

Layanan urusan perhubungan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perhubungan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Tidak befungsinya dengan baik peralatan pengujian Kendaraan Bermotor	Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pengujian Kendaraan Bermotor	Perlu memperbaikik peralatan pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor	
2	Belum berfungsinya pelabuhan Tabbette	Kurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Laut, Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi	Perlu Tindak Lanjut Pembangunan Terminal Belopa guna Menunjang Arus Transportasi	
3	Tidak adanya Terminal Penumpang Belopa	Kurangnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Darat	Perlu Mempercepat Pembangunan Terminal Belopa Guna Menunjang Arus Transportasi	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Luwu 2018

8) Komunikasi dan Informatika

Layanan urusan komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Ket : ☐ = data belum tersedia

9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Layanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Tidak adanya sistem data yang akurat Untuk menginput Data/Koperasi yang a da	Koperasi dengan segala bentuk dan usahanya seharusnya sudah bisa terinput dengan rapi serta terdata secara menyeluruh	Adanya Sistem Informasi Tentang Koperasi	
2	Kurang SDM	Pembayaran	Terpenuhinya SDM dan Pembiayaan	
5	Kurang SDM			

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

10) Penanaman Modal

Layanan urusan penanaman modal menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Penanaman Modal

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Tim Teknis masih melekat di OPD Teknis	Tim Teknis Masih Melekat di OPD Teknis	Tim Teknis melekat di DPMTSP	
2	Gedung DPMTSP tidak memadai	Gedung DPMTSP tidak memadai	Pembangunan Gedung Baru	
3	Sarana dan Prasarana Tim Teknis Kurang	Dapat Menghambat pelayanan perizinan	Dukungan Sarana dan Prasarana untuk Tim Teknis	

Sumber : Dinas DPMTSP

11) Kepemudaan dan Olah Raga

Layanan urusan kepemudaan dan olah raga menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Pendanaan	Pendanaan	Bantuan Dana	
2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

12) Statistik

Layanan Statistik menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Statistik

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				

2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Ket : ☐ = data belum tersedia

13) Persandian

Layanan Persandian menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Persandian

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Ket : ☐ = data belum tersedia

14) Kebudayaan

Layanan urusan kebudayaan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kebudayaan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Sumber Daya Manusia masih minim	Sumber Daya Manusia masih minim	Perlunya pengembangan SDM melalui Diklat/Bimtek Pemberian motivasi untuk membentuk	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
	Pemerhati atau lembaga di bidang seni budaya masih minim	Pemerhati atau lembaga di bidang seni budaya masih minim	lembaga pengembangan seni dan budaya Perlunya tersedia anggaran penyelenggaraan festival seni dan budaya	
2	Minimnya daya tarik untuk melestarikan benda situs cagar budaya Kurangnya perhatian PEMDA terhadap pelestarian cagar budaya Belum ada PERDA tentang Cagar Budaya	Minimnya daya tarik untuk melestarikan benda situs cagar budaya Kurangnya perhatian PEMDA terhadap pelestarian cagar budaya Perlunya SDm tentang Cagar Budaya	Memberikan perhatian pelestarian terhadap benda situs dan cagar budaya Adanya PERDA dan tersedianya SDM Perlunya tersedia anggaran pelestarian Situs	
3	Sumber Daya Manusia masih minim	Sumber Daya Manusia masih minim	Perlunya pengembangan SDM melalui Diklat/Bimtek Perlunya tersedia anggaran revitalisasi dan inventarisasi	
4	Pemerhati atau Lembaga masih minim	Pemerhati atau Lembaga masih minim	Perlunya pengembangan SDM melalui Diklat/Bimtek Perlunya tersedia anggaran pengelolaan cagar budaya secara terpadu	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

15) Perpustakaan

Layanan Urusan Perpustakaan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perpustakaan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Penambahan koleksi Buku-buku PAUD/TK dan koleksi local	Penambahan Koleksi PAUD dan pengolahan Buku TK	Mengalokasi anggaran untuk PAUD-SD-SMP	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
2	Buku-buku penunjang untuk anak SD-SMP			
3				

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

16) Kearsipan

Layanan urusan kearsipan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kearsipan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Koleksi PAUD/TK masih berkurang	Beberapa PAUD /TK aakan mengadakan kunjungan ke Perpustakaan Umum	Perlu penambahan ruangan dan koleksi PAUD/TK maupun bacaan umum	
2	Masyarakat kurang berminat ke Perpustakaan Umum kerana jaraknya terlalu jauh dengan tempat tinggal	Membutuhkan biaya transportasi untuk berkunjung ke Perpustakaan Umum	Pengembangan Perpustakaan di Kecamatan sebagai titik layanan Perpustakaan	
3	Kurang maksimalnya kegiatan layanan Perpustakaan keliling	Program Pemerintah Pusat untuk lebih mendekatkan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat	Membuat aplikasi Perpustakaan yang berbasis online serta Perpustakaan yang berbasis digital	
4	Kurangnya pengetahuan pengelola Perpustakaan	Adanya permintaan standarisasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional	Melakukan Bimtek pengelola Perpustakaan	
5	Kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya perpustakaan	Masih kurangnya sosialisasi Perpustakaan kepada Masyarakat	Melakukan kerjasama dengan OPD dan Perpustakaan Desa/Kelurahan keliling	
6	Perpustakaan desa dan Sekolah belum terjangkau karena kondisi dan lokasi	Adanya permintaan Perpustakaan Desa dan Sekolah untuk dilayani dan Pembinaan Perpustakaan	Perlu penambahan mobil Perpustakaan keliling dan motor operasional, penambahan waktu layanan Perpustakaan Keliling	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

17) Pariwisata

Layanan urusan pariwisata menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pariwisata

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Masih Kurangnya Akses Menuju Lokasi Objek Wisata			
2	Masih kurangnya tenaga untuk mencari Data di Lokasi		Mohon ditambah tenaga (ASN) di DinasPariwisata	
3	Kurangnya promosi			
4	Masih kurangnya even-even tentang Pariwisata			
5	Masih kurangnya anggaran		Anggaran	

Sumber : Dinas Pariwisata.

18) Pertanian

Layanan urusan pertanian menjadi kewenangan Dinas Pertanian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pertanian

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Pertanian

Ket : ☐ = data belum tersedia

19) Perdagangan

Layanan urusan perdagangan menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perdagangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber : Dinas Perdagangan

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

20) Perindustrian

Layanan urusan perindustrian menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perindustrian

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Lahan Usaha (LU2) Dengan Luas 150Ha Sampai Dengan Saat ini tidak Jelas yang di Peruntuhkan Untuk Transmigrasi Lokal yang Tidak Dapat LU 1 di UPT Bukit Harapan	Lahan Usaha (LU2)dengan Luas 250 Ha Sampai Saat ini Tidak Jelas yang di Peruntukan Untuk Transmigrasi Lokal yang Tidak dapat LU 1di UPT Bukit Harapan	Harus Sering Koordinasi Dengan Dinas Terkait	
2	Keseriusan Pemerintah setempat Untuk Mengenai LU 2 dengan Koordinasi Dengan Dinas Terkait	Keseriusan Pemerintah Setempat Untuk Mengenai LU 2 dengan Koordinasi Dengan Dinas Terkait	Harus Sering Koordinasi Dengan Dinas Terkait	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
3	Penerbitan Sertifikat hak Kepemilikan Lahan(HPL) di Lahan Pemukiman (LP) dan Lahan Usaha (LU) di UPT Bukit Harapan	Penerbitan sertifikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) di Lahan Pemukiman (LP) dan Lahan Usaha (LU 1) di UPT Bukit Harapan	Harus Sering Koordinasi Dengan Dinas Terkait	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2018

21) Transmigrasi

Layanan urusan transmigrasi menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Transmigrasi

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
5				

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

22) Perikanan

Layanan urusan perikanan menjadi kewenangan Dinas Perikanan dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perikanan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakt perikanan masih rendah	Kulitas produksi hasil perikanan belum susuai dengan Pemerintah Pasar/Konsumen	Penambahan Aparat Dinas dan Penyuluhan Perikanan/Tenaga Teknis dengan kualitas dan kuantitas yang memadai	
2	Belum optimalnya produksi perikanan	Kulitas produksi hasil perikanan belum susuai dengan	Penambahan Aparat Dinas dan Penyuluhan Perikanan/Tenaga	

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
	budi daya (Ikan, udang dan rumput laut)	Pemerintah Pasar/Konsumen	Teknis dengan kualitas dan kuantitas yang memadai	
3	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Kulitas produksi hasil perikanan belum susuai dengan Pemerintah Pasar/Konsumen	Penambahan Aparat Dinas dan Penyuluhan Perikanan/Tenaga Teknis dengan kualitas dan kuantitas yang memadai	
4	Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha perikanan	Akses Pasar Dikuasai Oleh Lembaga yang mempunyai Modal besar	a. Penguatan posisi tawar Pelaku Usaha Perikanan melalui Kelembagaan Koperasi Perikanan sebagai penyedia sarana produksi dan pemasaran hasil b. Peningkatan akses informasi pasar dan pemasaran produk perikanan melalui Website Pemeritah dan Aplikasi Android	

Sumber: Dinas Perikanan

23) Perencanaan Pembangunan

Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Tata cara perencanaan pembangunan daerah belum dilaksanakan dengan maksimal	Rendahnya capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur urusan perencanaan	
2	Rendahnya kualitas perumusan kebijakan pembangunan	Minimnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran	Pemutakhiran data dan informasi perencanaan dan penguatan koordinasi	
3	Minimnya pemahaman aparatur terhadap tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rendahnya kualitas hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur urusan perencanaan pembangunan	
4	Data & Informasi yang pembangunan daerah yang kurang optimal	Rendahnya kualitas kebijakan perencanaan pembangunan	Pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang

24) Keuangan

Layanan Urusan Keuangan menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Keuangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Belum Maksimalnya Kualitas SDM Pengelola Keuangan	Belum Maksimalnya Kualitas SDM Pengelola Keuangan	Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, Bimtek, dan Studi Perbandingan	
2	Rendahnya Pemahaman terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan	Rendahnya Pemahaman terhadap aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan Keuangan		
3	Perencanaan anggaran belum maksimal	Perencanaan anggaran belum maksimal		
4	Pengelolaan asset belum maksimal	Pengelolaan asset belum maksimal		
5	Penyusunan laporan Pertanggung jawaban belum maksimal	Penyusunan laporan Pertanggung jawaban belum maksimal		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

25) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Layanan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Keterbatasan anggaran dalam pembiayaan program strategis sehingga tujuan strategis oragnisasi	Keterbatasan anggaran dalam pembiayaan program stategis sehingga tujuan strategis organisasi sulit tercapai sepenuhnya	Menyediakan anggaran untuk program kegiatan yang secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan strategis Organisasi	

	sulit tercapai sepenuhnya			
2	Pelaksanaan dan pelaporan Diklat yang belum terpadu melalui BKPSDM sehingga menyebabkan database Diklat menjadi tidak akurat	Pelaksanaan dan pelaporan Diklat yang belum terpadu melalui BKPSDM sehingga menyebabkan database Diklat menjadi tidak akurat	Melaksanakan manajemen pelaksanaan Diklat secara terpadu melalui BKPSDM	
3	Manajemen kepegawaian yang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum mendukung	Komitmen dari Pimpinan untuk melaksanakan sistem Merit secar Paripurna	Melaksanakan sistem Merit yang meliputi : 1. Memastikan seluruh Jabatan telah memiliki standar kompetensi Jabatan 2. Memastikan perencanaan kebutuhan Pegawai berdasarkan beban kerja 3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilaksanakan secara terbuka 4. Memastikan terlaksananya manajemen karir 5. Menerapkan sistem punis dan reward 6. Penerapan kode etik dan perilaku Pegawai ASN 7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembang kompetensi sesuai hasil kinerja 8. Adanya perlindungan kepada ASN dari penyalahgunaan kewenangan 9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi.	
4	Penempatan Pejabat yang belum teralalu memperhatikan kualifikasi, komptensi, dan kinerja Pegawai ASN sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan diantara sesame Pegawai ASN	SDM aparatur yang tidak mampu mengikuti tuntutan perubahan akan menjadi beban dalam penempatannya		
5	Belum adanya sistem informasi Kepegawaian yang terintegrasi	Infrastruktur pendukung pelaksanaan manajemen Kepegawaian berbasisi tekhnologi yang membutuhkan biaya besar		

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah 2018

26) Penelitian dan Pengembangan

Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.76.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1	Kurangnya perhatian terhadap kegiatan - kegiatan kelitbangan	Rendahnya Capaian kinerja urusan kelitbangan	Perencanaan kegiatan-kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah	
2	Rendahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelitbangan	Rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sebagai wujud implementasi inovasi di daerah	Peningkatan pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelitbangan	
3	Minimnya kapasitas sumber daya manusia (ASN) urusan kelitbangan	Rendahnya kualitas hasil dokumen kelitbangan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN urusan kelitbangan	

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

27) Pengawasan

Layanan Urusan Pengawasan menjadi Inspektorat Daerah dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.77.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Pengawasan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu

Ket : ☐ *= data belum tersedia*

28) Sekretariat Dewan

Layanan Urusan Sekretariat Dewan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dengan identifikasi masalah beserta gambaran solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.78.Identifikasi Masalah dan Solusi Urusan Sekretariat Dewan

No	Permasalahan Masa Lalu	Permasalahan Masa Depan	Gambaran Solusi	Ket
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber: Sekretariat Dewan

Ket : ☐ = data belum tersedia

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh keselarasan kebijakan Pemerintah Pusat, Regional serta Daerah dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta isu dan permasalahan yang berkembang di daerah.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Adapun Arah kebijakan umum pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**
   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan UMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
2. **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan**. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintregasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan**. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan yang semuanya dilaksanakan secara terintregasi dan dengan meningkatkan peran kerja sama Pemerintah Swasta.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam da perubahan iklim**. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh**. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien, meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatntya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.** Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkian kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun

kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJM diatas, dalam RKP Nasional tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang dijadikan prioritas nasional, yaitu:

1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2) Pengurangan Kesenjangan antar Wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3) Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produksi lainnya
4) Pemanfaatan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5) Stabilitas keamanan Nasional dan kesuksesan Pemilu.

Adapun Target dan Sasaran Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2020 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wajib ikut serta dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3% – 5,5%
2. Laju inflasi secara nasional berkisar antara 2,0% – 4,0%
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5% - 12,64%
4. IPM menjadi 72.5
5. Rasio gini menjadi 0.375 – 0.380
6. Tingkat Pengangguran terbuka 4,8% - 5,1%

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan kebijakan ekonomi ditingkat regional maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif. Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
3. Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik;

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur;
2. Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan provinsi;
3. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan *micro finance* pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru;
4. Penguatan pendidikan vokasi dalam kerangka *link* and *mach* dengan dunia usaha dan industri;
5. Perbaikan pelayanan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan pada 1.000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan;
6. Akselerasi hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumberdaya alam (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) secara ekologis;
7. Pemantauan dan pengen-dalian pencemaran lingkungan secara terkor-dinasikan antar pemangku kepentingan;
8. Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga ditetapkan sasaran dan target pokok untuk tahun 2020 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,40% - 7,80%.
2. Inflasi diprediksi pada kisaran 3,0% – 1,0%.
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,46%.
4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sekitar 4,97%.
5. Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan angka Gini Rasio dapat menurun dari 0,385 menjadi 0,376.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Luwu

Selanjutnya, dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi di tingkat Pusat dan Regional serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, pelaksanaan pembangunan tahun 2020 Kabupaten Luwu mengambil tema **Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Membangun Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah.** Dengan tema tersebut disusun kebijakan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2020 yang diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,6 - 7,0% diatas dari target Pertumbuhan Ekonomi untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan target Nasional.

2. Melalui upaya peningkatan koordinasi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, maka Inflasi Kabupaten Luwu yang melekat pada perhitungan Inflasi Kota Palopo dan beberapa Kabupaten Lainnya diprediksi pada kisaran 4,0 %.
3. Angka kemiskinan diprediksi hanya tinggal 12,64%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Kabupaten Luwu mengalami tren yang fluktuatif sehingga diprediksi dinilai 3,90% untuk tahun 2020.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara. Pada tahun 2020 kebijakan keuangan daerah Kabupaten Luwu secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi pemerintahan daerah dengan mengacu pada pendekatan *Money Follow Program* dengan mengedepankan perencanaan yang terintegrasi penganggaran;
2. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Optimalisasi dan Ekstensifikasi PAD melalui PBB dan Pajak serta Retribusi lainnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah;
3. Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka memperbesar belanja langsung yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi layanan publik meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan, serta mengefektifkan belanja tidak langsung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah maupun belanja bantuan sosial;
4. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah secara garis besar adalah dipergunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan penerimaan kembali dana bergulir;
5. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka penyertaan modal setelah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah teralokasikan, serta pengeluaran dana bergulir.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selain diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan,

perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah, selain itu komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah juga sangat diperlukan, sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Luwu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Luwu Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi/ Target pada Tahun 2019	Proyeksi/ Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**95.468.866.028,99**	**109.238.040.728,60**	**102.180.000.000,00**	**107.289.000.000,00**	**114.469.875.000,00**
1.1.1	Pajak Daerah	18.990.358.154,00	24.973.015.036,00	17.367.500.000,00	18.235.875.000,00	22.720.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	43.080.541.420,77	7.265.936.374,00	8.962.500.000,00	9.410.625.000,00	9.099.875.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4.991.723.746,00	5.855.148.706,70	5.800.000.000,00	6.090.000.000,00	5.400.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	28.406.242.708,22	71.143.940.611,90	70.050.000.000,00	73.552.500.000,00	77.250.000.000,00
1,2	**Dana Perimbangan**	**994.067.307.808,00**	**905.261.283.915,00**	**930.191.071.000,00**	**976.700.624.550,00**	**1.059.454.234.000,00**
1.2.1	Dana Hasil Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.007.459.392,00	17.232.157.095,00	18.375.505.000,00	19.294.280.250,00	14.970.394.000,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	689.096.791.000,00	676.991.576.000,00	680.212.384.000,00	714.223.003.200,00	735.958.910.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	280.963.057.416,00	211.037.550.820,00	231.603.182.000,00	243.183.341.100,00	308.524.929.000,00
1,3	**Lain lain Pendapatan yang Sah**	**307.589.759.828,40**	**81.837.488.297,00**	**287.937.370.000,00**	**302.334.238.500,00**	**337.348.175.148,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.504.626.849,00	9.647.766.031,00	44.144.000.000,00	46.351.200.000,00	59.979.381.200,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	45.089.350.771,40	43.883.977.566,00	43.050.000.000,00	45.202.500.000,00	45.650.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus	240.943.979.074,00	21.814.997.500,00	191.359.370.000,00	200.927.338.500,00	225.067.193.948,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.051.803.134,00	6.490.747.200,00	9.384.000.000,00	9.853.200.000,00	6.651.600.000,00
	Jumlah pendapatan	**1.397.125.933.665,39**	**1.096.336.812.940,60**	**1.320.308.441.000,00**	**1.386.323.863.050,00**	**1.511.272.284.148,00**

Sumber : BPKD Kab. Luwu 2019

Tabel 3.2.Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi/ Target pada Tahun 2019	Proyeksi/ Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	**Belanja Tidak Langsung**					
2.1.1	Belanja Pegawai	517.105.808.377,00	472.020.207.856,00	493.227.391.240,00	517.888.760.802,00	546.535.543.332,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	6.170.300.000,00	21.977.265.300,00	53.589.953.850,00	56.269.451.542,50	17.863.473.104,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	226.650.000,00	371.750.000,00	567.500.000,00	595.875.000,00	1.099.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.061.158.638,00	2.586.252.888,00	2.633.000.000,00	2.764.650.000,00	3.181.987.500,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	199.423.567.320,00	233.989.947.320,00	237.135.833.778,00	248.992.625.466,90	276.082.489.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	192.795.435,00	166.669.102,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00	3.000.000.000,00
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**728.180.279.770,00**	**731.112.092.466,00**	**788.653.678.868,00**	**828.086.362.811,40**	**847.762.492.936,00**
2.2	**Belanja Langsung**					
2.2.1	Belanja Pegawai	17.647.715.177,00	19.385.715.500,00	11.124.353.000,00	11.680.570.650,00	9.497.687.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	349.671.234.506,00	298.286.399.345,00	330.920.403.273,00	347.466.423.436,65	363.610.945.516,00
2.2.3	Belanja Modal	385.520.977.399,00	219.322.036.441,00	200.870.189.496,00	210.913.698.970,80	501.276.757.782,00
C	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**752.839.927.082,00**	**536.994.151.286,00**	**542.914.945.769,00**	**570.060.693.057,45**	**874.385.390.798,00**
D	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**1.481.020.206.852,00**	**1.268.106.243.752,00**	**1.331.568.624.637,00**	**1.398.147.055.868,85**	**1.722.147.883.734,00**

Sumber : BPKD Kab. Luwu 2019

Tabel 3.3.Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	Proyeksi/ Target pada Tahun 2019	Proyeksi/ Target pada Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	153.165.357.869,10	59.309.284.679,49	16.400.183.635,00	17.220.192.816,75	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	5.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	95.427.720,00	1.658.400,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**153.266.570.589,10**	**59.310.943.079,49**	**16.400.183.635,00**	**17.220.192.816,75**	**200.000.000.000,00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.500.000.000,00	5.775.000.000,00	4.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	693.491.886,00	29.445.129.914,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.693.491.886,00**	**36.445.129.914,00**	**5.500.000.000,00**	**5.775.000.000,00**	**4.000.000.000,00**
					0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**145.573.078.703,10**	**22.865.813.165,49**	**10.900.183.635,00**	**11.445.192.816,75**	**4.000.000.000,00**

Sumber : BPKD Kab. Luwu 2019

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Nasional tersebut adalah ***"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"***. Sehingga dalam mewujudkan Visi tersebut lahirlah 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sejalan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah mewujudkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yakni ***"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI".***

Adapun sasaran rumusan Visi tersebut dijabarkan pada 3 (Tiga) pokok visi yang menjadi pilar utama dengan penjelasan sebagai berikut :

- ***Maju mengandung makna*** Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- ***Sejahtera mengandung makna*** Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara

berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.

- ***Mandiri mengandung makna*** Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- ***Religi mengandung makna*** Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Adapun Misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan Dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan mayarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius;
7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan serta Penanggulangan Bencana.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu visi pembangunan Kabupaten Luwu adalah **Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi**. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, selanjutnya telah ditetapkan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, adapun setiap misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **T1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP.
- ✓ S1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Opini Laporan Keuangan.
- ✓ S1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. **T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator Indeks Pendidikan.
- ✓ S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kesehatan.

3. **T3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan**

Tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah, dengan indikator Persentasi Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap.
- ✓ S3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar, dengan indikator Persentase penduduk berakses air minum dan Rasio jaringan irigasi.
- ✓ S3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

4. **T4. Meningkatnya perekonomian daerah**

Tujuan meningkatnya perekonomian daerah, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan indikator PDRB Perkapita dan Indeks Gini.
- ✓ S4.2. Mengembangkan destinasi wisata, dengan indikator Jumlah obyek wisata yang dikembangkan.
- ✓ S4.3. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. **T5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat**

Tujuan meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S5.1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.

6. **T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius**

Tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S6.1. Meningkatnya upaya penyebarluasanan ajaran agama dengan indikator Jumlah kader mubaligh muda (orang) dan Presentase kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan.

7. **T7. Meningkatkan kemandirian Desa**

Tujuan meningkatkan kemandirian Desa, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S7.1. Berkembangnya Perekonomian Desa, dengan indikator Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional.

8. **T8. Meningkatkan nilai investasi**

Tujuan meningkatkan nilai investasi, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S8.1. Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi dan Persentase wirausaha muda.

9. **T9. Meningkatnya produk hukum daerah**

Tujuan meningkatkan kesadaran hukum, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S9.1. Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum, dengan indikator Cakupan penegakan dan perlindungan hukum
- ✓ S9.2. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.

10. **T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

Tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- ✓ S10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH.

S10.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Tabel 4.1.Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatanan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan.
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan		
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman
	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	
Misi 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;		
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Penanggulangan kemiskinan
	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis		
Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius		
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya
Misi 7 : Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Meningkatkan Kemandirian Desa	Berkembangnya Perekonoman Desa	Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
Misi 8 : Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan		
Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik		
Meningkatnya produk hukum daerah	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu strategis Kabupaten Luwu yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
4. Pemberdayaan masyarakat desa;
5. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung iklim investasi;
6. Memperteguh kondisi masyarakat yang religius; dan
7. Pemanfaatan sumber daya alam berbasis pembangunan berkelanjutan

Hubungan keterkaitan isu strategis Kabupaten Luwu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Luwu dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SLATAN 2020	ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka kemiskinan	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan; 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah 6. Memperteguh kondisi masyarakat yang religius;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah	2. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	5. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung iklim investasi;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	3. Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan	2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SLATAN 2020	ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU
	Pengembangan destinasi wisata	
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	4. Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	7. Pemanfaatan sumber daya alam berbasis pembangunan berkelanjutan
5. Stabilitas pertahanan dan ketahanan	5. Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan publik	3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2020 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, visi-misi RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan tahun 2020. Tema pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah "**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"**, sedangkan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 adalah **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Selawesi Selatan yang Inklusif"**. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional, kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang maka pelaksanaan pembangunan tahun 2020 Kabupaten Luwu mengambil tema :

"OPTIMALISASI SUMBER DAYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENDAPATAN DAERAH"

Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan Kabupaten tahun 2020 dengan mempertimbangkan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah, sehingga dirumuskan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2020 sebagai berikut:

1. **Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**, dilakukan melalui:
   a. Meningkatkan pelayanan publik dengan membangun pemerintahan yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, pembangunan berbasis kinerja melalui sistem manajemen penguatan proses perencanaan,

penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP, meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin dan penataan ASN;

c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja, peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear governmert*.

2. **Optimalisasi daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas,** dilakukan melalui upaya:
   a. Meningkatkan konektifitas infrastruktur melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dalam Kabupaten Luwu serta wilayah perbatasan;
   b. Meningkatkan pemerataan sarana prasarana dasar dan ekonomi melalui peningkatan jaringan air minum layak berbasis Kawasan dan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan dan pusat jasa lainnya;
   c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah kecamatan yang telah *dizonasi* berdasarkan potensi, yang diwujudkan dengan pembangunan Kawasan industry, serta melanjutkan pembangunan jalan lingkar dalam Kota Belopa, serta pengembangan Kawasan perdesaan.
3. **Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat,** dilakukan melalui upaya-upaya:
   a. Memperbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan melalui meningkatkan kualifikasi dan komptensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan Pendidikan, serta peningkatan pengembangan Pendidikan inklusi;
   b. Meningkatkan upaya *promotive* dan *preventif* lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah *open defecation free* (tidak buang air besar sembarangan;
   c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program Pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*, mendorong peningkatan keterampian dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi), memperluas akses informasi Pendidikan kejuruan dan

vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja kedepan, mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, mengembangkan budaya inovatif dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4. **Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan,** dilakukan melalui upaya-upaya:
   a. Menyediakan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, akses rumah layak, layanan akses dasar, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik, penanganan Kawasan permukiman kumuh, akses Pendidikan, kesehatan, dan pangan, perlindungan sosial bagi masyarkat dan fasilitas kepemilikan sertifikat lahan;
   b. Meningkatkan *sustainable livehood* melalui fasilitas akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar, peningkatan *start up* wirausaha baru, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenag kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   c. Memperkuat basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang intens dan berkelanjutan serta pelibatan swasta dan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan.

5. **Optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan Kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata*,*** melalui upaya:
   a. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui; peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknollogi tepat guna dibidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*);
   b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan ketermapian nelayan, penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (Kapal dan TPI), penyediaan benih dan pakan ikan, dan penyediaan lahan budidaya perikanan;
   c. Mendorong pariwisata berbasis komunitas/masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi wisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata, meningkatkan aksesbilitas menuju daerah tujuan wisata;
   d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industry kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah *diversifikasi* produk, mengembangkan inovasi teknologi, peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi, mendorong pengembangan industry besar dengan pembangunan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar, peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar wilayah serta fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;

e. Menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan), perbaikan sistem dan layanan perijinan, kebijakan investasi padat karya, pengembangan *digital investment promotion*, serta pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan daerah.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas 4. Pengentasan kemiskinan 5. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa	1. Peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka kemiskinan	1. Pembangunan SDM meliputi sektor : Pendidikan, Kesehatan, dan Kualitas ASN 2. Penurunan angka kemiskinan	1. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	1. Menyediakan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, akses rumah layak, layanan akses dasar, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik, penanganan Kawasan permukiman kumuh, akses Pendidikan, kesehatan, dan pangan, perlindungan sosial bagi masyarkat dan fasilitas kepemilikan sertifikat lahan; 2. Meningkatkan *sustainable livehood* melalui fasilitas akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar, peningkatan *start up* wirausaha baru, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenag kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat; 3. Memperkuat basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang intens dan berkelanjutan serta pelibatan swasta dan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan.
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah	1. Perluasan infrastruktur dasar 2. Penguatan infrastruktur	2. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	1. Penguatan kualitas infrastruktur Darat, Laut, Udara dan	1. Optimalisasi daya saing daerah didukung dengan penyediaan	1. Meningkatkan konektifitas infrastruktur melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan antar

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
	kawasan tertinggal dan ketahanan bencana 3. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Peningkatan infrastruktur perkotaan 5. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi		Pembukaan daerah terisolir	infrastruktur yang berkualitas	kecamatan dalam Kabupaten Luwu serta wilayah perbatasan; 2. Meningkatkan pemerataan sarana prasarana dasar dan ekonomi melalui peningkatan jaringan air minum layak berbasis Kawasan dan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan dan pusat jasa lainnya; 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah kecamatan yang telah *dizonasi* berdasarkan potensi, yang diwujudkan dengan pembangunan Kawasan industri, serta melanjutkan pembangunan jalan lingkar dalam Kota Belopa, serta pengembangan Kawasan perdesaan.
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM 2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor rill 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	3. Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru dan Pengembangan destinasi wisata	1. Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya alam 2. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru 3. Pembukaan lapangan kerja baru	2. Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	1. Memperbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan melalui meningkatkan kualifikasi dan komptensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan Pendidikan, serta peningkatan pengembangan Pendidikan inklusi;

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
	4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi		4. Pengembangan destinasi pariwisata		2. Meningkatkan upaya *promotive* dan *preventif* lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah *open defecation free* (tidak buang air besar sembarangan; 3. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program Pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*, mendorong peningkatan keterampian dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi), memperluas akses informasi Pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja kedepan, mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, mengembangkan budaya inovatif dan mendorong kebijakan afirmatif untuk

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
					pemanfaatan tenaga kerja lokal.meningkatkan kualifikasi dan komptensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan Pendidikan, serta peningkatan pengembangan Pendidikan inklusi;
6. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan 2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air 3. Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT) 4. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan	4. Peningkatan ketahanan pangan, sumber daya air, dan pelestarian lingkungan hidup	1. Peningkatan ketahanan pangan 2. Sumber daya air 3. Pelestarian lingkungan hidup 4. Pemenuhan Universal Acces (100-0-100) / air minum, kawasan kumuh dan sanitasi. 5. Pemenuhan irigasi pertanian 6. Penyediaan listrik pada daerah terpencil	3. Optimalisasi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan Kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui; peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknollogi tepat guna dibidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*); 2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan ketermapian nelayan, penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (Kapal dan TPI), penyediaan benih dan pakan ikan, dan penyediaan lahan budidaya perikanan;

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
	5. Penguatan ketahanan bencana				3. Mendorong pariwisata berbasis komunitas/masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi wisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata, meningkatkan aksesbilitas menuju daerah tujuan wisata; 4. Meningkatkan produksi dan produktivitas industry kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah *diversifikasi* produk, mengembangkan inovasi teknologi, peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi, mendorong pengembangan industry besar dengan pembangunan kawasan industri, serta kemitraan UMKM dan industri besar, peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar wilayah serta fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk UMKM; 5. Menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
					perijinan), perbaikan sistem dan layanan perijinan, kebijakan investasi padat karya, pengembangan *digital investment promotion*, serta pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan daerah.
7. Stabilitas pertahanan dan ketahanan	1. Penguatan kemampuan pertahanan 2. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional 3. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi 4. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut 5. Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas	5. Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi dan Inovasi pelayanan publik	1. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat 2. Reformasi birokrasi 3. Pemantapan pelayanan satu pintu (Mall pelayanan)	6. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan pelayanan publik dengan membangun pemerintahan yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik; 2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, pembangunan berbasis kinerja melalui sistem manajemen penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP, meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin dan penataan ASN; 3. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN LUWU
					perbaikan tata laksana organisasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja, peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear governmert*.

4.2.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Teknokrat Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Sasaran Pembangunan tahun 2020 Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Pembanguan
Misi 1 Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif**	***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah***	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas)
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas)
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)
			Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
			Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas)
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)
			Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN
			Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur
			Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)
Misi 2 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**	***Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat***	Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas)
			Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)
			Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)
Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	**Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan**	***Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah***	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)
			Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)
			Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Pembanguan
		Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)
		Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)
			Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)
			Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)
Misi 4 Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja	**Meningkatnya perekonomian daerah**	***Meningkatnya pendapatan masyarakat***	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)
			Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Mengembangkan destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)
		Menurunnya jumlah pengangguran	Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Prioritas)
Misi 5 Mewujudkan ketahan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis	**Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat**	***Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis***	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan (Prioritas)
			Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)
Misi 6 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius	**Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius**	***Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan***	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)
			Program Peningkatan Kapasitas Legislasi (Prioritas)
Misi 7 Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa	**Meningkatkan kemandirian Desa**	***Berkembangnya kemandirian desa***	Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)
			Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)
	Meningkatkan nilai investasi		Program Penyelenggaraan E-Government (Prioritas)

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Pembanguan
Misi 8 Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan		***Meningkatnya realisasi investasi***	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas)
Misi 9 Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong publikasi publik	**Meningkatnya produk hukum daerah**	***Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum***	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Prioritas)
			Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Prioritas)
		Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)
		Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)
			Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)
Misi 10 Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**	***Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)
		Meningkatnya kualitas menejemen pengelolaan bencana	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)
			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun pertama kepemimpinan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak, SE, sehingga Pendanaan bagi OPD difokuskan pada Program dan Kegiatan untuk langkah awal pencapaian Visi dan Misi Bupati periode 2019-2024. Pemberian pagu indikatif kepada OPD selain berdasarkan pada Program Kegiatan pada tahun pendanaan dalam RPJMD juga mengacu pada kegiatan yang menjadi kesepakatan pada Musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten. Adapun pagu indikatif per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.Program dan Pagu Indikatif per OPD Tahun 2020 (*Dalam Ribu Rupiah*)

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1				**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					
1	**01**			**Pendidikan**					
1	**01**	**01**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**					**110.169.228**
1	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.073.675
1	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	49,54	58,49	766.171
1	01	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	87.000
1	01	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	%	50,00	100,00	112.760
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	50,00	-
1	01	01	15	Program Pengembangan Pendidikan Non Formal (Prioritas)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	35,15	60,04	335.000
1	01	01	16	Program Pembinaan Sekolah Dasar (Prioritas)	APM SD/MI/Paket A	%	95,51	98,23	29.985.478
1	01	01	17	Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Prioritas)	APM SMP/MTs/Paket B	%	80,07	83,64	21.860.594
1	01	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	Persen	87,05	89,23	4.842.050
1	01	01	22	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang telah melaksanakan menajemen pendidikan yang baik	Persen	0,00	0,00	51.106.500
1	**02**			**Kesehatan**					
1	**02**	**01**		**Dinas Kesehatan**					**110.438.542**
1	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	1.203.770
1	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	80,00	80,00	377.100
1	02	01	07	Program peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang disiplin	%	100,00	100,00	108.000

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	02	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	100.000
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%			
1	02	01	15		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.	%	0,00	85,00	7.654.262
1	02	01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan Persalinan yang ditolong Tenaga Kesehatan	%	69,84	85,00	54.996.395
1	02	01	11		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan menurunya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec.	0,00	22,00	371.990
1	02	01	12		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Manajemen dan Informasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	Tahun	0	1	340.950
1	02	01	16		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Prioritas)	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0,00	80,00	45.286.075
1	**02**	**02**			**RSUD Batara Guru**					**66.572.663**
1	02	02	34		Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase peningkatan pelayanan dan kerjasama RS	%	0,00	45,00	19.572.663
1	02	02	35		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD	Rasio pembiayaan operasional rumah sakit (Cost Recovery Ratio/CRR)	%	76,00	80,00	47.000.000
1	**03**				**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	**03**	**01**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**290.252.765**
1	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	2.346.735
1	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	81,25	85,00	3.689.592
1	03	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	197.960
1	03	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	229.070
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	80,00	100,00	-

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03	01	14	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	58,11	61,83	174.554.004
1	03	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Tingkat mobilitasi (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,86	0,86	4.250.000
1	03	01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	km	1.380,00	1392,96	12.900.000
1	03	01	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan Pengendali Banjir (Prioritas)	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/Talud/Bonjong dan Pengendali Banjir	meter	1.445,00	700,00	1.500.000
1	03	01	18	Program Preservasi Jalan dan Jembatan (Prioritas)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24	9.400.000
1	03	01	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	4.605.000
1	03	01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (Prioritas)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Persen	36,33	37,24	27.014.729
1	03	01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (Prioritas)	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	%	80,04	80,96	31.396.352
1	03	01	31	Program Pengembangan Kota Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditata	Ha	26,47	34,31	8.454.223
1	03	01	32	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Titik	0,00	0,00	2.220.000
1	03	01	33	Program Pembinaan Jasa Konstruksi (Prioritas)	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	0,00	100,00	185.100
1	03	01	34	Program Pembangunan, Peningkatan, Pengawasan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	unit	0,00	4,00	7.310.000
					Persentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	0,00	100,00	
1	**04**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	**04**	**01**		**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**					**56.352.946**
1	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.151.904
1	04	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	68,44	100,00	474.172

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	04	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	68.700
1	04	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	60,00	100,00	300.000
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00	
1	04	01	15		Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman (Prioritas)	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	%	0,00	15,85	30.200.000
0	0	0	0			Persentase lingkungan kawasan permukiman perdesaan yang tertata	%	0,00	4,83	
0	0	0	0			Persentase lingkungan kawasan permukiman perkotaan yang tertata	%	0,00	20,00	
1	04	01	16		Program Pengembangan Perumahan (Prioritas)	Persentase rumah layak huni	%	20,04	20,54	8.634.420
1	04	01	17		Program Pembangunan dan Penataan PSU (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan PSU	Persen	n.a	100,00	15.523.750
1	**05**				**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**					
1	**05**	**01**			**Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat**					**2.162.078**
1	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	0	0,00	100,00	1.047.270
1	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	0	0,00	65,00	35.000
1	05	01	07		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	131.260
1	05	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	0	0,00	100,00	121.578
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	0		0,00	
1	05	01	15		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	0,00	100,00	408.700
1	05	01	17		Program Bina Ideologi dan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	0	0,00	100,00	207.450
1	05	01	22		Program Pembinaan Organisasi Sosial Politik	cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	0	0,00	100,00	210.820

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**05**	**02**			**Satuan Polisi Pamong Praja**					**3.797.468**
1	05	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	996.529
1	05	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	64,87	85,52	368.100
1	05	02	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	141.350
1	05	02	08		Program Penigkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	75.000
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		25,00	100,00	
1	05	02	23		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan (Prioritas)	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95	656.847
1	05	02	24		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100,00	100,00	100.860
1	05	02	25		Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Linmas	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0	0,00	108.727
1	05	02	26		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100,00	100,00	1.350.056
1	**05**	**03**			**Dinas Pemadam Kebakaran**					**3.894.413**
1	05	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	806.263
1	05	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	persen	0,00	85,00	274.000
1	05	03	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	45.190
1	05	03	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	48.960
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
1	05	03	30		Program Pencegahan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana	Cakupan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	0,00	0,00	420.000

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	05	03	31		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Prioritas)	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	0,00	100,00	2.200.000
0	0	0	0		Program Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	0	0,00	0,00	100.000
1	06				**Sosial**					
1	**06**	**01**			**Dinas Sosial**					**3.161.459**
1	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	807.041
1	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	285.950
1	06	01	07		Program peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	107.550
1	06	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	62.765
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	
1	06	01	15		Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	0,00	89,00	532.613
1	06	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	0	0	100	195.904
1	06	01	18		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Prioritas)	Persentase PMKS menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	0,00	100,00	1.114.872
1	06	01	21		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan	0	0,00	80,00	54.765
1	**06**	**02**			**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**					**2.579.540**
1	06	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	913.040
1	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	persen	0,00	0,00	182.500
1	06	02	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	45.190

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	02	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	41.560
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	
1	06	02	23	Program Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0,00	0,00	1.247.250
1	06	02	28	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Penanggulangan Bencana (Prioritas)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	150.000
2				**Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**01**			**Tenaga Kerja**					
2	**01**	**01**		**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**					**1.919.372**
2	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	642.764
2	01	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100,00	100,00	260.500
2	01	01	07	Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	60,00	32,00	123.384
2	01	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	33.400
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	
2	01	01	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Prioritas)	Cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi	%	41,00	100,00	485.780
2	01	01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Prioritas)	Perluasan Kesempatan kerja sektor formal maupun informal	%	4.04	3,70	214.079
2	01	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha	%	100,00	100,00	159.465
2	**02**			**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
2	**02**	**01**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**1.221.985**

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	02	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	579.134
2	02	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	70,00	100.000
2	02	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	64.190
3	02	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	0,00	53.360
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	
2	02	01	20		Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	n.a	35,71	173.139
2	02	01	21		Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	0,00	52,50	100.000
2	02	02	22		Program Penguatan Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu	0	0,00	100,00	152.162
2	**03**				**Pangan**					
2	**03**	**01**			**Dinas Ketahanan Pangan**					**1.855.399**
2	03	01	;01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	815.950
2	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	59,50	68,25	128.792
2	03	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	79.790
2	03	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	108.858
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	03	01	15		Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/ Perkapita/ Perhari	0,00	3.400,00	257.861
2	03	01	16		Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	Pak	0,00	100,00	225.628
2	03	01	17		Program Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Tingkat Komsumsi Protein	Gr/ Kapita/ Hari	0,00	65,00	238.521
2	04				**Pertanahan**					
2	**04**	**01**			**Dinas Pertanahan**					**6.315.177**
2	04	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	799.657
2	04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	35,02	62,99	200.000
2	04	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	100.000
2	04	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	74.600
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00	
2	04	01	17		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan	Konflik	100,00	100,00	280.750
2	04	01	19		Program Penataan Pertanahan (Prioritas)	Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	%	0,00	100,00	4.860.170
2	**05**				**Lingkungan Hidup**					
2	**05**	**01**			**Dinas Lingkungan Hidup**					**3.991.866**
2	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	560.166
2	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	60,00	229.000
2	05	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	50.000

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	05	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	100.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	0,00	
2	05	01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	0,00	50,00	300.000
2	05	01	25	Program Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan	Cakupan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	0,00	0,00	252.700
2	05	01	26	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,84	87,99	2.500.000
2	**06**			**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
2	**06**	**01**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**2.883.623**
2	06	01	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	541.158
2	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	59,01	65,00	239.200
2	06	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	74.000
2	06	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	28.800
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00	
2	06	01	16	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber KK	%	0,62	0,65	1.326.130
2	06	01	17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,15	0,20	47.000
2	06	01	18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah kedalam database	%	100,00	100,00	384.165
2	06	01	19	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	0	0,00	100,00	243.170
2	**07**			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2	**07**	**01**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**					**3.226.824**
2	07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.450.334

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	07	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	68,94	78,11	131.300
2	07	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	95.190
2	07	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	50.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00	-
2	07	01	20	Program Pembinaan Pemerintahan Desa (Prioritas)	Persentase desa yang mampu melaksanakan tata laksana pemerintahan desa secara tertib	%	n.a.	100,00	500.000
2	07	01	21	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama Desa	Skor rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	n.a	0,00	300.000
2	07	01	22	Program Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Persentase LPM yang mandiri	%	0,00	0,00	300.000
2	07	01	23	Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (Prioritas)	Jumlah BUMDes Bersama	4	0,00	5,00	400.000
2	**08**			**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
2	**08**	**01**		**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**7.097.368**
2	08	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	708.873
2	08	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	69,31	79,75	191.500
2	08	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	17.500
2	08	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	7.211
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100,00	
2	08	01	15	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	0	0,00	100,00	2.480.212

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
2	08	01	16	Program Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0,00	22,35	2.471.983
2	08	01	0	Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0,00	18,00	1.220.088
2	**09**	**0**		**Perhubungan**					
2	**09**	**01**		**Dinas Perhubungan**					**2.093.398**
2	09	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100,00	100,00	812.293
2	09	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	318.150
2	09	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	64.640
2	09	01	08	Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	30.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
2	09	01	19	Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas	0	0,00	75,00	242.100
2	09	01	17	Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara (Prioritas)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	411.055	415.055	376.215
2	09	01	18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan Pengembangann sarana dan Prasarana Transportasi	0	0,00	80,00	250.000
2	**10**			**Komunikasi dan Informatika**					
2	**10**	**01**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian**					**2.903.283**
2	10	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0,00	100,00	627.846
2	10	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	37,58	73,04	305.778
2	10	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	75.000

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	10	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	49.643
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00	
2	10	01	19	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	0	0	0,00	0,00	101.280
2	10	01	20	Program Penyelenggaraan E-Government (Prioritas)	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	%	100,00	0,00	1.337.716
2	10	01	21	Program Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informatika	0	0	0,00	0,00	406.020
2	**11**			**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
2	**11**	**01**		**Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**					**1.349.567**
2	11	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	634.179
2	11	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0	0,00	44.440
2	11	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	47.470
2	11	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	50.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
2	11	01	19	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	0,00	0,00	144.885
2	11	01	20	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro (Prioritas)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35	428.594
				Penanaman Modal					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					**1.678.474**
2	12	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	795.534
2	12	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	58,24	72,42	76.300

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	12	01	07	Program peningkatan disiplin aparatur dan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	112.500
2	12	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	48.828
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
2	12	01	18	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas)	Jumlah kegiatan Promosi dan Kerja Sama	%	0,00	85,00	152.000
2	12	01	19	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	investor	13,00	13,00	84.000
2	12	01	20	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Prioritas)	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasrkan SOP	%	50,00	65,00	273.480
2	12	01	0	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pengendalian dan pengawasa perizinan	%	0,00	75,00	135.832
2	**13**	**0**		**Kepemudaan dan Olahraga**					
2	**13**	**01**		**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**					**1.673.115**
2	13	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	819.565
2	13	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	75.000
2	13	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	52.890
2	13	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	49.240
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00	
2	13	01	22	Program Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan	%	n.a	100,00	244.740
2	13	01	23	Program Pengembangan Pemuda	Persentase pengurus organisasi pemuda yang telah mendapatkan pembinaan	%	n.a	100,00	104.500
2	13	01	24	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang digemari masyarakat Kabupaten Luwu	cabang olahraga	0,00	0,00	155.000

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	13	01	25	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang menorehkan prestasi untuk Kabupaten Luwu	cabang olahraga	0,00	0,00	172.180
2	**14**			**Statistik**					
2	**14**	**01**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian**					**100.000**
2	14	01	15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik	0	0,00	40,00	100.000
2	**15**			**Persandian**					
2	**15**	**01**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian**					**100.000**
2	15	01	15	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	level	n.a	5,00	100.000
2	**16**			**Kebudayaan**					
1	**01**	**01**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**					**184.830**
2	16	01	17	Program Pengelolaan Budaya Daerah (Prioritas)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah	kali	6	6	184.830
2	**17**			**Perpustakaan**					
2	**17**	**01**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**					**1.192.250**
2	17	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	635.160
2	17	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	%	55,94	75,64	115.236
2	17	01	07	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	%	100,00	100,00	30.000
2	17	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	%	50,00	100,00	11.854
					Persentase Ketersediaan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	-
2	17	01	15	Program Deposit, Akusisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan bahan pustaka	0	0,00	100,00	100.000
2	17	01	16	Program Peningktatan Layanan Perpustakaan dan Kerjasama	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	0,00	0,00	100.000

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	17	01	17		Program Pegembangan Sumber Daya	Persentase Pengunjung Usia Sekolah ke Perpustakaan Umum Daerah	%	0,00	0,00	200.000
					Kearsipan					
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					**100.000**
2	17	01	19		Program Pembinaan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	Presentase Sistem Administrasi Kearsipan yang Memiliki Predikat yang Baik	0	0,00	0,00	100.000
					Urusan Pilihan					
					Kelautan dan Perikanan					
					Dinas Perikanan					**3.358.930**
3	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	861.932
3	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	92,96	96,98	172.761
3	01	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	39.592
3	01	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	0,00	100,00	70.551
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	0,00	100,00	
3	01	01	20		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N.A	0,00	1.250.000
3	01	01	21		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	10,68	11,00	964.096
3	01	01	25		Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Jumlah kelompok nelayan yang berhasil diberdayakan	0	0,00	0,00	200.000
3	**02**				**Pariwisata**					
3	**02**	**01**			**Dinas Pariwisata**					**2.023.595**
3	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	784.619

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	53,88	72,55	233.243
3	02	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100	100	54.934
3	02	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	100.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00	
3	02	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	12.573	13.206	104.737
3	02	01	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tingkat kepuasan pengunjung' atas ketersediaan sarana prasarana obyek wisata	tingkat kepuasan	n.a	cukup	344.063
3	02	01	20	Program Pengembangan Destinasi wisata (Prioritas)	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan secara terpadu	Destinasi	0	6	200.000
3	02	01	21	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Luwu	%	n.a	200	202.000
				Pertanian					6.000
				Dinas Pertanian	**0**				**8.256.044**
3	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	865.197
3	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	71,62	74,33	155.904
3	03	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	75.000
3	03	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	75.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
3	03	01	25	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian (Prioritas)	Persentase kelompok tani yang memperoleh prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	%	0,00	0,00	2.726.532
3	03	01	26	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produksi komunitas tanaman pangan	0,00	%	3,00	1.593.971

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	03	01	27	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	%	0,00	3,00	638.100
3	03	01	28	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Komoditas Perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditi perkebunan	%	0,00	3,00	650.000
3	03	01	29	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan populasi ternak	%	0,00	3,00	450.000
3	03	01	30	Program Peningkatan Sistem Penyuluh Pertanian (Prioritas)	Persentase penyuluh yang meningkat kapasitasnya	%	0,00	20,00	1.026.340
				Perdagangan					
				Dinas Perdagangan					**3.813.161**
3	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	729.321
3	06	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	86,62	92,52	147.885
3	06	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	60.190
3	06	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	56.040
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
3	06	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	75,00	100,00	115.360
3	06	01	18	Program Pembinaan Usaha Perdagangan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha	%	n.a	100,00	404.366
3	06	01	20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan dengan kondisi layak	%	79,16	82,00	2.300.000
				Perindustrian					
				Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian					**300.000**
1	11	01	25	Program Pembinaan dan Pengawasan Industri	0	0	0,00	0,00	300.000
				Transmigrasi					
				Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi					**100.000**
2	01	01	18	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Cakupan Penyelenggaraan Transmigrasi	%	85,00	100,00	100.000

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4				**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**					
4	03			**Pemerintahan**					
4	**03**	**01**		**Sekretariat Daerah**					**34.240.873**
4	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	3.330.128
4	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	100,00	0,00	15.283.100
4	03	01	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	600.000
4	03	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	200.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
4	03	01	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100,00	0,00	3.000.000
4	03	01	28	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan otonomi daerah	%	100,00	0,00	900.000
4	03	01	29	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	1.056.360
4	03	01	30	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	100,00	100,00	3.282.960
4	03	01	31	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Perekonomian	0	100,00	100,00	800.670
4	03	01	32	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam	0	100,00	100,00	925.000
4	03	01	34	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan Sistem SPSE beroprasi	%	80,00	83,00	975.000
					Persentase penyelesaian tender Paket Pekerjaan Tepat waktu	%	100,00	100,00	-
4	03	01	35	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100,00	100,00	900.000

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	03	01	36	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	Cakupan Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	0	0,00	100,00	750.000
					Persentase ASN Sekretariat Daerah dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	
4	03	01	38	Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Cakupan pelayanan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	0	0,00	100,00	2.237.655
4	**04**	**01**	**0**	**Sekretariat DPRD**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**14.318.443**
4	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	2.789.751
4	04	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	91,00	1.627.360
4	04	01	07	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	0,00	100,00	1.076.367
4	04	01	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	50,00	100,00	75.750
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
4	04	01	15	Program Peningkatan Kualitas Peraturan Daerah (Prioritas)	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	%	100,00	100,00	5.872.615
4	04	01	39	Program Penganggaran, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	100,00	100,00	2.876.600
				Kecamatan Bua					**1.593.270**
4	01	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	251.207
4	01	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	35.754
4	01	10	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	10	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.700

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	10	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	10	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	159.749
4	**01**	**11**			**Kecamatan Bassesangtempe**					**430.800**
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	160.085
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	17.675
4	01	10	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	10	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460
4	01	10	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	195.790
4	**01**	**12**			**Kecamatan Walenrang Timur**					**423.000**
4	01	12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	140.340
4	01	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	29.795
4	01	12	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	12	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140
4	01	12	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	195.936
4	**01**	**13**			**Kecamatan Lamasi Timur**					**377.000**

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	131.906
4	01	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	52.924
4	01	13	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	13	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220
4	01	13	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	135.160
4	**01**	**14**			**Kecamatam Ponrang Selatan**					**1.545.270**
4	01	14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	193.900
4	01	14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	36.360
4	01	13	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	14	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.540
4	01	14	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	14	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	168.610
4	**01**	**15**			**Kecamatan Bupon**					**1.527.270**
4	01	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	127.058
4	01	15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	96.758

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	15	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	15	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300
4	01	15	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	15	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	157.294
4	**01**	**16**			**Kecamatan Walenrang Barat**					**350.600**
4	01	16	02		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	145.036
4	01	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	44.036
4	01	16	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	16	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	16.980
4	01	16	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	104.758
4	**01**	**17**			**Kecamatan Walenrang Utara**					**1.498.470**
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	144.228
4	01	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	16.160
4	01	16	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	17	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.380

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	17	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	17	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	191.842
					Kecamatan Lamasi					**1.542.470**
4	01	18	;01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	201.243
4	01	18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	23.068
4	01	18	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	18	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300
4	01	18	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	0	%	100,00	1.089.870
4	01	18	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	171.199
4	**01**	**19**			**Kecamatan Kamanre**					**1.449.270**
4	01	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	178.649
4	01	19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	19.190
4	01	19	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	19	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	19	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	19	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	105.431
4	**01**	**20**			**Kecamatan Bajo Barat**					**374.600**
4	01	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	172.245
4	01	20	;02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	29.290
4	01	20	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	20	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220
4	01	20	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	116.055
4	**01**	**21**			**Kecamatan Belopa**					**4.802.880**
4	01	21	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	214.221
4	01	21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	37.724
4	01	21	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220
4	01	21	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	21	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	4.356.280
4	01	21	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	137.646

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**01**	**22**		**Kecamatan Larompong Selatan**					**411.800**
4	01	22	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	170.180
4	01	22	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	40.304
4	01	22	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	22	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300
4	01	22	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	144.226
4	**01**	**23**		**Kecamatan Larompong**					**2.675.140**
4	01	23	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	184.123
4	01	23	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	25.250
4	01	23	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	23	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.540
4	01	23	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	2.178.140
4	01	23	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	230.297
4	**01**	**24**		**Kecamatan Suli**					**1.463.670**
4	01	24	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	160.590

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	24	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan Kondisi Baik	%	0,00	0,00	35.350
4	01	24	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	24	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.540
4	01	24	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	24	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	121.330
4	**01**	**25**		**Kecamatan Suli Barat**					**1.463.670**
4	01	25	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	161.509
4	01	25	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	33.027
4	01	25	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	25	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140
4	01	25	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	25	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	123.134
4	**01**	**26**		**Kecamatan Belopa Utara**					**1.494.870**
4	01	26	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	230.654
4	01	26	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	19.695

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	26	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	26	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.140
4	01	26	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	26	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	98.521
4	**01**	**27**		**Kecamatan Bajo**					**2.570.740**
4	01	27	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	156.752
4	01	27	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	24.240
4	01	27	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	27	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460
4	01	27	50	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	2.178.140
4	01	26	51	Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	154.358
4	**01**	**28**		**Kecamatan Latimojong**					**389.000**
4	01	28	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	114.130
4	01	28	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	42.420
4	01	28	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	28	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460
4	01	28	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	175.200
4	**01**	**29**			**Kecamatan Ponrang**					**2.615.140**
4	01	29	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	170.357
4	01	29	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	56.560
4	01	29	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	29	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.300
4	01	29	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	2.178.140
4	01	29	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	152.993
4	**01**	**30**			**Kecamatan Walenrang**					**1.516.270**
4	01	30	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	158.570
4	01	30	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	42.420
4	01	30	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	30	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.220

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	01	30	50		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	%	100,00	100,00	1.089.070
4	01	30	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	169.200
4	**01**	**31**			**Kecamatan Bassesangtempe Utara**					**367.200**
4	01	31	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	156.550
4	01	31	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	%	0,00	0,00	81.628
4	01	31	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	39.790
4	01	31	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan Dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	17.460
4	01	31	51		Program Peningkatan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100,00	100,00	71.772
4	**02**				**Pengawasan**					
4	**02**	**01**			**Inspektorat Daerah**					**6.502.901**
4	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	800.476
4	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%		97,00	800.425
4	02	01	07		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100,00	100,00	37.000
4	02	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	52.480
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
4	02	01	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Prioritas)	Skor LPPD	Angka	2.771	2.885	4.012.520

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	02	01	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Prioritas)	Cakupan SDM Apartaur yang mengikuti pelatihan dan lulus tes auditor	%	0,00	100,00	800.000
4	**03**				**Perencanaan Pembangunan**					
4	**03**	**01**			**Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah**					**5.514.371**
4	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.234.492
4	03	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	92,81	97,43	150.000
4	03	01	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	92,68	100,00	105.490
4	03	01	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	75,00	100,00	123.400
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00	
4	03	01	15		Program Pengembangan Data/ Informasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Data dan informasi pencapaian sasaran RPJMD	dokumen	0	4	547.186
4	03	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Prioritas)	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	%	100,00	100,00	1.434.909
4	03	01	22		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Bidang Ekonomi	%	n.a	100,00	361.726
4	03	01	23		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Sosial dan Budaya	%	n.a	100,00	486.246
4	03	01	24		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	60,00	100,00	298.036
4	03	01	25		Program Kelitbangan Daerah (Prioritas)	Hasil kelitbangan utama	Rekomendasi	0,00	1	772.886
						Hasil kelitbangan pendukung	Rekomendasi	0,00	1	
4	**04**				**Keuangan**					
4	**04**	**05**			**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**					**5.669.445**
4	04	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.730.574

Kode					UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
									Target	Rp
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	04	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	0,00	0,00	456.150
4	04	05	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	307.091
4	04	05	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	93.760
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
4	04	05	40		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran (Prioritas)	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	%	0,00	100,00	1.487.124
4	04	05	41		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	%	85,00	90,00	342.087
4	04	05	42		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi	Perentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	%	0,00	96,00	739.522
4	04	05	43		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah (Prioritas)	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	%	0,00	96,00	513.131
										7
4	**04**	**06**			**Badan Pendapatan Daerah**					**8.872.136**
4	04	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	5.244.506
4	04	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	70,63	78,71	294.314
4	04	06	07		Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	137.927
4	04	06	08		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	75,00	100,00	253.163
						Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	50,00	100,00	
4	04	06	44		Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Prioritas)	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	%	97,19	98,99	1.060.076
4	04	06	45		Program Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	%	90,38	90,38	190.540

Kode				UrusanBidang UrusanProgram	Indikator Program (Outcam)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Anggaran 2020	
								Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	04	06	46	Program Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	%	90,00	90,00	215.960
4	04	06	47	Program Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB	Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	%	0,00	80,00	1.475.650
				Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					**8.893.540**
4	05	09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	1.085.993
4	05	09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	%	74,52	75,06	4.314.800
4	05	09	07	Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN perangkat daerah dengan predikat kinerja baik	%	100,00	100,00	58.490
4	05	09	08	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100,00	100,00	53.000
					Persentase ketersediaan peraturan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	
4	05	09	18	Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	%	n.a	100,00	668.049
4	05	09	19	Program Penyelenggaraan Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur	Persentase penempatan SDM sesuai kompetensi	%	n.a	0,00	906.360
4	05	09	20	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai eselon	%	n.a	100,00	1.806.849
Jumlah									**822.013.472**

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk tahun 2020 IKU dan IKK ditetapkan berdasarkan pada indikator kinerja dan aspek fokus pada RPJMD 2019-2024 yang mana telah dikembangkan berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Standar Pelayanan Minimum yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Adapun indikator Kinerja sekaligus menjadi target penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu untuk Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada Bab II, Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.

Tabel 6.1.Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Tahun 2020

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2020
Indeks Reformasi Birokrasi	*Skor Indeks*	Cukup	Cukup
Nilai SAKIP	*Skor Indeks*	C	C
Opini LKPD dari BPK RI	*Opini*	WTP	WTP
Indeks Kepuasan Publik	*Skor Indeks*	na	Kurang Baik
Indeks Pembangunan Manusia	*Skor Indeks*	69,37	70,40
Indeks Pendidikan	*Skor Indeks*	63,19	63,72
Indeks Kesehatan	*Skor Indeks*	76,31	76,55
Indeks Layanan Infrastruktur	*Skor indeks*	n.a	Cukup
Persentasi Jalan dalam kondisi mantap	*%*	21,84	23,87
Persentase penduduk berakses air minum	*%*	**80,00**	**84,09**
Rasio jaringan irigasi	*n.a*	59,94	63,00
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	*%*	75,45	76,00
Pertumbuhan Ekonomi	*Angka*	**7,21**	**7,30**
PDRB Perkapita	*Juta Rp*	13,97	29,87
Indeks Gini	*Angka*	0,36	**0,36**
Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	*Obyek wisata*	0	**1**
Tingkat Pengangguran Terbuka	*Angka*	4,47	**4,36**
Skor Pola Pangan Harapan	*Skor*	9	**9**
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	*%*	7,04	7,20
Angka kriminalitas	*Per 10.000 penduduk*	4,00	3,20
Jumlah Kader Muballiq Muda yang berhasil di bina	Org	0	40
Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	*%*	27,50	25,00
Persentase desa berstatus mandiri	*%*	40,00	60,00
Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional	*Unit*	n.a	4
Nilai investasi PMA dan PMDN	*Miliar Rp*	n.a	17,11

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2020
Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	*Perusahaan*	n.a	**13**
Persentase wirausaha muda	*% jumlah penduduk*	0,5	1
Cakupan ketersediaan produk hukum daerah	*n.a*	80,00	81,00
Cakupan penegakan dan perlindungan hukum	*%*	100	100
Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,61 (2017)	61,95
Indeks kualitas lingkungan hidup	*Skor indeks*	Na	Cukup
Persentase Pembinaan dan Pengawasan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	%	39,22	50,00
Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	%	NA	≤30,00

Tabel 6.2. Penetapan Indikator Kinerja DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Tahun 2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
	Pertumbuhan PDRB	%	6,42	7,11
	Laju inflasi	%	3,50	3,96
	PDRB per kapita	Juta Rp	36,60 (2017)	38,03
	Indeks Gini	%	0,35	0,360
	Tingkat Kemiskinan	%	13,36	12,86
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	69,60	70,04
	Angka melek huruf	%	95,95	98,35
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,97	8,05
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,30	13,68
	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,84	69,98
	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03
	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,90	5,32
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	64,89	68,18
	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,47	4,1
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	56,07	58,91
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	40,12
	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,08	8,27
	Opini BPK		WTP	WTP
	Penguatan cadangan pangan		44,68	46,94
	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5
	Ketersediaan pangan utama	%	76,27	**77,29**
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,83	53,75
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,12	10,63

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,58	4,89
	Pertumbuhan Industri		6,13	6,28
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	716,05	752,29
	Nilai tukar petani			-
	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	50,12	52,66
	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	83,03	87,23
	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)		0,74	0,78
	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100
	Rasio ketergantungan		61,38	61,32
III.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
A.	**URUSAN WAJIB DASAR**			
1.	**PENDIDIKAN**			
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	35,15	60,04
	Angka partisipasi kasar:			
	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	97,78	99,425
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	98,32	98,85
	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI		7.723	8.114
	Angka Partisipasi Murni :			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	95,83	98,23
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	81,60	83,64
	Angka partisipasi sekolah :			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	102,50	100
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	71,87	71,87
	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0
	Angka Kelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,85	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	95,80	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,29	97,67
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,24	100,00
	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	23,90	61,77
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	65,61	67,25
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	860,12	860,12
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,80	98,81
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,05	89,23
2.	**KESEHATAN**			
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0,0107	0,01
	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,93	100,00
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10,86	9,98
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	7,55	7,17
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	94,40	77,64
	Rasio posyandu per satuan balita		0,0226	0,02
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,0006	0,0006
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,0006	0
	Rasio dokter per satuan penduduk		0,0001	0
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,0001	0
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	71,00	72,78
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89,78	92,02
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	89,89	89,89
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)			
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	103,2	100,00
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%		-
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00	100,00
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	43,48	45,70
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,18	0,17
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	n.a	0
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	98,34	100,00
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	69,46	94,61
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00
	Penderita diare yang ditangani	%	100,00	100,00
	Angka kejadian Malaria			-
	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0
	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	na	100,00
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100,00	100,00
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,005	0,0000
	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	100
	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100,00	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	100,00
	Cakupan kunjungan bayi		106,62	100,00
	Cakupan puskesmas		100,00	100,00
	Cakupan pembantu puskesmas	%	48,46	48,75
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,96	87,08
	Cakupan pelayanan nifas	%	89,92	92,15
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	58,23	59,69
	Cakupan pelayanan anak balita	%	70,22	71,55
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	89,79	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	89,79	92,05
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	100,00
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	100,00
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		0,24	0,24
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	21,17	22,24
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	NA	82,46
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,33	37,24
	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,00	82,04
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	47,22	48,69
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	NA
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		NA	NA
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	16,40	16,81
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	NA	NA
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	NA	97,38
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0
	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan			
	Ketaatan terhadap RTRW	%		
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**			
	Rasio rumah layak huni	%	20,04	20,54
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0688	0,0685
	Rasio permukiman layak huni	%	NA	-
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	-
	Persentase pemukiman yang tertata	%	NA	-
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	NA	-
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	-
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	NA	-
	Jumlah kawasan kumuh Kabupaten yang ditata secara keseluruhan	%	NA	-
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	55,00	56,38
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	75,00	76,88
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	80,00	82,00
	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00
	Persentase Penegakan PERDA	%	78,00	79,95
	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Persen	NA	100,00
	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	NA	100,00
	Cakupan Jumlah Konflik/Ganguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	NA	90,00
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	NA	95,00
	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	NA	5,00
6.	**SOSIAL**			
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	100,00
	Persentase PMKS yang tertangani	%	19,65	20,65
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	11,45	11,95
	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,60	0,62
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00	100,00
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100,00	100,00
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	3,23	3,31
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65,79	67,43
	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	Na	95,00
B.	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**			
1.	**TENAGA KERJA**			
	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	%	NA	NA
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	100,00	100,00
	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100,00	100,00
	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	100,00	100,00
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100,00	100,00
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100,00	100,00
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100,00	100,00
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100,00	100,00
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,21	2,67
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8,57	11,41
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	5,21	6,31
	Rasio KDRT	%	0,001	0,001
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	29,27	35,42
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%		-
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%		-
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%		-
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	54,84	55,45
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	6,25	6,85
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00
	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	1,04 (2017)	1,04
	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	1,24 (2017)	1,24
	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	1,03 (2017)	1,03
	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi	%	NA	-
	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02 (2017)	1,02
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	35,51	35,75
	Indeks Pembangunan Gender	%	92,52 (2017)	92,75
3.	**PANGAN**			
	Ketersediaan pangan utama	%	62,16	77,29
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	3.294	2.440
		Protein per Kpt	69,00	61,99
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	NA	100,00
4.	**PERTANAHAN**			
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,0179	0,03
	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100,00	100,00
	Penyelesaian izin lokasi	%	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**			
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada	ada
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		26,65 (2017)	-
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		89	-
	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan		NA	-
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten :			
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Jumlah	NA	-
	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standard Minimun	Jumlah	NA	-
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	NA	-
	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah	NA	-
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah	NA	-
	Penetapan hak MHA	Jumlah	NA	-
	Fasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	NA	-
	Fasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	NA	-
	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	NA	-
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	ada	ada
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00
	Timbulan sampah yang ditangani	%	83,75 (2017)	84,50
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	16,27 (2017)	17,05
	Persentase cakupan area pelayanan	%	85,84	87,99
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85,84	87,99
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,08	85,35
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	Tidak Ada	Ada
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	NA	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,88	0,91
	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,62	0,65
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,81	0,85
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,15	0,20
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	ada	ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	87,82	85,08
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	81,31	-
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	95,65	98,04
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	NA	-
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	-	-
	Persentase LSM aktif	%	20,34	20,84
	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	-
	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00
	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	NA	-
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,82	0,82
	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,96	2,96
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,82	8,90
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	-
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	NA	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	2,4	2,4
	Ratio Akseptor KB	Rasio	76,22	76,75
	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	64,96	65,15
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	0,98	0,98
	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,99	15,93
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,10	22,35
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	85,23	86,52
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	62,20	63,15
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	51,44	51,95
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	35,63	35,98
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	18,18
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	154,55
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100,00	100,00
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	NA	-
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	125,22	125,22
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	44,50
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100,09	100,00
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	NA	-
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	NA	-
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	NA	-
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	NA	-
	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	NA	-
	Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah	85.994	-
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	44,45

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
9.	**PERHUBUNGAN**			
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	411.055	423.325
	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0013	0,59
	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.878	1.924
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	1/1/0	1/1/1
	Persentase layanan angkutan darat	%	8,04	8,54
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	35,60	36,49
	Pemasangan Rambu-rambu	%	14,43	20,17
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0618	0,0641
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	Orang berjumlah 346.014 dan barang berjumlah 204	Orang berujumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah	Orang berujumlah 411.055 dan barang berjumlah 518,6	Orang berujumlah 415.055 dan barang berjumlah 530,60
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	NA	-
	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	NA	-
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	NA	-
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	-
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	NA	-
	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	1	1
	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	1	1
	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	%	NA	-
	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	%	NA	-
	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia/ Belum	Tersedia	Tersedia
	Persentase Website OPD	%	40,00	41,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
	Persentase koperasi aktif	%	44,10	45,00
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	30,00	35,88
	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	18.183	18.183
	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,00	30,35
	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	18	20
12.	**PENANAMAN MODAL**			
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	16.689.711.214	17,11
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(juta rupiah)	16,88	17,25
	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7	7
	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2	2
	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14	14
	Lama Proses Perizinan	hari	1-15	1-15
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4	4
	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7	7
	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	3	3
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	20,31	20,75
	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,01	87,35
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	100,00
	Cakupan pembinaan olahraga	%	5,00	5,13
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,00	7,18
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00	100,00
	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	11	11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	11	11
	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	25	25
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	7	8
	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	6	7
	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	15	15
	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	50,00	51,00
	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	50,00	52,00
	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	1	2
	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	22	22
	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Jumlah	1/229	1/229
	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	11	-
14.	**STATISTIK**			
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada
	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	ada	ada
	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada
	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	ada	ada
15.	**PERSANDIAN**			
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	NA	-
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Sangak Kurang/Kurang/Cukup/Baik/Sangat Baik	NA	Baik
16.	**KEBUDAYAAN**			
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	4	4
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	NA	-
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	4	4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
17.	**PERPUSTAKAAN**			
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	4,22	4,75
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	49.746	51.250
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00146	0,00147
	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Jumlah	2.640	2.706
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	15.221	15.221
	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100,00	100,00
	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	111	111
	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	1	1
	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2
18.	**KEARSIPAN**			
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	35,08	35,25
	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	7	8
	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	NA	-
	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	13	13
C.	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**			
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
	Produksi perikanan	ton	628.748,61	684.720,68
	Konsumsi ikan	%	106,53	106,53
	Cakupan bina kelompok nelayan	%	3,45	100,00
	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	10,68	11,00
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	NA	-
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	NA	-
	Nilai tukar nelayan		NA	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
2.	**PARIWISATA**			
	Kunjungan wisata	Jumlah	12.573	13.206
	Lama kunjungan Wisata	hari	NA	1
	PAD sektor pariwisata	%	0,14	0,15
	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	10	10
	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27
	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	12	12
	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2
	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		3	3
	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2
	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	-	-
	Jumlah Objek Wisata dikelolah dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	3	3
	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1
	Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta	Jumlah	3	3
3.	**PERTANIAN**			
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.085.063,47 (2017)	1.125.325,00
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	25,51	26,52
	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.615.266,50	2.620.315,00
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	61,49	61,80
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	NA	-
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	58.066	-
	Cakupan bina kelompok petani	%	NA	100,00
6.	**PERDAGANGAN**			
	Ekspor Bersih Perdagangan	Jumlah	NA	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	NA	-
7.	**PERINDUSTRIAN**			
	Pertumbuhan Industri	%	6,09	7,10
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	35,00	36,00
	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	20	20
8.	**TRANSMIGRASI**			
	Persentase transmigran swakarsa	%	100,00	100,00
	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	100	125
	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	250	250
D.	**PENUNJANG URUSAN**			
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**			
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00	100,00
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00	100,00
	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	NA	-
2	**KEUANGAN**			
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP
	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,31	-
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,20	-
	Persentase belanja pendidikan	%	26,16	20,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Persentase belanja kesehatan	%	14,54	10,00
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	58,03 /41,97	55,38/44,15
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,22	0,22
	Penetapan APBD	tepat waktu/ti dak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11.356	17.601,78
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	NA	-
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	13,21	13,54
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	40	40
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	3.071	3.071
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	NA	-
	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompotensi	%	NA	
	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat tehnis dan diklat managerial	%	NA	-
	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	NA	-
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00	100,00
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00	100,00
	PENERAPAN SIDa :		100,00	100,00
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00	100,00
5	**PENGAWASAN**			
	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100,00	100,00
	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	100,00	100,00
	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100,00	100,00
	Persentase pelanggaran pegawai	%	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2020
	Jumlah temuan BPK	Jumlah	-	-
6	**SEKRETARIAT DEWAN**			
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada
	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada
	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	ada	ada
7	**SEKRETARIAT DAERAH**			
	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%		
	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	0	-
	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	NA	-
	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	NA	-
	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	80,00	
	Persentase Besaran Efesiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	-	
	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	NA	
	Nilai LPPD	Nilai	2.771	2.885
	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%		
	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	25,00	100,00
	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%		
	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretarist daerah yang diverifikasi	%		
8	**KECAMATAN**			
	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 %	jumlah	NA	22
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00
	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	NA	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target
				2020
	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	NA	100,00

BAB 7

PENUTUP

7.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2020, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat,, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2020 merupakan acuan bagi OPD, dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2020, sehingga di harapkan mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah '**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi**'

7.2. KESIMPULAN

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2020.

RKPD Tahun 2020 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2020 dengan sasaran program – program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Kebijakan pembangunan pada tahun 2020 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif yang diperlukan untuk pendanaannya.

Selanjutnya Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2020. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program–program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2020 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

.

BUPATI LUWU,

Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd